

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INTANSI PEMERINTAH



DIBUAT OLEH

**BALAI KEAMANAN JEMBATAN
DAN TEROWONGAN KHUSUS**

**TAHUN ANGGARAN
2025**

ALAMAT

Jl. A.H. Nasution, Cisaranten Endah, Kec. Arcamanik, Kota
Bandung, Jawa Barat 40294

Jl. Rawamangun Muka, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur,
DKI Jakarta 13220

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 dapat disusun dan diterbitkan tepat pada waktunya. Laporan ini merupakan perwujudan pelaksanaan Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 09 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan di dalam *Review Rencana Strategis (Renstra)* Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025 - 2029. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan merujuk pada indikator kinerja keluaran (*output*) dan kinerja hasil (*outcome*) yang telah ditetapkan dan direalisasikan per tahun. Penyusunan Laporan ini didukung dengan sistem pengelolaan data kinerja dilingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dengan menggunakan Sistem Informasi *e-Monitoring*, SiPP, dan *e-Procurement* yang secara sistematis dari waktu ke waktu dapat dipantau perkembangan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan program sejak proses prakontrak sampai dengan berakhirnya kontrak.

Dengan disusunnya laporan ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait dan juga dapat menjadi bahan evaluasi atas pencapaian kinerja serta dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada masa yang akan datang. Pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disampaikan realisasi kinerja Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus Tahun 2025 dibandingkan dengan Penetapan Kinerja Tahun 2024 dan hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja Balai Jembatan Khusus dan Terowongan Khusus dan Jembatan untuk 16 (enam belas) indikator kinerja output sudah memuaskan. Namun terdapat beberapa indikator kinerja program yang belum mencapai target dan perlu mendapat perhatian pada tahun mendatang. Kepada semua pihak yang telah membantu memberikan masukan dan saran serta pendampingan selama penyusunan laporan ini, disampaikan ucapan terima kasih atas kerjasamanya.

Jakarta, 15 Januari 2026

Kepala Balai Keamanan Jembatan
dan Terowongan Khusus

Armen Adekristi, S.T., MSCE.

NIP.198410152008011002



RINGKASAN EKSEKUTIF

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) membentuk Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ) untuk memastikan keamanan proyek infrastruktur tersebut saat masa penyiapan pelaksanaan konstruksi, operasional dan pemeliharaan. Berdirinya KKJTJ dimulai sejak runtuhnya Jembatan Kutai Kartanegara pada tanggal 26 November 2011. Dari kejadian tersebut, Kementerian PUPR berinisiatif untuk membuat Permen PUPR Nomor 41 Tahun 2015 yang kemudian diperbaharui menjadi Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan dan kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan melalui Kepmen PUPR no. 485/KPTS/M/2015 yang direvisi melalui Kepmen PUPR no. 341/KPTS/M/2017 serta Kepmen PUPR no. 1003/KPTS/M/2019.

Komisi ini memberikan rekomendasi terkait keamanan bangunan, khususnya infrastruktur Jembatan dan terowongan kepada Menteri PU. Rekomendasi teknis tersebut dapat diberikan baik pada tahap desain untuk pelaksanaan konstruksi, operasional ataupun proses pemeliharaan. Rekomendasi tersebut diharapkan juga dapat memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi di lapangan, sehingga Menteri dapat mengambil keputusan guna menjaga keamanan konstruksi. Rekomendasi yang diusulkan oleh KKJTJ tersebut berupa sertifikat persetujuan desain, sertifikat persetujuan operasional dan sertifikat persetujuan pemeliharaan. Sebelum sertifikat diterbitkan, surat izin persetujuan desain untuk pelaksanaan konstruksi, surat izin persetujuan operasional dan surat izin persetujuan pemeliharaan harus diterbitkan terlebih dahulu. Sertifikat persetujuan adakalanya belum diterbitkan apabila masih ada catatan yang harus diperbaiki terlebih dahulu oleh Pemilik Jembatan.

Jembatan dan terowongan jalan yang harus mendapatkan rekomendasi diatur dalam Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2022, Kepmen PUPR no. 485/KPTS/M/2015, Kepmen PUPR no. 341/KPTS/M/2017, dan Kepmen PUPR no. 1003/KPTS/M/2019 adalah sebagai berikut :

- a. Jembatan dengan bentang paling sedikit 100 m;
- b. Jembatan pelengkung dengan bentang paling sedikit 60 m, jembatan gantung dan jembatan beruji kabel;
- c. Jembatan dengan total panjang paling sedikit 3.000 m;
- d. Jembatan dengan ketinggian pilar di atas 40 m;
- e. Terowongan jalan dengan panjang bagian tertutup paling sedikit 200m;
- f. Terowongan jalan yang menggunakan cara pengeboran/*jacking* dalam metode pelaksanaan;



g. Jembatan dan terowongan jalan yang memiliki kompleksitas struktur tinggi atau memiliki nilai strategis tinggi atau didesain menggunakan teknologi baru.

Untuk mendukung kegiatan KKJTJ kemudian dibentuklah Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus (BKJTK) melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian Pekerjaan Umum yang nantinya mempunyai tugas pokok melaksanakan evaluasi teknis dan penyiapan saran teknis jembatan dan terowongan khusus serta pemantauan perilaku jembatan dan terowongan khusus.

Jembatan dan terowongan khusus di Indonesia yang sudah terdata oleh Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus sekitar 235 jembatan dan terowongan khusus, sebanyak 8 jembatan dan terowongan dalam tahap pembahasan desain, 17 dalam tahap konstruksi, 5 jembatan dan terowongan dalam proses laik fungsi, dan 205 dalam tahap layan. Dari jumlah jembatan dan terowongan di atas KKJTJ telah ikut dalam pembuatan rekomendasi izin persetujuan desain terdapat 92 jembatan dan terowongan serta izin persetujuan laik fungsi untuk 76 jembatan dan terowongan baik di tingkat daerah maupun tingkat nasional. Pada tahun anggaran 2025 Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus telah membantu dalam pembuatan rekomendasi izin persetujuan desain untuk 12 jembatan bentang panjang dan terowongan khusus serta izin persetujuan laik fungsi untuk 2 jembatan bentang panjang dan terowongan khusus baik di tingkat daerah maupun tingkat nasional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Dokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dokumen Penetapan Kinerja disusun dengan memperhatikan antara lain dokumen perencanaan jangka menengah, dokumen perencanaan kinerja tahunan, dan dokumen penganggaran dan/atau pelaksanaan anggaran. Oleh karena itu beberapa hal yang kami ingin simpulkan dari Laporan Kinerja Instansi yang kami buat adalah sebagai berikut:

1. Pencapaian Kinerja

Berdasarkan data pada sistem e-monitoring PU, pagu anggaran Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus Tahun 2025 adalah Rp 7.841.775.000, dengan realisasi sebesar Rp 7.830.383.000 atau 99,85 %. Rincian kontribusi per kegiatan adalah maksimum dari Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan Rp 6.104.769.000 (99,93 %) dan minimum dari Layanan Perkantoran Rp 1.725.614.000 (99,58 %).



2. Perubahan Perjanjian Kinerja

Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus tidak mengalami perubahan target perjanjian kinerja, hanya perubahan pagu anggaran dari Rp 15.418.118.000 menjadi Rp 7.841.775.000.

No	Indikator Kinerja			Satuan	Target			Ket
	PK Awal	Satuan	PK Revisi dan PK Revisi Akhir		PK Awal	PK Revisi	PK Rev Akhir	
	Program Infrastruktur Konektivitas				Program Infrastruktur Konektivitas			
	Meningkatnya kualitas bisnis proses penyelenggaraan jalan				Meningkatnya kualitas bisnis proses penyelenggaraan jalan dan jembatan			
1	Tingkat pencapaian kinerja proses bisnis penyelenggaraan jalan	%	Tingkat efektivitas kinerja proses bisnis penyelenggaraan jalan dan jembatan	%				
	Tingkat kinerja pelayanan keteknikan bidang jalan dan jembatan	%	Tingkat kinerja pelayanan keteknikan bidang jalan dan jembatan	%	100	100	100	
	Program Dukungan Manajemen				Program Dukungan Manajemen			
	Meningkatnya dukungan manajemen Kementerian PU dan tugas teknis lainnya				Meningkatnya dukungan manajemen Kementerian PU dan tugas teknis lainnya			
1	Tingkat kualitas dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya Ditjen Bina Marga	%	Tingkat kualitas dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya (DJBK)	%				
	Tingkat kinerja dukungan manajemen	%	Tingkat Dukungan Manajemen BBPJN/BPJN	%	85,76	85,76	85,76	
	TOTAL ANGGARAN				15.418.118.000	17.979.462.000	7.841.775.000	

3. Isu Strategis

Adapun pencapaian kinerja pada akhir tahun adalah sebagai berikut:

- Berdasarkan *Output* dapat dirinci sebagai berikut:
 - Jumlah Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan: Persentase capaian pada kegiatan Jumlah Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan sebesar 100 % dari capaian 1 Rekomendasi Kebijakan terhadap target awal 1 Rekomendasi Kebijakan.
 - Jumlah Layanan Perkantoran: Persentase capaian pada kegiatan Jumlah Layanan Perkantoran sebesar 100% dari capaian 1 Layanan terhadap target awal 1 Layanan.
- Berdasarkan *Outcome* dapat dirinci sebagai berikut:

Kinerja terhadap capaian *outcome* sebesar 104,54% karena parameter tingkat fasilitasi advis teknis bidang jalan dan jembatan yang masuk dalam *output* layanan keteknikan bidang jalan dan jembatan telah terpenuhi 104,54% sesuai dengan realisasi fisik *e-monitoring* yang mencapai 99,93%.

3. Kinerja Keuangan

Pada Tahun Anggaran 2025 Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus mendapatkan alokasi dana dari Pemerintah (APBN) melalui DIPA Nomor 145.04.1.693803/2025 tanggal 2 Desember 2024 sebesar Rp. 15.418.118.000 - (lima belas miliar empat ratus delapan belas juta seratus delapan belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- *Output-1:*

Jumlah Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan dengan 1 (satu) paket kegiatan, besaran alokasi dana sebesar Rp 11.549.178.000,-.

- *Output-2:*

Jumlah Layanan Organisasi dan Tata Kelola dengan 3 (tiga) paket kegiatan, besaran alokasi dana sebesar Rp 1.160.228.000,-.

- *Output-3:*

Jumlah Layanan Umum dengan 2 (dua) paket kegiatan, besaran alokasi dana sebesar Rp 186.668.000,-.

- *Output-4:*

Jumlah Layanan Perkantoran dengan 5 (lima) paket kegiatan, besaran alokasi dana sebesar Rp 2.142.944.000,-.

- *Output-5:*

Jumlah Layanan Sarana Internal dengan 3 (tiga) paket kegiatan, besaran alokasi dana sebesar Rp 122.000.000,-.

Kronologis revisi Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus adalah sebagai berikut:

- DIPA awal dari Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus sesuai dengan Perjanjian Kinerja memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 15.418.118.000 - (lima belas miliar empat ratus delapan belas juta seratus delapan belas ribu rupiah).
- Revisi I pada tanggal 21 Februari 2025 dilakukan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Perubahan dilakukan dengan tidak mengubah pagu sehingga pagu anggaran tetap sebesar Rp. 15.418.118.000 - (lima belas miliar empat ratus delapan belas juta seratus delapan belas ribu rupiah).
- Revisi II pada tanggal 25 Maret 2025 dilakukan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Perubahan dilakukan dengan tidak mengubah pagu sehingga pagu anggaran tetap sebesar Rp. 15.418.118.000 - (lima belas miliar empat ratus delapan belas juta seratus delapan belas ribu rupiah).



- Revisi III pada tanggal 21 April 2025 dilakukan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Perubahan dilakukan dengan mengubah pagu yang semula sebesar Rp. 15.418.118.000 - (lima belas miliar empat ratus delapan belas juta seratus delapan belas ribu rupiah) menjadi Rp 16.803.118.000,- (enam belas miliar delapan ratus tiga juta seratus delapan belas ribu rupiah).
- Revisi IV pada tanggal 23 April 2025 dilakukan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Perubahan dilakukan dengan tidak mengubah pagu sehingga pagu anggaran tetap sebesar Rp. 16.803.118.000,- (enam belas miliar delapan ratus tiga juta seratus delapan belas ribu rupiah).
- Revisi V pada tanggal 14 Juli 2025 dilakukan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Perubahan dilakukan dengan tidak mengubah pagu sehingga pagu anggaran tetap sebesar Rp. 16.803.118.000,- (enam belas miliar delapan ratus tiga juta seratus delapan belas ribu rupiah).
- Revisi VI pada tanggal 1 September 2025 dilakukan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Perubahan dilakukan dengan mengubah pagu yang semula sebesar Rp. 16.803.118.000,- (enam belas miliar delapan ratus tiga juta seratus delapan belas ribu rupiah) menjadi Rp 17.979.462.000,- (tujuh belas miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah).
- Revisi VII pada tanggal 17 Oktober 2025 dilakukan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Perubahan dilakukan dengan mengubah pagu yang semula sebesar Rp. 17.979.462.000,- (tujuh belas miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) menjadi Rp 7.868.706.000,- (tujuh miliar delapan ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus enam ribu rupiah).
- Revisi VIII pada tanggal 21 November 2025 dilakukan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Perubahan dilakukan dengan mengubah pagu yang semula sebesar Rp. 7.868.706.000,- (tujuh miliar delapan ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus enam ribu rupiah) menjadi Rp 7.841.775.000,- (tujuh miliar delapan ratus empat puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Revisi IX pada tanggal 11 Desember 2025 dilakukan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Perubahan

dilakukan dengan tidak mengubah pagu sehingga pagu anggaran tetap sebesar Rp. 7.841.775.000,- (tujuh miliar delapan ratus empat puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

4. Permasalahan dan Kendala Utama

- a) SDM yang kurang serta beban kerja yang besar menjadi penghambat dalam penyerapan anggaran;
- b) Perencanaan awal yang kurang sempurna sehingga pada saat pelaksanaan anggaran tidak perlu merevisi anggaran yang telah direncanakan di awal tahun;
- c) Efisiensi anggaran yang membuat berkurangnya kegiatan yang telah direncanakan pada awal tahun.
- d) Kurang tersosialisasinya Peraturan/NSPK terkait mengenai penyelenggaraan jembatan dan terowongan khusus kepada pengelola jembatan dan terowongan khusus.

5. Strategi Pemecahan Masalah dan Harapan ke Depan

- a) Pengembangan SDM perlu mendapat perhatian dan perlu diprogramkan penambahan SDM secara periodik baik perekrutan baru maupun mutasi dari Unit Kerja Lainnya sesuai kebutuhan Balai Jembatan Khusus dan Terowongan;
- b) Perlu adanya peningkatan kemampuan maupun keterampilan dengan cara mengikutsertakan SDM dalam kegiatan pelatihan - pelatihan;
- c) Pada awal perencanaan anggaran berikutnya harus dipertimbangkan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada tahun sebelumnya;
- d) Penerbitan sertifikat tidak mengalami masalah yang berarti sehingga dapat menerbitkan lebih banyak sertifikat lagi dengan tetap mempertimbangkan unsur teknis jembatan;
- e) Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus perlu mempertahankan komitmen dan meningkatkan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- f) Perlu adanya penelusuran *database* dari jembatan khusus dan terowongan (laporan perhitungan, gambar desain, *as built drawing*, dan data-data lain yang diperlukan Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus) karena data awal Jembatan Khusus dan Terowongan yang ada masih minim, sehingga

memperlambat pelaksanaan pekerjaan.

6. Keberhasilan dan Kegagalan

- a) Selama tahun 2025 Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus selaku Sekretariat Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ) berhasil mengeluarkan 12 Sertifikat Persetujuan Desain (12 Jembatan Khusus) dan 2 Sertifikat Laik Fungsi (2 Jembatan Khusus). Selain itu Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap 7 Jembatan Khusus.
- b) Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus gagal menyerap anggaran sebesar 0,15% dari total pagu revisi.

7. Langkah Antisipatif

- a) Percepatan sertifikasi persetujuan desain dan laik fungsi jembatan khusus dan terowongan jalan.
- b) Melakukan evaluasi terhadap penyerapan anggaran tahun 2025 agar penyerapan anggaran pada tahun 2026 lebih baik.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	i
DAFTAR SINGKATAN	i
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Tugas dan Fungsi Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus.....	3
1.3 Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus.....	4
1.4 Sarana dan Prasarana Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus	12
1.5 Isu Strategis Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus.....	14
1.6 Sistematika Laporan.....	17
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA	19
2.1 Uraian Singkat <i>Review</i> Rencana Strategis (Renstra) DJBM 2025 - 2029	19
2.1.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Bina Marga..	20
2.1.2 Kebijakan, Program dan Kegiatan Direktorat Jenderal Bina Marga	22
2.1.3 Visi, Misi, dan Tujuan Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus.....	23
2.2 Perjanjian Kinerja.....	27
2.3 Metode Pengukuran	35
2.4 Target 2025 Menurut Renstra Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus.....	36
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA.....	39
3.1 Upaya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja.....	39
3.2 Capaian Kinerja Organisasi	40
3.3 Analisis Perbandingan Kinerja Organisasi	52
3.4 Analisis Realisasi Anggaran.....	54
3.5 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	60
3.6 Analisis Pemanfaatan Laporan Kinerja	62
3.7 Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Atas Penggunaan Layanan Publik.....	65

BAB 4 PENUTUP	66
4.1 Simpulan Umum.....	66
4.2 Rekomendasi dan Tindak Lanjut	66
4.3 Permasalahan.....	66
4.4 Rekomendasi	67
LAMPIRAN	68



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.1 Formasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus.....	5
Tabel 1.1.2 Formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus.....	6
Tabel 1.1.3 Formasi Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus.....	7
Tabel 1.4 Target Indikator Kinerja Kegiatan di Lingkungan Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus.....	17
Tabel 2.1 Perbandingan PK Awal dan PK Revisi Tahun 2025	29
Tabel 2.2 Target Indikator Kinerja Output Jumlah Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan ..	29
Tabel 2.3 Target Indikator Kinerja Output Jumlah Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	30
Tabel 2.4 Target Indikator Kinerja Output Jumlah Layanan Umum	30
Tabel 2.5 Target Indikator Kinerja Output Jumlah Layanan Perkantoran	30
Tabel 2.6 Target Indikator Kinerja Output Jumlah Layanan Sarana Internal.....	31
Tabel 2.7 Target Indikator Kinerja Kegiatan di Lingkungan Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus.....	37
Tabel 3.1 Tindak Lanjut Atas Evaluasi SAKIP TA 2024.....	39
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2025 Terhadap <i>Sasaran Program</i>	40
Tabel 3.3 Capaian Kinerja Tahun 2025 Terhadap Tahun Sebelumnya	41
Tabel 3.4 Informasi Capaian Kinerja Advis dan Layanan Teknis (Pemantauan dan Evaluasi) Jembatan dan Terowongan Jalan	42
Tabel 3.5 Informasi Capaian Kinerja Dukungan Teknis Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan	45
Tabel 3.6 Informasi Capaian Kinerja Pemeliharaan Data Kepegawaian dan Evaluasi Kinerja Pegawai	46
Tabel 3.7 Informasi Capaian Kinerja Administrasi Kegiatan Satker Balai	46
Tabel 3.8 Informasi Capaian Kinerja Pengelolaan Kepegawaian	46
Tabel 3.9 Informasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Zona Integritas dan Manajemen Risiko	47
Tabel 3.10 Informasi Capaian Kinerja Sistem Pelaporan Secara Elektronik (<i>E-Monitoring</i>).....	47
Tabel 3.11 Informasi Capaian Kinerja Penyusunan Laporan Keuangan dan Pengelolaan BMN.....	47
Tabel 3.12 Informasi Capaian Kinerja Gaji Non PNS.....	47
Tabel 3.13 Informasi Capaian Kinerja Operasional dan Pemeliharaan Kantor.....	48
Tabel 3.14 Informasi Capaian Kinerja Gaji Non PNS.....	49
Tabel 3.15 Informasi Capaian Kinerja Langganan Daya dan Jasa Operasional Lainnya.....	50
Tabel 3.16 Informasi Capaian Kinerja Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	51
Tabel 3.17 Informasi Capaian Kinerja Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	51
Tabel 3.18 Informasi Capaian Kinerja Pengadaan <i>Meubeleir</i>	52
Tabel 3.19 Informasi Capaian Kinerja Pengadaan Fasilitas Kantor	52
Tabel 3.20 Perbandingan Capaian Kinerja	52
Tabel 3.21 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Kinerja terhadap Renstra.....	53
Tabel 3.22 Sumber DIPA Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus Tahun 2025	56
Tabel 3.23 Kronologis DIPA Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus Tahun 2025	57

Tabel 3.24 Perbandingan Realisasi Anggaran Pertahun	59
Tabel 3.25 Perbandingan Pagu Anggaran, Realisasi dan Capaian Tahun 2025	60
Tabel 3.26 Perhitungan nilai rata-rata per unsur.....	65



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus.....	5
Gambar 1.2 Persentase Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	7
Gambar 1.3 Persentase Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	8
Gambar 1.4 Persentase Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	8
Gambar 1.5 Persentase Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional	9
Gambar 1.6 Persentase Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia	9
Gambar 1.7 Persentase Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	10
Gambar 1.8 Sertifikat Pelatihan Pemeriksaan	11
Gambar 1.9 Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa.....	15
Gambar 2.1 Perjanjian Kinerja (PK) Awal.....	32
Gambar 2.2 Perjanjian Kinerja (PK) Revisi	33
Gambar 2.3 Tahapan Pengukuran Kinerja	35
Gambar 2.4 Tahapan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah	36
Gambar 3.1 Kegiatan Advis dan Layanan Teknis (Pemantauan dan Evaluasi).....	41
Gambar 3.2 Dukungan Teknis Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan	45
Gambar 3.3 Contoh Sertifikat Persetujuan Desain dan Laik Fungsi.....	46
Gambar 3.4 Bimbingan Teknis Jabatan Fungsional dan Sasaran Kinerja Pegawai	48
Gambar 3.5 Penyelenggaraan Zona Integritas.....	49
Gambar 3.6 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	51
Gambar 3.7 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	52
Gambar 3.8 Pengadaan Meubeleir	56
Gambar 3.9 Pengadaan Fasilitas Kantor	57
Gambar 3.10 Kurva S Rencana dan Realisasi Keuangan Tahun 2025	58
Gambar 3.11 Kurva S Rencana dan Realisasi Fisik Tahun 2025	59
Gambar 3.12 Grafik Perbandingan SDM, Realisasi Keuangan, dan Fisik	61



DAFTAR SINGKATAN

No	DAFTAR SINGKATAN	KETERANGAN
1	AKIP	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2	APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
3	ASN	Aparatur Sipil Negara
4	BA BUN	Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara
5	BBPJN	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional
6	BMN	Barang Milik Negara
7	BPJN	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional
8	DIPA	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
9	Dukman	Dukungan Manajemen
10	Duknis	Dukungan Teknis
11	IJD	Inpres Jalan Daerah
12	IKK	Indikator Kinerja Kegiatan
13	IKN	Ibu Kota Nusantara
14	IKSP	Indikator Kinerja Sasaran Program
15	IKSS	Indikator Kinerja Sasaran Strategis
16	IKU	Indikator Kinerja Utama
17	Inpres	Instruksi Presiden
18	IRI	<i>International Roughness Index</i>
19	KEK	Kawasan Ekonomi Khusus
20	KI	Kawasan Industri
21	KPI	<i>Key Performance Indicator</i>
22	KRO	Klasifikasi Rincian Output
23	KSPN	Kawasan Strategis Pariwisata Nasional
24	LAKIN	Laporan Kinerja
25	LMAN	Lembaga Manajemen Aset Negara
26	P2JN	Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional
27	PCI	<i>Pavement Condition Index</i>
28	PHLN	Pinjaman Hibah Luar Negeri
29	PJN	Pelaksanaan Jalan Nasional
30	PK	Perjanjian Kinerja
31	PKN	Pusat Kegiatan Nasional
32	PKW	Pusat Kegiatan Wilayah
33	PN	Prioritas Nasional
34	PNS	Pegawai Negeri Sipil
35	POK	Petunjuk Operasional Kegiatan
36	PPK	Pejabat Pembuat Komitmen
37	PPNPN	Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri
38	PPPK	Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja



39	Pro-PN	Proyek Prioritas Nasional
40	Rencum	Rencana Umum
41	Renstra	Rencana Strategis
42	RKA-KL	Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
43	RO	Rincian Output
44	RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
45	RPM	Rupiah Murni
46	RUNK	Rencana Umum Nasional Keselamatan
47	SAKIP	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
48	Satker	Satuan Kerja
49	SBSN	Surat Berharga Syariah Negara
50	SDM	Sumber Daya Manusia
51	SHT	Sisa Hasil Tender
52	SIPP	Sistem Informasi Pemantauan Proyek
53	SKPD-TP	Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan
54	SMKK	sistem manajemen keselamatan konstruksi
55	TA	Tahun Anggaran
56	Unker	Unit Kerja
57	Unor	Unit Organisasi
58	UPT	Unit Pelaksana Teknis



BAB 1 PENDAHULUAN

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Maka Pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Akuntabilitas merupakan kata kunci dari sistem tersebut yang dapat diartikan sebagai perwujudan dari kewajiban seseorang atau instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dan berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara periodik.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat dengan SAKIP tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mana didalamnya menyebutkan SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Tujuan Sistem AKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya Pemerintah yang baik dan terpercaya. Sedangkan sasaran dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

1. Menjadikan instansi Pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
2. Terwujudnya transparansi instansi Pemerintah;
3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional;
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah.

Penyelenggaraan SAKIP ini dilaksanakan untuk menghasilkan sebuah laporan kinerja yang berkualitas serta selaras dan sesuai dengan tahapan-tahapan meliputi :

1. Rencana Strategis

Rencana strategis merupakan dokumen perencanaan instansi Pemerintah dalam periode 5 (lima) tahunan. Rencana strategis ini menjadi dokumen perencanaan untuk arah pelaksanaan program dan kegiatan dan menjadi landasan dalam penyelenggaraan SAKIP.

2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja selain berisi mengenai perjanjian penugasan/pemberian amanah, juga terdapat sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang diperjanjikan untuk dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun serta memuat rencana anggaran untuk program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis.

3. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan langkah untuk membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD tahun berjalan. Pengukuran kinerja dilakukan oleh penerima tugas atau penerima amanah pada seluruh instansi pemerintah.

4. Pengelolaan Kinerja

Pengelolaan kinerja merupakan proses pencatatan/registrasi, penatausahaan dan penyimpanan data kinerja serta melaporkan data kinerja. Pengelolaan data kinerja mempertimbangkan kebutuhan instansi pemerintah sebagai kebutuhan manajerial, data/laporan keuangan yang dihasilkan dari sistem akuntansi dan statistik pemerintah.

5. Pelaporan Kinerja

Pelaporan kinerja adalah proses menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Laporan kinerja tersebut terdiri dari Laporan *Monitoring* dan Evaluasi Kinerja Tahunan. Laporan Kinerja Tahunan paling tidak memuat perencanaan strategis, pencapaian sasaran strategis instansi pemerintah, realisasi pencapaian sasaran strategis dan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja.

6. Reviu dan Evaluasi Kinerja

Reviu merupakan langkah dalam rangka untuk meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan kepada pimpinan. Reviu tersebut dilaksanakan oleh aparat pengawasan internal Pemerintah dan hasil reviu berupa surat pernyataan yang telah direviu dan ditandatangani oleh aparat pengawasan internal Pemerintah. Sedangkan evaluasi kinerja merupakan evaluasi dalam rangka implementasi SAKIP di instansi Pemerintah.

1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan keinginan nyata Pemerintah untuk melaksanakan *good governance* dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Dalam suatu pemerintahan yang baik salah satu hal yang disyaratkan adalah terselenggaranya *Good Governance*.

Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus mengupayakan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dan fungsi manajemen kinerja secara taat asas melalui penerapan seluruh elemen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP), yang meliputi: Renstra, Penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja, LAKIP dan evaluasi LAKIP. Pada tahun 2025, Renstra yang dijadikan acuan adalah Review Renstra Kementerian Pekerjaan Umum yang ditetapkan tahun 2025 sebagai arah pembangunan bidang jalan dan jembatan.

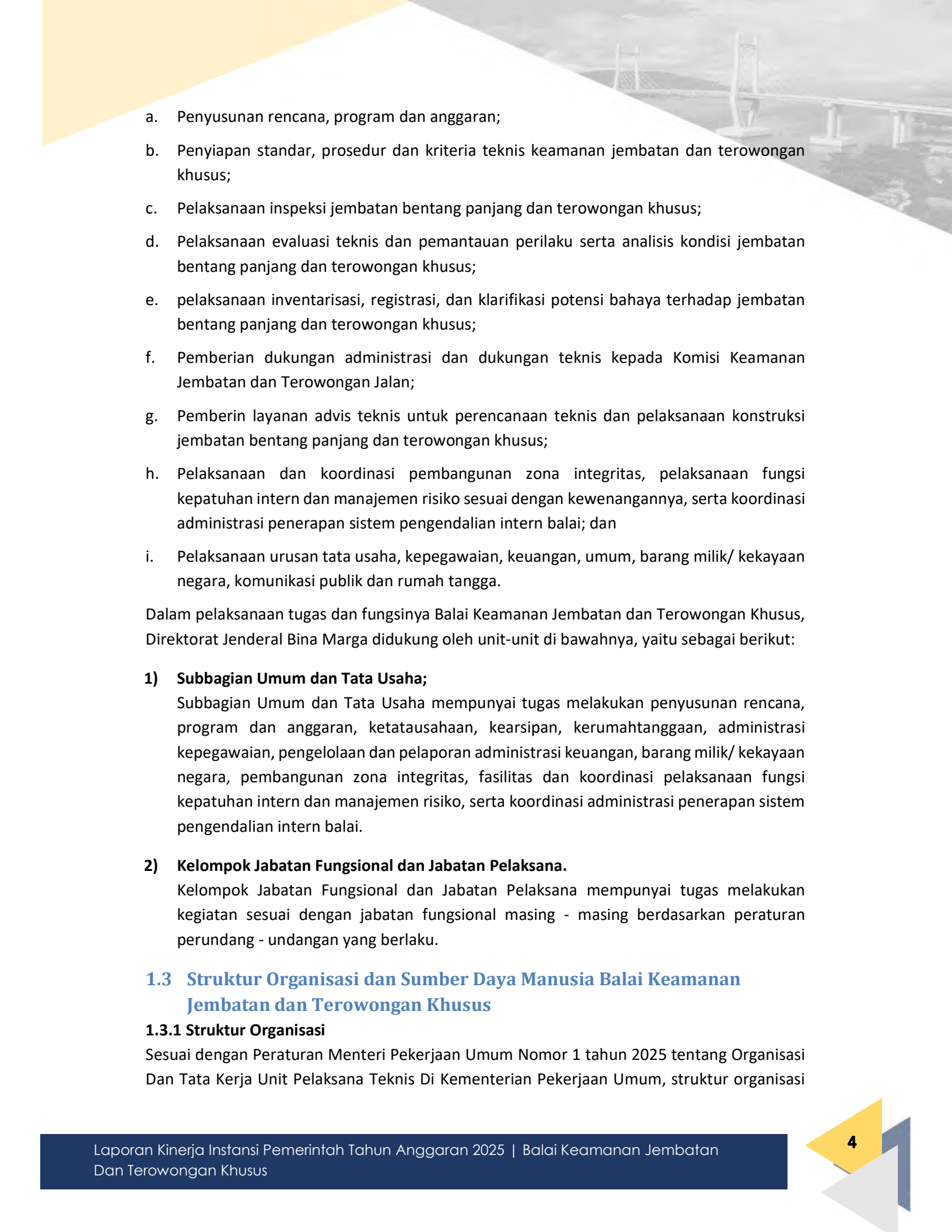
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus, Direktorat Jenderal Bina Marga Tahun 2025 ini disusun berdasarkan atas capaian kinerja dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus yang merupakan salah satu unit kerja dibawah Direktorat Jenderal Bina Marga, yang terbentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian Pekerjaan Umum.

1.2 Tugas dan Fungsi Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus didukung oleh unit-unit kerja yang berada dibawahnya sebagaimana tertuang dalam Bagian Kelima Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian Pekerjaan Umum.

Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus mempunyai tugas pokok melaksanakan evaluasi teknis dan pemantauan perilaku jembatan bentang panjang dan terowongan khusus, memberikan dukungan administrasi dan teknis kepada Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan dan memberikan layanan advis teknis melalui koordinasi dengan Direktorat Pembangunan Jembatan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut sebagaimana tertuang dalam pasal 133 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 tahun 2025, Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus menyelenggarakan fungsi :

- 
- a. Penyusunan rencana, program dan anggaran;
 - b. Penyiapan standar, prosedur dan kriteria teknis keamanan jembatan dan terowongan khusus;
 - c. Pelaksanaan inspeksi jembatan bentang panjang dan terowongan khusus;
 - d. Pelaksanaan evaluasi teknis dan pemantauan perilaku serta analisis kondisi jembatan bentang panjang dan terowongan khusus;
 - e. pelaksanaan inventarisasi, registrasi, dan klarifikasi potensi bahaya terhadap jembatan bentang panjang dan terowongan khusus;
 - f. Pemberian dukungan administrasi dan dukungan teknis kepada Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan;
 - g. Pemberin layanan advis teknis untuk perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi jembatan bentang panjang dan terowongan khusus;
 - h. Pelaksanaan dan koordinasi pembangunan zona integritas, pelaksanaan fungsi kepatuhan intern dan manajemen risiko sesuai dengan kewenangannya, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern balai; dan
 - i. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, umum, barang milik/ kekayaan negara, komunikasi publik dan rumah tangga.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus, Direktorat Jenderal Bina Marga didukung oleh unit-unit di bawahnya, yaitu sebagai berikut:

1) Subbagian Umum dan Tata Usaha;

Subbagian Umum dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, administrasi kepegawaian, pengelolaan dan pelaporan administrasi keuangan, barang milik/ kekayaan negara, pembangunan zona integritas, fasilitas dan koordinasi pelaksanaan fungsi kepatuhan intern dan manajemen risiko, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern balai.

2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing - masing berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

1.3 Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus

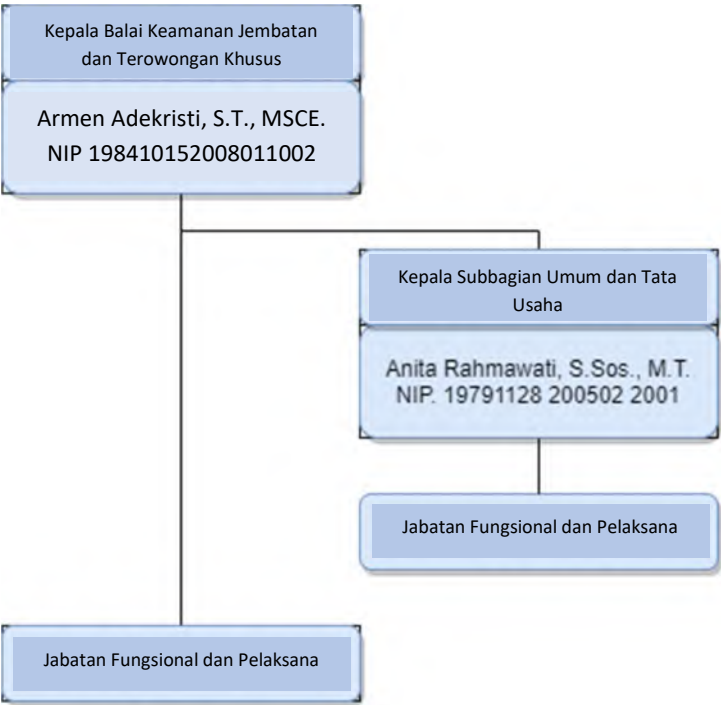
1.3.1 Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian Pekerjaan Umum, struktur organisasi

Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus, Direktorat Jenderal Bina Marga dengan unit kerja yang berada dibawahnya terdiri atas :

- 1. Subbagian Umum dan Tata Usaha; dan
- 2. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

Struktur Organisasi Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus, Direktorat Jenderal Bina Marga dapat dilihat dalam **Gambar 1.1**.



Sumber : TU Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus, 2025

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus

1.3.2 Sumber Daya Manusia

Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus menjalankan tugas dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Indonesia. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus pada tahun 2025 ini didukung oleh 33 orang pegawai. Rincian formasi pegawai di lingkungan Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1.1 Formasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus

		1	2	3	4	5	6	7
Jenis Kelamin	Laki-Laki	24						
	Perempuan	9						

Golongan		IV a-b	III c-d	III a-b	II c-d	II a-b	I c-d	I a-b
Jumlah		5	7	13	1	-	-	-
Jabatan	Struktural	2						
	Fungsional	24						
Tingkat Usia		20-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	>55
Jumlah		5	8	3	2	6	-	-
Tingkat Pendidikan		S3	S2	S1	D4	D3	SMA	SMP
Jumlah		2	12	10	1	1	-	-

Sumber : Data Kepegawaian Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus, 2025

Tabel 1.1.2 Formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus

	1	2	3	4	5	6	7
Laki-Laki	6						
Perempuan	0						
Golongan	XI	X	IX	VII	VI	V	IV
Jumlah	-	-	3	1	-	2	-
Struktural	0						
Fungsional	6						
Tingkat Usia	20-30	31-35	36-40	41-45	46-50	51-55	>55
Jumlah	2	2	1	-	1	-	-
Tingkat Pendidikan	S3	S2	S1	D4	D3	SMA	SMP
Jumlah	-	-	2	1	1	2	-

Sumber : Data Kepegawaian Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus, 2025

Dari tabel komposisi jumlah pegawai PNS dan PPPK Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus Tahun Anggaran 2025 sebanyak 33 orang, dapat disimpulkan mengenai Keadaan Pegawai sebagai berikut:

1. Dilihat dari segi komposisi **Jenis Kelamin** pada **Tabel 1.1, 1.2 dan 1.3**, menunjukkan pegawai PNS laki-laki sebanyak 24 orang, pegawai PNS perempuan sebanyak 9 orang dan pegawai PPPK laki-laki sebanyak 6 orang. Hal ini dapat dikatakan lebih banyak pegawai laki-laki, kesadaran pribadi tentang kesetaraan gender dalam hal jenis kelamin di Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus sudah Baik.
2. Dilihat dari segi komposisi **Golongan** pada **Tabel 1.1 dan 1.2**, menunjukkan bahwa jumlah pegawai dominan bergolongan IIIa-b. Dari komposisi di atas maka Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus perlu penambahan SDM sesuai dengan bidangnya.
3. Dilihat dari segi komposisi **Jabatan** pada **Tabel 1.1 dan 1.2**, menunjukkan bahwa jumlah pegawai yang paling banyak adalah jabatan fungsional dengan jumlah 30 orang. Dari komposisi di atas maka Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus perlu penambahan SDM sesuai dengan bidangnya.

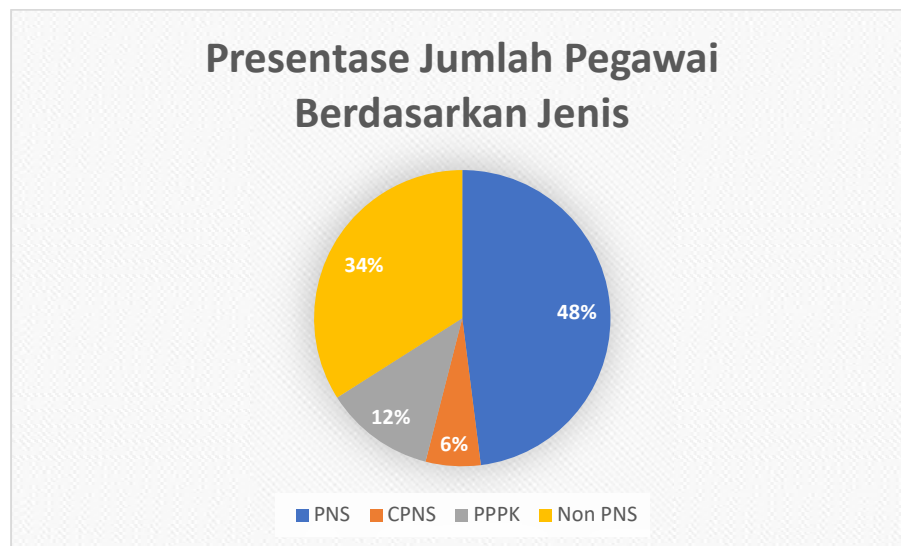
4. Dilihat dari segi komposisi **Tingkat Usia** pada **Tabel 1.1, 1.2 dan 1.3**, menunjukkan bahwa jumlah pegawai dominan berusia 20 – 35 tahun.
5. Dilihat dari segi komposisi **Tingkat Pendidikan** pada **Tabel 1.1** menunjukkan pegawai PNS dengan Pendidikan S1 sebanyak 15 orang dan D3 sebanyak 2 orang. Dengan adanya hal ini dapat dikatakan perlu adanya peningkatan kemampuan maupun keterampilan dengan cara mengikut sertakan SDM dalam kegiatan pelatihan – pelatihan dan beasiswa pendidikan.

Untuk itu dalam pengembangan SDM perlu mendapat perhatian dan perlu diprogramkan penambahan SDM secara periodik baik perekrutan baru maupun mutasi dari Unit Kerja lainnya sesuai kebutuhan Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus.

Secara keseluruhan Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus didukung oleh sumber daya manusia yang tersaji seperti data di bawah ini :

a. Jumlah SDM berdasarkan Jenis PNS CPNS PPPK

Jumlah SDM Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus berdasarkan jenis pegawai : PNS sebanyak 24 Orang, CPNS sebanyak 3 orang, PPPK sebanyak 6 Orang, dan Non PNS sebanyak 17 Orang.

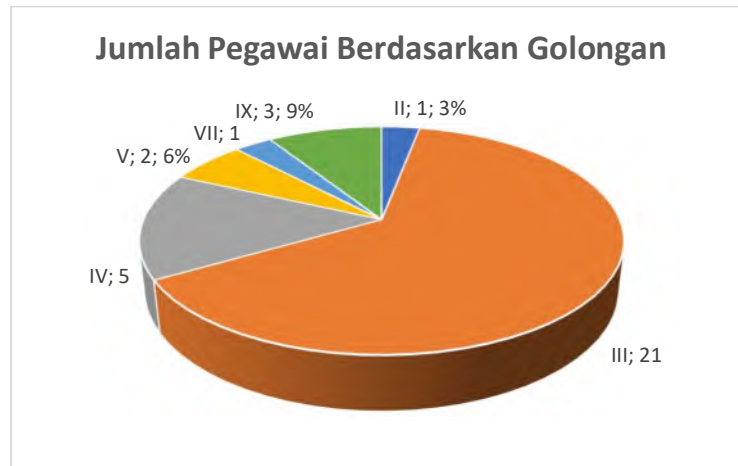


Sumber : Data Kepegawaian Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus, 2025

Gambar 1.2 Persentase Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

b. Jumlah SDM berdasarkan golongan

Jumlah pegawai menurut golongan : golongan IV sebanyak 5 orang, golongan III sebanyak 21 orang , golongan II sebanyak 1 orang , golongan IX sebanyak 3 orang, golongan VII sebanyak 1 dan golongan V sebanyak 2 orang.



Sumber : Data Kepegawaian Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus, 2025

Gambar 1.3 Persentase Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

c. Jumlah SDM berdasarkan kelompok jabatan

Jumlah pegawai menurut jabatan : Struktural sebanyak 2 orang, fungsional sebanyak 26 orang dan Pelaksana sebanyak 5 orang.

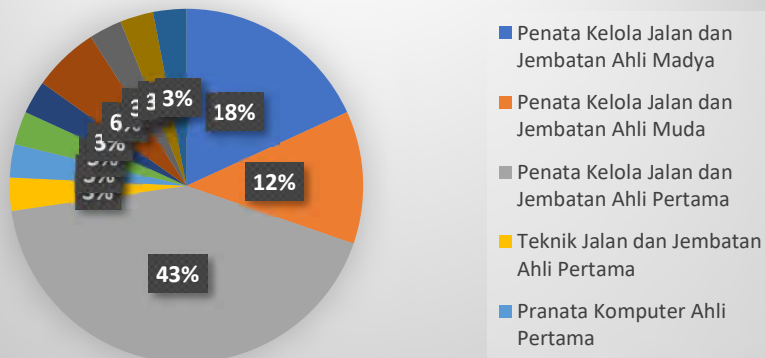


Sumber : Data Kepegawaian Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus, 2025

Gambar 1.4 Persentase Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan gambar di atas jabatan fungsional adalah yang terbanyak dengan proporsi 79%. Adapun uraian untuk Jabatan fungsional adalah sebagai berikut :

Presentase Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional

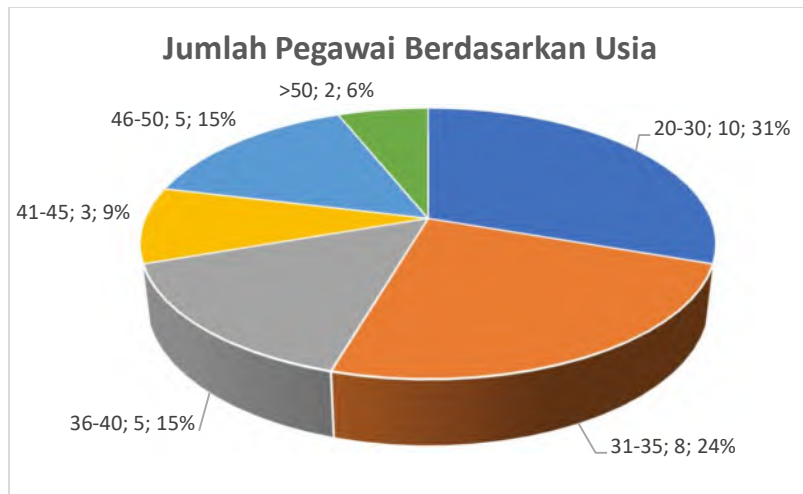


Sumber : Data Kepegawaian Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus, 2024

Gambar 1.5 Persentase Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Fungsional

d. Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia

Jumlah pegawai berdasarkan usia antara 20-30 tahun sebanyak 10 orang, usia antara 31-35 sebanyak 8 orang, usia antara 36-40 sebanyak 5 orang, usia antara 41-45 sebanyak 3 orang, usia antara 46-50 sebanyak 5 orang, dan pegawai yang berusia lebih dari 51 tahun sebanyak 2 orang.



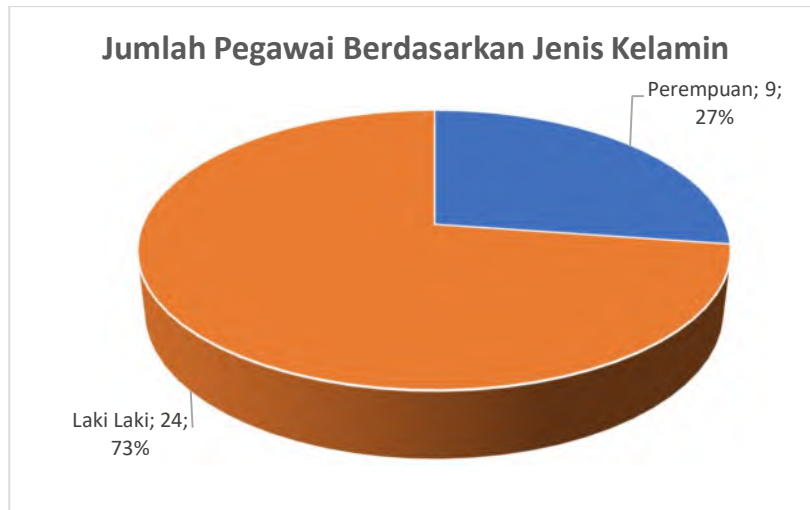
Sumber : Data Kepegawaian Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus, 2025

Gambar 1.6 Persentase Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia

Berdasarkan gambar diatas usia 20-30 dan 31-35 adalah yang terbanyak dengan proporsi terbanyak 31% untuk usia 20-30, sedangkan usia 31-35 dengan proporsi 24%.

e. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin Adalah pegawai dengan jenis kelamin Perempuan sebanyak 9 orang dan pegawai laki-laki sebanyak 24 orang.



Sumber : Data Kepegawaian Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus, 2025

Gambar 1.7 Persentase Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan gambar diatas, Laki-laki merupakan yang terbanyak dengan proporsi di atas 50% untuk PNS dan PPPK.

Pegawai Non PNS sebanyak 17 orang pegawai dimanfaatkan untuk menunjang tugas-tugas di Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus.

f. Pengembangan Kompetensi SDM

Pengembangan Kompetensi SDM yang telah dilakukan oleh Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus pada Tahun 2025 adalah Pelatihan Estimasi Biaya Konstruksi Angkatan I Tahun 2025 oleh Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Wilayah IV Bandung pada tanggal 12 Juni 2025 – 26 Juni 2025 yang meliputi 74 jam pelatihan.



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
SERTIFIKAT PELATIHAN**

Nomor : 00001246/70/3021/294/LAN-KEMENPUPR/2025

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, serta ketentuan pelaksanaannya, menyatakan bahwa:



Nama : *Irfan Ramadhan, S.Tr.*
NIP : *199601162023211007*
Tempat, Tanggal Lahir : *Jakarta, 16 Januari 1996*
Pangkat/Golongan : *Ahli Pertama Gol. IX*
Jabatan : *Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Pertama*
Instansi : *Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus, Direktorat Jenderal Bina Marga*
LULUS
Kualifikasi : *Baik Sekali*

pada kegiatan Pelatihan Estimasi Biaya Konstruksi Angkatan I Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Balai Pengembangan Kompetensi Pekerjaan Umum Wilayah IV Bandung mulai tanggal 12 Juni 2025 sampai dengan 26 Juni 2025 di Bandung yang meliputi 74 jam pelatihan.

Jakarta, 26 Juni 2025



Dokumen Hasil TTE ini Telah Menggunakan Layanan RSD (Badan Siber dan Sandi Negara) / MSFCSP2JWCKT1L/20240626



Dra. R. Adj. Canka Amprawati Suryadi Putri, M.A.
NIP. 196705171994032002

DAFTAR MATA PELAJARAN

No	MATA PELAJARAN	JAM PELAJARAN
1	Core Values BerAKHLAK dan Manajemen Risiko Dasar	2
2	Budaya Anti Korupsi	2
3	Kebijakan Terkait Estimasi Biaya Konstruksi	3
4	Pengantar Estimasi Biaya Konstruksi	6
5	Analisis Biaya Penerapan SMKK	6
6	Studi Kasus	8
7	Gambar, Spesifikasi Teknis, dan BoQ	6
8	Analisis Harga Satuan Dasar	6
9	Analisis Koefisien Komponen HSD	6
10	Analisis Harga Satuan Pekerjaan dan EBK	6
11	Praktik Penggunaan SIPASTI	20
12	Seminar	3
JUMLAH JAM PELAJARAN		74

Gambar 1.8 Sertifikat Pelatihan Estimasi Biaya Konstruksi

1.4 Sarana dan Prasarana Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus

Dalam melakukan tugas dan fungsinya Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus didukung dengan sarana dan prasarana yang cukup memadai. Sarana dan prasarana tersebut tercatat sebagai barang milik negara.

Barang Milik Negara, atau yang biasa disingkat BMN, merupakan bagian tak terpisahkan dari Keuangan Negara sebagaimana tertuang dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan bahwa: “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.”

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada pasal 1 disebutkan bahwa: “Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.” Dimana tidak termasuk dalam pengertian BMN adalah barang-barang yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh :

- a. Pemerintah Daerah (sumber dananya berasal dari APBD termasuk yang sumber dananya berasal dari APBN tetapi sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah);
- b. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri dari :
 - 1) Perusahaan Perseroan, dan
 - 2) Perusahaan Umum.
- c. Bank Pemerintah dan Lembaga Keuangan Milik Pemerintah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, dalam Lampiran I.08 PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap dijelaskan bahwa aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap tersebut yaitu sebagai berikut :

a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

e. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

f. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Sarana dan prasarana Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus yang tercatat dalam SIMAK Barang Milik Negara dapat dilihat pada lampiran VI.

1.4.1 Sarana dan Prasarana Fisik

Sarana dan Prasaran Fisik yang ada di Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus dan tercatat dalam SIMAK BMN Update Tanggal 31 Desember 2025 :

Tabel 1.2 Sarana dan Prasana Fisik di Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus

No	Kode Barang	Uraian Barang	Kondisi
1	3010304002	Portable Generating Set	Baik
2	3010304003	Stationary Generating Set	Baik
3	3050104001	Lemari Besi	Baik
4	3050104002	Lemari Kayu	Baik
5	3050104003	Rak Besi	Baik
6	3050104004	Rak Kayu	Baik
7	3050104007	Brandkas	Baik
8	3050104020	Lemari Display	Baik
9	3050104024	Laci Box	Baik
10	3050105010	White Board	Baik
11	3050105013	Electric White Board	Baik
12	3050105015	Alat Penghancur Kertas	Baik
13	3050201001	Meja Kerja Besi	Baik
14	3050201002	Meja Kerja Kayu	Baik
15	3050201003	Kursi Besi	Baik
16	3050201004	Kursi Kayu	Baik

17	3050201008	Meja Rapat	Baik
18	3050201014	Meja Resepsionis	Baik
19	3050201019	Meja Makan Kayu	Baik
20	3050201020	Kursi Plastik	Baik
21	3050205008	Kitchen Set	Baik

Sumber : BMN Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus

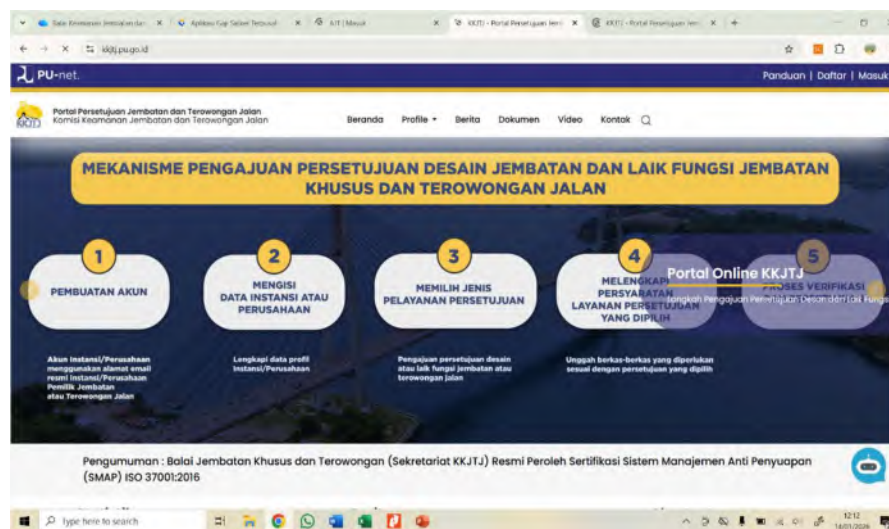
1.4.2 Teknologi Informasi

Untuk menunjang kinerja di lingkungan Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus, pegawai memanfaatkan sistem teknologi informasi yang telah ada secara optimal seperti e-Monitoring (Pelaksanaan dan monitoring seluruh kegiatan tahun anggaran berjalan), SIPP (Monitoring capaian kinerja), E-SAKIP (Pelaporan pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah), Website Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ) (Dapat diakses di kkjtj.pu.go.id, website ini digunakan untuk memproses perizinan penerbitan sertifikat desain, sertifikat laik fungsi dan Persetujuan kegiatan yang mempengaruhi keamanan struktur jembatan bentang panjang dan terowongan khusus) dan Website Arsip Jembatan bentang panjang dan terowongan khusus (Dapat diakses di ajt.binamarga.pu.go.id, website ini digunakan untuk menyimpan arsip dan data tentang perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan jembatan bentang panjang dan terowongan khusus).

Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus mempunyai sistem teknologi informasi untuk mendukung pelayanan terhadap publik, yaitu :

1. Website Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ)

Dapat diakses di kkjtj.pu.go.id, website ini digunakan untuk memproses perizinan penerbitan sertifikat desain, sertifikat laik fungsi dan Persetujuan kegiatan yang mempengaruhi keamanan struktur jembatan bentang panjang dan terowongan khusus.



2. Website Arsip Jembatan bentang panjang dan terowongan khusus
Dapat diakses di ajt.binamarga.co.id, website ini digunakan untuk menyimpan arsip dan data tentang perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan jembatan bentang panjang dan terowongan khusus.



1.5 Isu Strategis Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) membentuk Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ) untuk memastikan keamanan proyek infrastruktur tersebut saat masa penyiapan pelaksanaan konstruksi, operasional dan pemeliharaan. Berdirinya KKJTJ dimulai sejak runtuhnya Jembatan Kutai Kartanegara pada tanggal 26 November 2011. Dari kejadian tersebut, Kementerian PU berinisiatif untuk membuat Permen PUPR no. 41/PRT/M/2015 tentang Penyelenggaraan Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan dan kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan melalui Kepmen PUPR no. 485/KPTS/M/2015 dan direvisi melalui Kepmen PUPR no. 341/KPTS/M/2017. Lalu pada tahun 2022 dilakukan pembaharuan terhadap Permen PUPR no. 41/PRT/M/2015 menjadi Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan Jembatan Dan Terowongan Jalan. Pada tahun 2025 melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 17.1/SE/Db/2025 diterbitkanlah Pedoman Penyelenggaraan Keamanan Jembatan Khusus Nomor 13/P/BM/2025, Sedangkan anggota Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan diperbaharui melalui Keputusan Menteri PUPR Nomor 1003/KPTS/M/2019.

Komisi ini memberikan rekomendasi terkait keamanan bangunan, khususnya infrastruktur jembatan dan terowongan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Rekomendasi teknis tersebut dapat diberikan baik pada tahap desain pelaksanaan konstruksi, operasional ataupun proses pemeliharaan. Rekomendasi tersebut diharapkan juga dapat memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi di lapangan, sehingga Menteri dapat mengambil keputusan guna menjaga keamanan konstruksi. Rekomendasi yang diusulkan oleh



KKJTJ tersebut berupa sertifikat persetujuan desain, sertifikat persetujuan operasional dan sertifikat persetujuan pemeliharaan. Sebelum sertifikat diterbitkan, surat ijin persetujuan desain pelaksanaan konstruksi, surat ijin persetujuan operasional dan surat ijin persetujuan pemeliharaan harus diterbitkan terlebih dahulu. Sertifikat persetujuan adakalanya belum diterbitkan apabila masih ada catatan yang harus diperbaiki terlebih dahulu oleh Pemilik Jembatan.

Jembatan dan terowongan jalan yang harus mendapatkan rekomendasi diatur dalam Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan Jembatan Dan Terowongan Jalan adalah sebagai berikut :

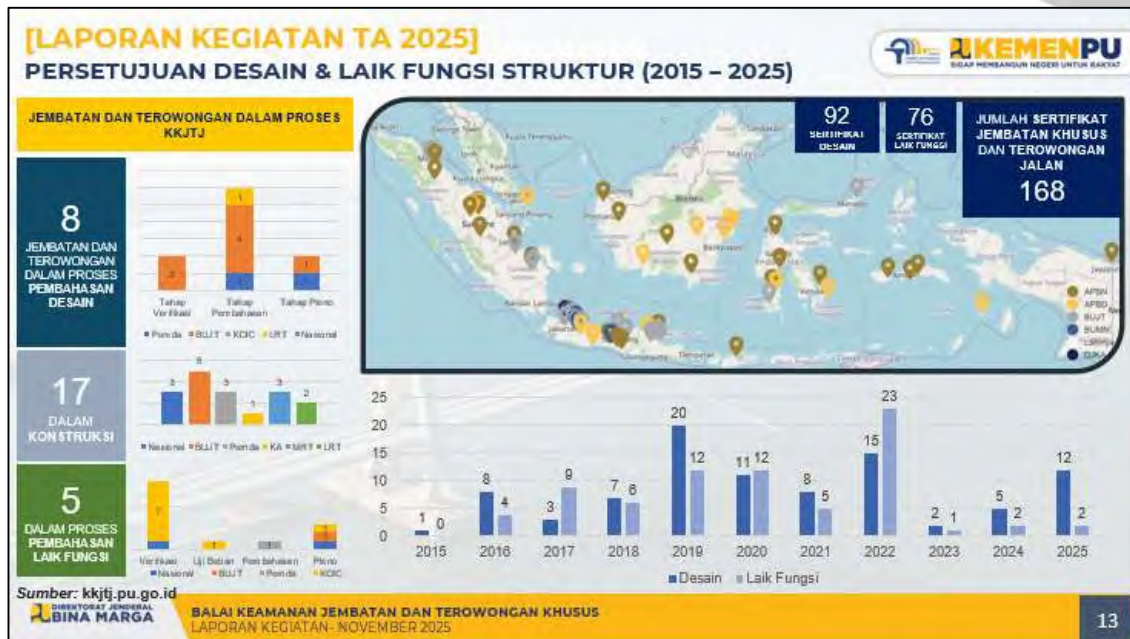
- a. Jembatan dengan bentang paling sedikit 100 m;
- b. Jembatan pelengkung dengan bentang paling sedikit 60 m, jembatan gantung dan jembatan beruji kabel;
- c. Jembatan dengan total panjang paling sedikit 3.000 m;
- d. Jembatan dengan ketinggian pilar di atas 40 m;
- e. Terowongan jalan dengan panjang bagian tertutup paling sedikit 200m;
- f. Terowongan jalan yang menggunakan cara pengeboran/*jacking* dalam metode pelaksanaan;
- g. Jembatan dan terowongan jalan yang memiliki kompleksitas struktur tinggi atau memiliki nilai strategis tinggi atau didesain menggunakan teknologi baru.

Untuk mendukung kegiatan KKJTJ kemudian dibentuklah Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus (BKJTK) melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian Pekerjaan Umum yang nantinya mempunyai tugas pokok melaksanakan evaluasi teknis dan penyiapan saran teknis jembatan dan terowongan khusus serta pemantauan perilaku jembatan dan terowongan khusus.

Jembatan dan terowongan khusus di Indonesia yang sudah terdata oleh Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus sekitar 235 jembatan dan terowongan khusus, sebanyak 8 jembatan dan terowongan dalam tahap pembahasan desain, 17 dalam tahap konstruksi, 5 jembatan dan terowongan dalam proses laik fungsi, dan 205 dalam tahap layan. Dari jumlah jembatan dan terowongan di atas KKJTJ telah ikut dalam pembuatan rekomendasi izin persetujuan desain terdapat 92 jembatan dan terowongan serta izin persetujuan laik fungsi untuk 76 jembatan dan terowongan baik di tingkat daerah maupun tingkat nasional. Pada tahun anggaran 2025 Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus telah membantu dalam pembuatan rekomendasi izin persetujuan desain untuk 12 jembatan bentang panjang dan terowongan khusus serta izin persetujuan laik fungsi untuk 2 jembatan bentang panjang dan terowongan khusus baik di tingkat daerah maupun tingkat nasional.

Jumlah jembatan bentang panjang dan terowongan khusus yang sudah mendapatkan izin persetujuan dan sertifikat tahun 2015-2025 dapat dilihat pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3 Statistik Sertifikasi Persetujuan Desain dan Laik Fungsi Struktur di Lingkungan Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus



Permasalahan utama dan tantangan yang dihadapi oleh Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus adalah percepatan sertifikasi Persetujuan desain dan laik fungsi jembatan bentang panjang dan terowongan khusus agar mendukung rencana strategis dari kementerian PU, pembaharuan NSPK Jembatan bentang panjang dan terowongan khusus melalui konsesus KKJTJ untuk memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun memiliki kualitas yang andal dan Efisiensi Anggaran.

1.6 Sistematika Laporan

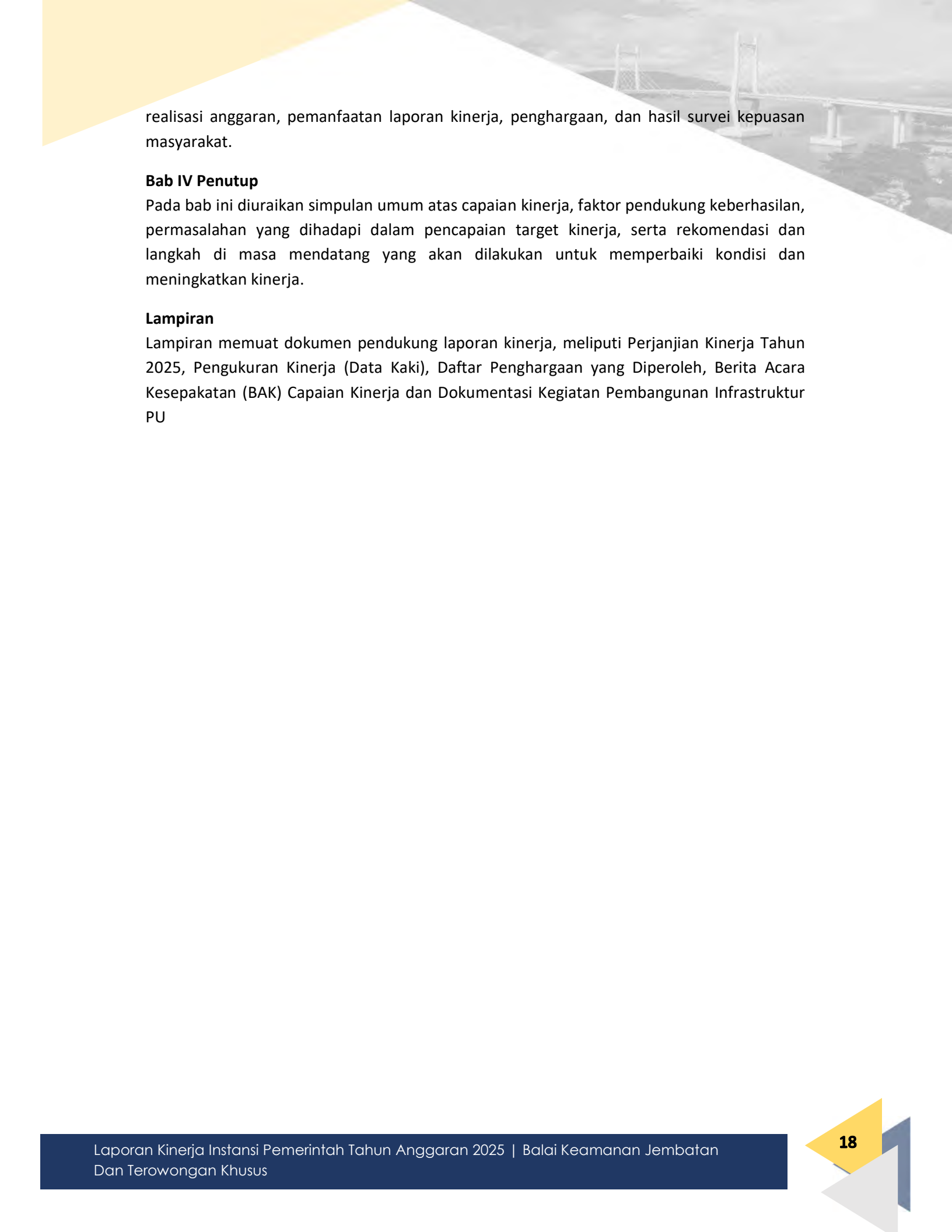
Setelah pembahasan Bab I “Pendahuluan” yang meliputi penjelasan umum organisasi, aspek strategis, dan isu/permasalahan utama yang sedang dihadapi Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus, sistematika selanjutnya dari penyajian laporan kinerja Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus adalah sebagai berikut.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini dijelaskan mengenai visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, program/kegiatan dalam renstra dan ikhtisar perjanjian kinerja (PK) yang disajikan melalui uraian Renstra Kementerian PU 2025-2029, PK Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus, PK Kementerian PU 2025, dan target 2025 menurut renstra.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai evaluasi dan analisis kinerja serta realisasi anggaran Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus, Kementerian PU 2025, yang disajikan melalui penjelasan tentang upaya peningkatan akuntabilitas, capaian kinerja, perbandingan kinerja,



realisasi anggaran, pemanfaatan laporan kinerja, penghargaan, dan hasil survei kepuasan masyarakat.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja, faktor pendukung keberhasilan, permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, serta rekomendasi dan langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk memperbaiki kondisi dan meningkatkan kinerja.

Lampiran

Lampiran memuat dokumen pendukung laporan kinerja, meliputi Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Pengukuran Kinerja (Data Kaki), Daftar Penghargaan yang Diperoleh, Berita Acara Kesepakatan (BAK) Capaian Kinerja dan Dokumentasi Kegiatan Pembangunan Infrastruktur PU

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Dokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dokumen Penetapan Kinerja disusun dengan memperhatikan antara lain dokumen perencanaan jangka menengah, dokumen perencanaan kinerja tahunan, dan dokumen penganggaran dan/atau pelaksanaan anggaran.

2.1 Uraian Singkat *Review Rencana Strategis (Renstra) DJBM 2025 - 2029*

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina Marga 2025-2029 telah disusun dengan mengacu pada Permen PPN/Bappenas No 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Renstra K/L Tahun 2025-2029, serta dengan mempertimbangkan berbagai mandat dari peraturan perundang-undangan terkait dan dokumen perencanaan terkait sesuai tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bina Marga, khususnya RPJPN 2025-2045 (UU No 59 Tahun 2024), RPJMN 2025-2029 (Perpres No 12 Tahun 2025), dan Renstra Kementerian PU 2025-2029 (Permen PU No 4 Tahun 2025).

Berbagai target output utama dan target kinerja yang dimuat di dalam Renstra Direktorat Jenderal Bina Marga 2025-2029 ini masih bersifat indikatif, sehingga perlu didetailkan lebih lanjut melalui tahapan planning-programming-budgeting-executing-evaluation (PPBEE) sesuai kaidah yang berlaku.

Renstra Direktorat Jenderal Bina Marga 2025-2029 merupakan acuan bagi penyusunan dokumen SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, khususnya Perjanjian Kinerja (PK), pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja melalui LKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) pada setiap tahun anggaran.

Seluruh Unit Kerja Eselon II Pusat dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga diharapkan menyusun Rencana Strategis masing-masing untuk periode 2025-2029 dengan mengacu pada dokumen ini dan berpegang pada pedoman penyusunan Rencana Strategis yang berlaku.

Dalam rangka melaksanakan Renstra Direktorat Jenderal Bina Marga 2025-2029 ini, maka setiap Unit Kerja diharapkan menyusun Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK), serta Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dengan mengacu kepada prioritas dan kebijakan yang termuat dalam Renstra ini dengan mempertimbangkan alokasi APBN dan pemenuhan readiness criteria pada masing-masing kegiatan.

Sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja, maka kinerja setiap Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Ditjen Bina Marga akan dinilai berdasarkan pencapaian target kinerja yang tertuang dalam Renstra Direktorat Jenderal Bina Marga 2025-2029. Selanjutnya, setiap individu Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga dapat menggunakan target kinerja organisasi sebagai acuan dalam menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sesuai penempatannya masing-masing.

2.1.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Bina Marga

Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Bina Marga yang dalam menjalankan tugasnya harus dilandaskan dan mengacu kepada visi misi RPJMN 2025 - 2029. Visi RPJMN 2025 - 2029 adalah “Jalan yang andal dan prima dalam mendukung terwujudnya Indonesia Maju sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045”.

Sedangkan misi RPJMN 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia
2. Memantapkan sistem hankam dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur
4. Memperkuat pembangunan SDM, sainteks, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan pemberantasan korupsi dan narkoba
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat adil makmur

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina Marga Tahun 2025–2029 disusun sebagai penjabaran arah pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2025–2029

yang mengusung visi **“Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045.”** Dalam kerangka tersebut, pembangunan infrastruktur jalan memegang peranan strategis sebagai pengungkit konektivitas wilayah, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan pembangunan nasional.

Sejalan dengan visi pembangunan nasional dan visi Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Bina Marga menetapkan visi pembangunan sektor jalan nasional, yaitu **“Terwujudnya jalan yang andal dan prima dalam mendukung terwujudnya Indonesia Maju sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.”** Visi ini menegaskan komitmen penyelenggaraan jalan nasional yang memenuhi standar pelayanan minimal, memberikan pelayanan optimal secara berkelanjutan, serta mendukung daya saing dan integrasi wilayah.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Direktorat Jenderal Bina Marga menetapkan dua misi utama, yaitu **mewujudkan jaringan jalan nasional yang berkelanjutan** dan **mewujudkan transformasi tata kelola dalam penyelenggaraan jalan**. Kedua misi ini selaras dengan Prioritas Nasional RPJMN 2025–2029 serta Misi Kementerian Pekerjaan Umum, khususnya dalam pembangunan konektivitas dan penguatan tata kelola pemerintahan.

Sebagai penjabaran dari misi, Direktorat Jenderal Bina Marga menetapkan empat tujuan strategis, yaitu:

1. Meningkatkan efektivitas dukungan konektivitas jaringan jalan,
2. Meningkatkan kinerja pelayanan jalan sesuai standar dan perkembangan kebutuhan,
3. Mewujudkan sistem penyelenggaraan jalan yang berkualitas,
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Direktorat Jenderal Bina Marga menetapkan sasaran strategis yang berfokus pada

1. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Infrastruktur Konektivitas Jalan,
2. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Nasional,
3. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Tol
4. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Daerah
5. Meningkatnya Kualitas Proses Bisnis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
6. Meningkatnya Dukungan Manajemen Kementerian dalam Tugas Teknis Lainnya DJBM.

Seluruh sasaran strategis tersebut dilaksanakan melalui program, kegiatan, dan indikator kinerja yang terukur serta didukung oleh unit-unit teknis guna memastikan tercapainya penyelenggaraan jalan nasional yang andal, berkelanjutan, dan akuntabel.

2.1.2 Kebijakan, Program dan Kegiatan Direktorat Jenderal Bina Marga

Arah kebijakan Direktorat Jenderal Bina Marga Tahun 2025–2029 difokuskan pada **peningkatan kinerja pelayanan infrastruktur jalan, penguatan konektivitas nasional dan daerah, serta transformasi tata kelola penyelenggaraan jalan yang modern, efisien, dan berkelanjutan**. Kebijakan tersebut dilaksanakan melalui peningkatan kualitas jaringan jalan nasional, jalan tol, dukungan jalan daerah, serta penguatan proses bisnis dan manajemen organisasi.

Selain itu, Ditjen Bina Marga mengutamakan kebijakan lintas sektor yang meliputi:

- **GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion)**
- **Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim**
- **Transformasi tata kelola penyelenggaraan jalan**
- **Transformasi teknologi sektor jalan**

Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, Direktorat Jenderal Bina Marga menetapkan **lima Sasaran Program (SP)** sebagai berikut:

- SP.1 – Meningkatkan Kinerja Pelayanan Infrastruktur Konektivitas Jalan
- Program ini diarahkan untuk meningkatkan aksesibilitas, kemantapan, keselamatan, dan keterhubungan jaringan jalan nasional.
- SP.2 – Meningkatkan Kinerja Pelayanan Jalan Tol
- Program ini bertujuan meningkatkan keterhubungan jalan tol pada lintas utama dan kawasan strategis serta memperbaiki tata kelola dan pelayanan jalan tol.
- SP.3 – Meningkatkan Kinerja Pelayanan Jalan Daerah
- Program ini mendukung peningkatan konektivitas jalan daerah melalui pembinaan teknis dan dukungan penanganan jalan daerah yang terintegrasi dengan jaringan jalan nasional.
- SP.4 – Meningkatkan Kualitas Proses Bisnis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
- Program ini difokuskan pada peningkatan kualitas perencanaan, pembangunan, preservasi, dan penanganan darurat jalan dan jembatan.
- SP.5 – Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya
- Program ini mendukung efektivitas tata kelola internal melalui penguatan perencanaan, keuangan, SDM, BMN, PNBP, dan advokasi hukum.

Arah kebijakan operasional Ditjen Bina Marga dijabarkan ke dalam **21 Arah Kebijakan (AK)** utama, antara lain:

- Peningkatan aksesibilitas dan kemantapan jalan nasional
- Peningkatan kondisi dan keselamatan jembatan

- Penurunan risiko lereng dan penanganan lokasi rawan kecelakaan
- Pengembangan jaringan jalan tol dan jalan perkotaan
- Dukungan penanganan dan pembinaan jalan daerah
- Penguatan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan preservasi jalan
- Peningkatan kinerja manajemen, SDM, BMN, PNB, serta layanan hukum

Kegiatan Ditjen Bina Marga 2025–2029 dikelompokkan ke dalam beberapa klaster utama:

a. Pembangunan Jalan dan Jembatan

- Pembangunan jalan baru ± 1.709 km
- Pembangunan jembatan ± 18.287 meter
- Pembangunan jalan lingkar, flyover/underpass, dan pelebaran jalan perkotaan

b. Preservasi Jalan, Jembatan, dan Lereng

- Preservasi jalan nasional dengan target kemantapan $\pm 98\%$
- Preservasi jembatan dengan target kemantapan $\pm 87\%$
- Penanganan lereng berisiko tinggi

c. Peningkatan Keselamatan Jalan

- Penanganan ruas rawan kecelakaan dan peningkatan star rating keselamatan jalan ± 3.912 km

d. Pembangunan Jalan Tol

- Pembangunan jalan tol ± 1.572 km
- Pengembangan dan keterhubungan jaringan jalan tol lintas utama dan kawasan strategis

e. Dukungan Jalan Daerah

- Dukungan penanganan jalan daerah tematik RPJMN ± 5.000 km
- Peningkatan akses simpul konektivitas jalan daerah ± 493 km

f. Dukungan Manajemen dan Kelembagaan

- Pengelolaan perencanaan, keuangan, dan umum
- Pengelolaan SDM penyelenggaraan jalan
- Pengelolaan BMN dan PNB
- Fasilitasi produk dan advokasi hukum

2.1.3 Visi, Misi, dan Tujuan Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus

Visi Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus adalah sebagai berikut:

BALAI KEAMANAN JEMBATAN DAN TEROWONGAN KHUSUS YANG ANDAL, PROFESIONAL, INOVATIF, DAN BERINTEGRITAS DALAM MENYELENGGARAKAN PENGATURAN KEAMANAN JEMBATAN BENTANG PANJANG DAN TEROWONGAN KHUSUS JALAN UNTUK MENDUKUNG TERWUJUDNYA TUJUAN DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA: “MENINGKATKAN EFEKTIVITAS DUKUNGAN KONEKTIVITAS JARINGAN JALAN, KINERJA PELAYANAN JALAN

SESUAI STANDAR DAN PERKEMBANGAN KEBUTUHAN, SISTEM PENYELENGGARAAN JALAN YANG BERKUALITAS SERTA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)”

Misi Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus adalah sebagai berikut:

- a) Mewujudkan Tertib Penyelenggaraan Jembatan bentang panjang dan terowongan khusus Jalan yang meliputi tahap perencanaan teknis, pelaksanaan/konstruksi, pengelolaan dan pemeliharaan untuk memenuhi daya layan dalam pengelolaannya;
- b) Meningkatkan Keandalan Jembatan bentang panjang dan terowongan khusus Jalan, sehingga dapat mencegah atau sekurang-kurangnya mengurangi resiko kegagalan bangunan pekerjaakonstruksi jembatan dan terowongan jalan.

Tujuan Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus adalah menjaga fungsi jembatan bentang panjang dan terowongan khusus jalan serta memberikan jaminan Keamanan jembatan dan terowongan jalan dan terlindunginya masyarakat beserta harta benda di sekitar jembatan dan terowongan jalan oleh potensi resiko kegagalan bangunan/pekerjaan konstruksi jembatan dan terowongan jalan. Tujuan tersebut direalisasikan dalam bentuk 5 Pilar Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Sertifikasi Desain;
2. Pemantauan jembatan pada masa konstruksi yang dilakukan per 6 bulan konstruksi;
3. Pelaksanaan Sertifikasi Laik Fungsi Struktur;
4. Pengumpulan Laporan Operasi dan Pemeliharaan pertahun serta Pemantauan tahunan;
5. Inspeksi oleh Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan.

2.1.4 Arah Kebijakan Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus

Sesuai dengan Rencana Strategi Direktorat Jenderal Bina Marga tahun 2025 - 2029 Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus mendukung capaian Rencana Strategi Direktorat Jenderal Bina Marga tahun 2025 - 2029 melalui Sasaran Prioritas 4 (SP.4) yaitu “Meningkatnya Kualitas Proses Bisnis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan” yang diukur melalui **IKP1** yaitu *“Tingkat kinerja proses bisnis penyelenggaraan jalan dan jembatan.”* Target IKP1 adalah mempertahankan kinerja pada **tingkat 100%** setiap tahun dari 2025 hingga 2029. Untuk mencapai target ini Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus melalui layanan data dan informasi (menunjang indikator kegiatan jumlah dokumen pengembangan teknologi bidang jalan dan jembatan) serta pemantauan dan evaluasi jembatan khusus (menunjang indikator kegiatan jumlah dokumen layanan pengujian laboratorium dan advis teknik bidang jalan dan jembatan).

Implementasi renstra Direktorat Jenderal Bina Marga untuk Balai Jembatan diturunkan dalam dokumen rencana kerja tahunan. Untuk mendukung rencana kerja tahunan tersebut disiapkan juga dokumen anggaran Balai Jembatan berupa Rencana Kerja dan Anggaran

Kementerian /Lembaga (RKAKL) serta Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Evaluasi pelaksanaan renstra dijabarkan dalam bentuk dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) mengacu pada laporan e-monitoring yang disampaikan oleh satuan kerja di lingkungan Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus.

2.1.5 Program dan Kegiatan Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus

a) Layanan Data dan Informasi

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) membentuk Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ) untuk memastikan keamanan proyek infrastruktur tersebut saat masa penyiapan pelaksanaan konstruksi, operasional dan pemeliharaan. Berdirinya KKJTJ dimulai sejak runtuhnya Jembatan Kutai Kartanegara di Tenggarong, Kalimantan Timur pada tanggal 26 November 2011. Dari kejadian tersebut, Kementerian PUPR berinisiatif untuk membuat Permen PUPR Nomor 41 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan dan kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan melalui Kepmen PUPR Nomor 485 Tahun 2015, direvisi melalui Kepmen PUPR Nomor 341 Tahun 2017 dan direvisi kembali melalui Kepmen PUPR Nomor 1003 Tahun 2019. Komisi ini memberikan rekomendasi terkait keamanan bangunan, khususnya infrastruktur jembatan dan terowongan kepada Menteri Pekerjaan Umum (PU).

Rekomendasi teknis tersebut dapat diberikan baik pada tahap desain pelaksanaan konstruksi, operasional ataupun proses pemeliharaan. Rekomendasi tersebut diharapkan juga dapat memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi di lapangan, sehingga Menteri dapat mengambil keputusan guna menjaga keamanan konstruksi. Rekomendasi yang diusulkan oleh KKJTJ tersebut berupa sertifikat persetujuan desain dan sertifikat persetujuan laik fungsi. Sertifikat persetujuan adakalanya belum diterbitkan apabila masih ada catatan yang harus diperbaiki terlebih dahulu oleh Pemilik Jembatan.

Jembatan Khusus dan terowongan jalan yang harus mendapatkan rekomendasi diatur dalam Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2022 dan Kepmen PUPR Nomor 1003 Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Jembatan Bentang Utama ≥ 100 m;
2. Jembatan Pelengkung ≥ 60 m;
3. Jembatan Gantung untuk Kendaraan;
4. Jembatan Beruji Kabel;
5. Jembatan Total Panjang ≥ 3.000 m;
6. Ketinggian Pilar ≥ 40 m;
7. Terowongan jalan dengan panjang bagian tertutup paling sedikit 200 m;
8. Terowongan jalan yang menggunakan cara pengeboran/jacking dalam metode pelaksanaan;
9. Jembatan dan terowongan jalan dengan Kompleksitas Struktur Tinggi atau Memiliki Nilai Strategis Tinggi/Menggunakan Teknologi Baru



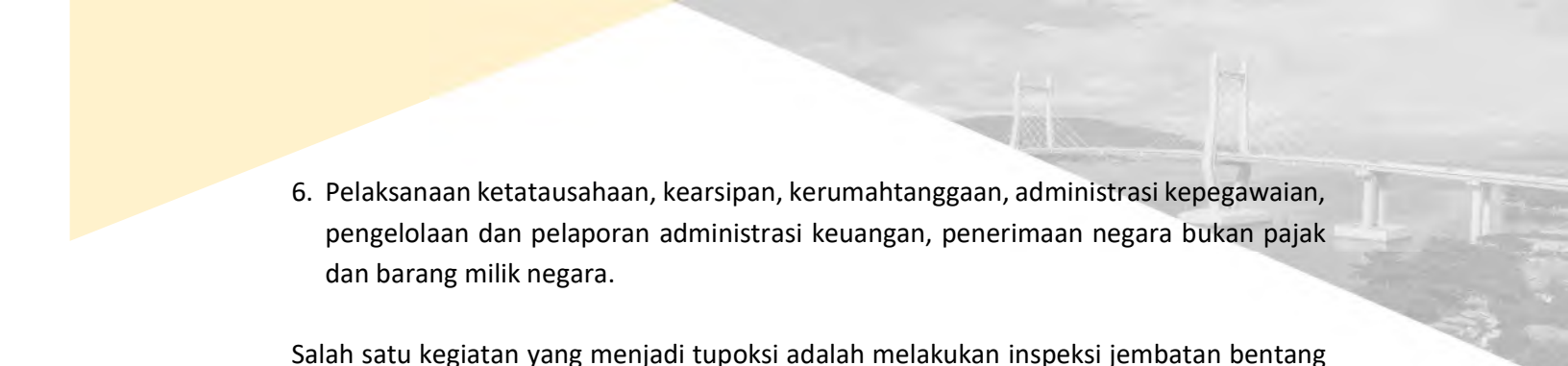
Untuk mendukung kegiatan KKJTJ kemudian dibentuklah Balai Jembatan melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang kemudian berubah nama menjadi Balai Struktur Jembatan (BSJ) melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2020 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Setelah itu, Balai Struktur Jembatan berubah nama menjadi Balai Jembatan melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2020 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pada Tahun 2025 nama Balai Jembatan Khusus dan Terowongan berubah menjadi Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus (BKJTK) melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian Pekerjaan Umum yang mempunyai tugas pokok melakukan evaluasi teknis dan pemantauan perilaku jembatan bentang panjang dan terowongan khusus, memberikan dukungan administrasi dan teknis kepada Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan dan memberikan layanan advis teknis melalui koordinasi dengan Direktorat Pembangunan Jembatan.

b) Pemantauan dan Evaluasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian Pekerjaan Umum, Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus mempunyai tugas melaksanakan evaluasi teknis dan penyiapan saran teknis jembatan bentang panjang dan terowongan khusus jalan serta pemantauan perilaku jembatan bentang panjang dan terowongan khusus jalan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Jembatan menyelenggarakan fungsi, yaitu :

1. Pelaksanaan inspeksi jembatan bentang panjang dan terowongan khusus;
2. Pelaksanaan evaluasi teknis dan analisis kondisi jembatan bentang panjang dan terowongan khusus;
3. Pelaksanaan inventarisasi, registrasi, dan klarifikasi potensi bahaya terhadap jembatan bentang panjang dan terowongan khusus;
4. Pemberian dukungan administrasi dan dukungan teknis kepada Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan;
5. Pemberian layanan advis teknis untuk perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi jembatan; dan

- 
6. Pelaksanaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, administrasi kepegawaian, pengelolaan dan pelaporan administrasi keuangan, penerimaan negara bukan pajak dan barang milik negara.

Salah satu kegiatan yang menjadi tupoksi adalah melakukan inspeksi jembatan bentang panjang dan terowongan khusus jalan dan evaluasi evaluasi teknis dan analisis kondisi jembatan bentang panjang dan terowongan khusus serta pelaksanaan inventarisasi, registrasi, dan klarifikasi potensi bahaya terhadap jembatan bentang panjang dan terowongan khusus.

Untuk mendapatkan produk jembatan bentang panjang dan terowongan khusus jalan yang baik diperlukan program yang tepat dan dalam pelaksanaannya perlu mendapatkan pengawasan yang cukup memadai. Pemantauan dan Evaluasi dilakukan dari beberapa segi yang dilakukan para stakeholder yang berkaitan dalam bidang penyelenggaraan jembatan untuk mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin.

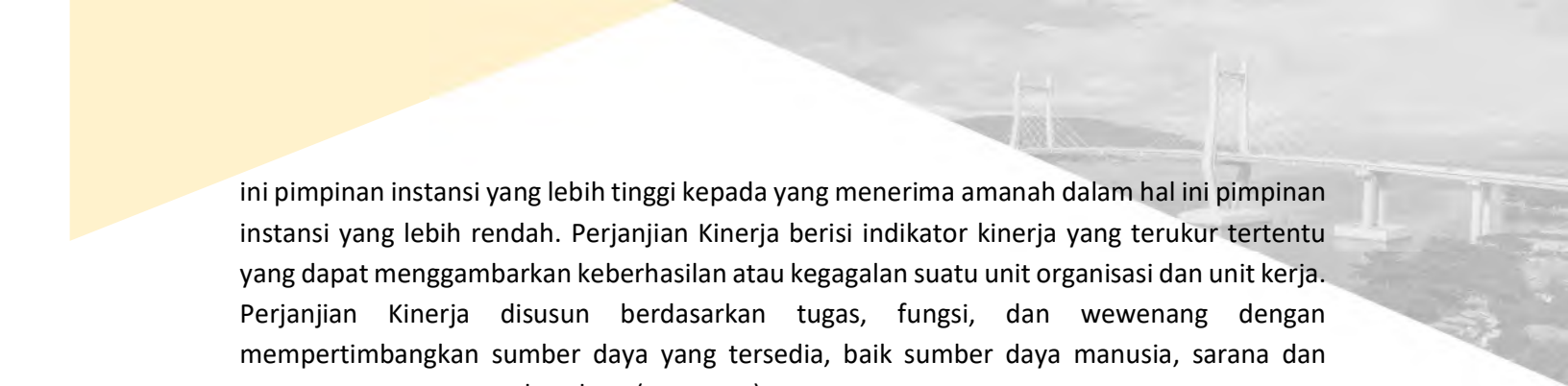
Lingkup pekerjaannya adalah melaksanakan pemantauan dan evaluasi jembatan bentang panjang dan terowongan khusus di beberapa jembatan di ruas jalan nasional. Dalam melaksanakan pekerjaan pemantauan dan evaluasi jembatan bentang panjang dan terowongan khusus melibatkan staf Balai Jembatan.

Lingkup pekerjaan monitoring dan evaluasi jembatan bentang panjang dan terowongan khusus jalan ini meliputi :

1. Memonitor data primer dan sekunder mengenai jembatan dengan berkoordinasi dengan Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan dan Satker/PPK terkait. Data yang dibutuhkan antara lain data teknis, data kronologis pekerjaan dan data lain yang mendukung kegiatan monitoring dan evaluasi
2. Melakukan kunjungan lapangan untuk mendapatkan data yang lebih akurat/aktual. Pengamatan dilakukan terhadap permasalahan serta sebab-sebab yang menjadi faktor permasalahan. Apabila diperlukan, dapat juga dilakukan pembahasan di lapangan
3. Mengevaluasi kemungkinan penyebab permasalahan yang terjadi dengan menelaah permasalahan dan memeriksa kelengkapan dokumen yang ada di lapangan untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Apabila dinilai cukup membahayakan struktur dan pengguna lalu lintas, rekomendasi penanganan darurat secepatnya dapat diberikan langsung di lapangan
4. Melaporkan hasil pekerjaan.

2.2 Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen berupa pernyataan komitmen atau kesepakatan untuk mencapai target kinerja tertentu antara yang memberi amanah dalam hal



ini pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada yang menerima amanah dalam hal ini pimpinan instansi yang lebih rendah. Perjanjian Kinerja berisi indikator kinerja yang terukur tertentu yang dapat menggambarkan keberhasilan atau kegagalan suatu unit organisasi dan unit kerja. Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maupun sumber dana (anggaran).

Perjanjian Kinerja disusun oleh masing-masing unit organisasi dan unit kerja dengan tujuan, antara lain:

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan *monitoring*, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah;
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dokumen Penetapan Kinerja dimanfaatkan oleh setiap pimpinan instansi pemerintah untuk:

- a. Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi;
- b. Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Menilai keberhasilan organisasi.

Perjanjian Kinerja Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus merupakan komitmen untuk tercapainya kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam *Review Renstra* Direktorat Jenderal Bina Marga Tahun 2025 - 2029. Didalam penetapan kinerja Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus tahun 2025 telah ditetapkan target capaian kinerja sasaran kegiatan tahun 2025 yang menjadi panduan arah untuk mencapai visi dan misi dari Direktorat Jenderal Bina Marga. Agar target capaian kinerja yang ditetapkan dalam penetapan kinerja dapat terukur dengan baik, maka disusun indikator kinerja output yang mengacu kepada PK tahun 2025 dengan target dan alokasi anggaran kegiatan berdasarkan RKA-KL Awal tahun 2025.

Komponen perjanjian kinerja tahun 2025 dapat dijelaskan meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. **Sasaran Program**, sesuai dengan yang dimuat dalam *Review Renstra* Direktorat Jenderal Bina Marga, pada penetapan kinerja Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus tahun 2025 hanya terdapat 1 (satu) sasaran, yaitu Meningkatnya kualitas bisnis proses penyelenggaraan jalan dan jembatan. Sasaran tersebut juga merupakan sasaran yang diharapkan dicapai oleh Direktorat Jenderal Bina Marga selama periode 2025 - 2029.

- b. **Indikator Kinerja Kegiatan**, sesuai dengan *Review* Renstra Direktorat Jenderal Bina Marga terdapat 5 indikator kinerja kegiatan yang mendukung kinerja Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus, yaitu: jumlah layanan keteknikan bidang jalan dan jembatan, jumlah layanan perkantoran, jumlah layanan organisasi dan tata Kelola internal, jumlah layanan umum dan jumlah layanan sarana internal.
- c. **Indikator Kinerja Output (Paket Kegiatan)**, sesuai dengan yang dimuat dalam RKA-KL Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus tahun 2025 bahwa terdapat 16 indikator kinerja output yang mendukung sasaran strategis Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus. Adapun 16 indikator kinerja output yang tercantum dalam Dokumen Penetapan Kinerja Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus Tahun 2025, dapat dilihat pada Tabel 2.2 - Tabel 2.3 berikut ini.

Tabel 2.1 Perbandingan PK Awal dan PK Revisi Tahun 2025

NO	OUTPUT		SAT	Target		Keterangan
				PK AWAL	PK REVISI	
Sasaran Program : Meningkatnya kualitas bisnis proses penyelenggaraan jalan dan jembatan						
IKP : Tingkat Efektivitas Kinerja Proses Bisnis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan						
Indikator Kinerja Kegiatan						
84	ABF 001	Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan	Rekomendasi	1	1	
IKP : Tingkat Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga						
Indikator Kinerja Kegiatan						
88	EBA 960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	1	1	
89	EBA 962	Layanan Umum	Layanan	1	1	
90	EBA 994	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	
91	EBB 951	Layanan Sarana Internal	Unit	3	3	

Tabel 2.2 Target Indikator Kinerja Output Jumlah Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan

No.	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Jumlah Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan	Pemantauan dan Evaluasi Jembatan dan Terowongan Jalan	Dokumen	1
		Advis dan Layanan Teknis Jembatan dan Terowongan Jalan	Dokumen	1
		Dukungan Teknis Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan	Dokumen	1

Sumber : Penetapan Kinerja (PK) 2025 dan Renstra Bina Marga 2025-2029

Tabel 2.3 Target Indikator Kinerja Output Jumlah Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal

No.	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	Jumlah Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Administrasi Kegiatan Satker Balai Jembatan	Dokumen	1
		Pengelolaan Kepegawaian	Dokumen	1
		Penyelenggaraan Zona Integritas dan Penyusunan Manajemen Risiko	Dokumen	1

Sumber : Penetapan Kinerja (PK) 2025 dan Renstra Bina Marga 2025-2029

Tabel 2.4 Target Indikator Kinerja Output Jumlah Layanan Umum

No.	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	Jumlah Layanan Umum	Penyusunan Laporan Keuangan	Bulan Layanan	12
		Pengelolaan BMN	Bulan Layanan	12

Sumber : Penetapan Kinerja (PK) 2025 dan Renstra Bina Marga 2025-2029

Tabel 2.5 Target Indikator Kinerja Output Jumlah Layanan Perkantoran

No.	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	Jumlah Layanan Perkantoran	Uang Makan PNS dan PPPK	Bulan Layanan	12
		Operasional Perkantoran	Dokumen	1
		Gaji Non PNS	Bulan Layanan	12
		Langganan Daya dan Jasa Operasional Lainnya	Bulan Layanan	12
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Dokumen	1

Sumber : Penetapan Kinerja (PK) 2025 dan Renstra Bina Marga 2025-2029

Tabel 2.6 Target Indikator Kinerja Output Jumlah Layanan Sarana Internal

No.	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	Jumlah Layanan Sarana Internal	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Unit	1
		Pengadaan Meubeleir	Unit	1
		Pengadaan Fasilitas Kantor	Unit	1

Sumber : Penetapan Kinerja (PK) 2025 dan Renstra Bina Marga 2025-2029

- d. **Target**, merupakan kuantitas yang ingin dicapai dari indikator kinerja output yang dimiliki Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus di tahun 2025. Target yang dicantumkan bersumber dari dokumen anggaran (RKA-KL) Awal Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus tahun 2025.
- e. **Jumlah anggaran**, merupakan total alokasi anggaran Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus yang bersumber dari dokumen anggaran (RKA-KL) Awal Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus Tahun Anggaran 2025

Penetapan Kinerja Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus tahun 2025 sebagaimana disajikan dalam gambar dibawah ini.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI JEMBATAN KHUSUS DAN TEROWONGAN DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM		
SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025
Meningkatnya Kualitas Bina Proses Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	IKP : Tingkat Pencapaian Kinerja Proses Bina Penyelenggaraan Jalan	
	Parameter : Tingkat Pencapaian Kinerja Proses Bina Penyelenggaraan Jalan	-
	IKK : Tingkat Kinerja Pelayanan Teknis Bidang Jalan dan Jembatan	100.00 %
	Rincian Output ABF.001 Layanan Teknis Bidang Jalan dan Jembatan	1.00 Rekomendasi Kebijakan
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Bina Marga	IKP : Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Bina Marga	
	Parameter : Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Bina Marga	-
	IKK : Tingkat Kinerja Dukungan Manajemen	85.76 %
	Rincian Output EBA.999 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal EBA.992 Layanan Umum	1.00 Layanan 1.00 Layanan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI JEMBATAN KHUSUS DAN TEROWONGAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025
EBA.994	Layanan Perkardoran	1.00 Layanan
EBR.951	Layanan Sarana Internal	3.00 Unit

Kegiatan:
1. Pengaturan dan Pembinaan Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
2. Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga
Total Anggaran:

Anggaran:
Rp. 11,548,178,000
Rp. 3,869,940,000
Rp. 15,418,118,000


 DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA
 KEPALA BALAI
 JEMBATAN KHUSUS DAN TEROWONGAN
 GATOT SUKMARO


 JAKARTA, 24 JANUARI 2025
 KEPALA BALAI
 JEMBATAN KHUSUS DAN TEROWONGAN
 GATOT SUKMARO

Gambar 2.1 Perjanjian Kinerja (PK) Awal

Sumber : Penetapan Kinerja (PK) 2025

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

- Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
- Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
- Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Sesuai dengan poin a), b), c) di atas maka Unit Kerja Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus wajib membuat Perjanjian Kerja (PK) Revisi karena telah terjadi perubahan struktur organisasi dan *Refocusing* anggaran seperti gambar dibawah.

REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI KEAMANAN JEMBATAN DAN TEROWONGAN KHUSUS
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025
Meningkatnya Kualitas Proses Bisnis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	KPI : Tingkat Efektivitas Kinerja Proses Bisnis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Parameter : Tingkat Efektivitas Kinerja Proses Bisnis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan RKS : Tingkat Kinerja Pelayanan Kelembagaan Bidang Jalan dan Jembatan Rincian Output ABF.001 Layanan Kelembagaan Bidang Jalan dan Jembatan	100.00 % 1.00 Rekomendasi Kelengkapan
Meningkatnya Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya	KPI : Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya (DUM) Parameter : Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya (DUM) RKS : Tingkat Dukungan Manajemen Balai Jembatan Khusus dan Terowongan Rincian Output EBA.009 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal EBA.002 Layanan Umum	80.75 % 1.00 Layanan 1.00 Layanan

REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI KEAMANAN JEMBATAN DAN TEROWONGAN KHUSUS
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025
EBA.994	Layanan Perkantoran	1.00 Layanan
EBB.951	Layanan Sarana Internal	3.00 Unit

Kegiatan:

- Pengaturan dan Pembinaan Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
- Dukungan Manajemen Dijin Bina Marga

Total Anggaran:

Anggaran:

Rp. 14,110,522,000

Rp. 3,868,940,000

Rp. 17,979,462,000



DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
RIZALI ANWAR

JAKARTA, 29 SEPTEMBER 2025



KEPALA BALAI
KEAMANAN JEMBATAN DAN TEROWONGAN KHUSUS
ADEP KRISTI

Rekapitulasi Output, Hal. 2 dari 2

Sumber : Penetapan Kinerja (PK) Revisi 2025

Gambar 2.2 Perjanjian Kinerja (PK) Revisi

Karena terjadi perubahan prioritas sesuai dengan poin c), maka Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus membuat PK Revisi Akhir karena telah terjadi efisiensi anggaran seperti gambar dibawah ini.

REVISI AKHIR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI KEAMANAN JEMBATAN DAN TEROWONGAN KHUSUS
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025
Meningkatnya Kualitas Proses Bisnis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	SKP : Tingkat Efektivitas Kinerja Proses Bisnis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	
	SKK : Tingkat Kinerja Pelayanan Katalisis Bilangan Jalan dan Jembatan	100.00 %
	ASB.851 : Layanan Katalisis Bilangan Jalan dan Jembatan	1.00 Rekomendasi Kelengkapan
Meningkatnya Dukungan Manajemen Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	SKP : Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya (DUMM)	
	SKK : Tingkat Dukungan Manajemen Balok Teknik Bidang Jalan dan Jembatan	95.70 %
	EBB.954 : Layanan Perkantoran	1.00 Layanan

Kegiatan:

- Pengaturan dan Pembinaan Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
- Dukungan Manajemen Dijin Bina Marga

Total Anggaran:

Anggaran:

Rp. 6,198,903,000

Rp. 1,732,873,000

Rp. 7,931,776,000



DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
RIZALI ANWAR

JAKARTA, 29 DESEMBER 2025



KEPALA BALAI
KEAMANAN JEMBATAN DAN TEROWONGAN KHUSUS
ADEP KRISTI

Rekapitulasi Output, Hal. 1 dari 1

Sumber : Penetapan Kinerja (PK) Revisi Akhir 2025

Gambar 2.3 Perjanjian Kinerja (PK) Revisi Akhir

Kronologi Perubahan Perjanjian Kinerja dan Anggaran

Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus tidak mengalami perubahan target perjanjian kinerja, hanya perubahan pagu anggaran PK Awal, PK Revisi dan PK Revisi Akhir sebagai berikut :

Tabel 2.2.3 Kronologi Perubahan Perjanjian Kinerja

NO	OUTPUT	SAT	TARGET		
			PK AWAL	PK REVISI	PK REVISI AKHIR
Sasaran Program : Meningkatnya kualitas bisnis proses penyelenggaraan jalan dan jembatan					
IKP :Tingkat Efektivitas Kinerja Proses Bisnis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan					
IKK: Tingkat Kinerja Pelayanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan		%	100	100	100
1	ABF.001 Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan	RK	1	1	1
Sasaran Program : Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya					
IKP : Tingkat Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga					
Indikator Kinerja Kegiatan		%	85,76	85,76	85,76
88	EBA 960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	1	1	-
89	EBA 962 Layanan Umum	Layanan	1	1	-
90	EBA 994 Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1
91	EBB 951 Layanan Sarana Internal	Unit	3	3	-
Total Anggaran			15.418.118.000	17.979.462.000	7.841.775.000

Sumber : Penetapan Kinerja (PK) Awal, Revisi dan Revisi Akhir 2025

Tabel 2.2.4 Perbandingan PK Awal dan Revisi

No	Indikator Kinerja			Target			Ket
	PK Awal	Satuan	PK Revisi dan PK Revisi Akhir	Satuan	PK Awal	PK Revisi	
	Program Infrastruktur Konektivitas		Program Infrastruktur Konektivitas				
	Meningkatnya kualitas bisnis proses penyelenggaraan jalan		Meningkatnya kualitas bisnis proses penyelenggaraan jalan dan jembatan				
1	Tingkat pencapaian kinerja proses bisnis penyelenggaraan jalan	%	Tingkat efektivitas kinerja proses bisnis penyelenggaraan jalan dan jembatan	%			
	Tingkat kinerja pelayanan keteknikan bidang jalan dan jembatan	%	Tingkat kinerja pelayanan keteknikan bidang jalan dan jembatan	%	100	100	100
	Program Dukungan Manajemen		Program Dukungan Manajemen				
	Meningkatnya dukungan manajemen Kementerian PU dan tugas teknis lainnya		Meningkatnya dukungan manajemen Kementerian PU dan tugas teknis lainnya				
1	Tingkat kualitas dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya Ditjen Bina Marga	%	Tingkat kualitas dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya (DJBK)	%			
	Tingkat kinerja dukungan manajemen	%	Tingkat Dukungan Manajemen BBPJN/BJPN	%	85,76	85,76	85,76
	TOTAL ANGGARAN				15.418.118.000	17.979.462.000	7.841.775.000

Sumber : Penetapan Kinerja (PK) Awal, Revisi dan Revisi Akhir 2025

Tabel 2.2.5 Perbandingan PK Awal dan Revisi (Output)

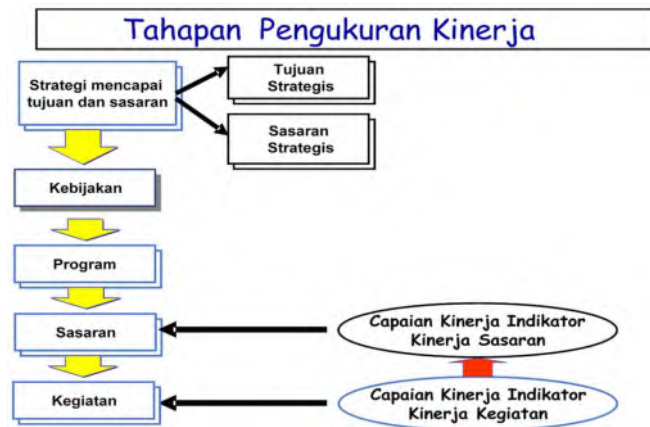
NO	OUTPUT	SAT	TARGET		
			PK AWAL	PK REVISI	PK REVISI AKHIR
Sasaran Program : Meningkatnya kualitas bisnis proses penyelenggaraan jalan dan jembatan					
IKP : Tingkat Efektivitas Kinerja Proses Bisnis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan					
IKK: Tingkat Kinerja Pelayanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan		%	100	100	100
1	ABF.001 Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan	RK	1	1	1
Sasaran Program : Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya					
IKP : Tingkat Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga					
Indikator Kinerja Kegiatan		%	85,76	85,76	85,76
88	EBA 960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	1	1	-
89	EBA 962 Layanan Umum	Layanan	1	1	-
90	EBA 994 Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1
91	EBB 951 Layanan Sarana Internal	Unit	3	3	-
Total Anggaran			15.418.118.000	17.979.462.000	7.841.775.000

Sumber : Penetapan Kinerja (PK) Awal, Revisi dan Revisi Akhir 2025

2.3 Metode Pengukuran

Untuk memperoleh gambaran keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus, ditetapkan metode pengukuran kinerja untuk mendapatkan gambaran secara rinci pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran, serta hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Gambaran tahapan pengukuran kinerja dapat dilihat lebih lanjut pada gambar di bawah ini.



Gambar 2.3 Tahapan Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja mencakup pengukuran kinerja *output* untuk capaian kinerja kegiatan dan *outcome* untuk capaian kinerja sasaran. Dalam pengukuran kinerja juga dilakukan dengan pemilahan atas *output*-nya yang sifatnya fisik lapangan, ini berupa panjang jalan dalam km dan panjang jembatan dalam meter dan output yang sifatnya non-fisik berupa piranti lunak yang sifatnya berupa *output* untuk pengaturan/pembinaan/perencanaan/ pengawasan.

- (1) Pengukuran realisasi capaian kinerja kegiatan, adalah pengukuran kinerja pada unit paling rendah dari kegiatan atau kelompok kegiatan yang mendukung suatu sasaran - sub sasaran.

Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan dengan mengukur output dari masing-masing kegiatan sebagai capaian kinerja kegiatan pada akhir tahun anggaran dengan menggunakan data-data *monitoring* capaian fisik seperti SIPP, laporan realisasi dari Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus dan realisasi kinerja kegiatan dari unit-unit eselon II sebagai realisasi capaian PK nya. Indikator output untuk mengukur realisasi capaian kinerja kegiatan.

Pengukuran tingkat capaian kinerja kegiatan dilakukan dengan membandingkan Realisasi Capaian Kinerja terhadap Target Kinerja dari masing-masing indikator kinerja output kegiatan.

Hasil pengukuran kinerja kegiatan tersebut dimuat dalam formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK).

(2) Pengukuran realisasi capaian kinerja sasaran/sub sasaran, dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- Berdasarkan pada hasil pengukuran capaian kinerja kumpulan kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya suatu sasaran/sub sasaran dalam penetapan kinerja yaitu yang target kinerjanya dalam prosentase (%).
- Penilaian tingkat pencapaian sasaran strategis tahun 2025 dengan membandingkan realisasi capaian kinerja *outcome* terhadap targetnya dari masing-masing indikator yang ditetapkan dalam penetapan kinerja.

Pengukuran capaian kinerja sasaran mempergunakan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Indikator kinerja *output* dan *outcome* inilah yang digunakan sebagai dasar pengukuran capaian kinerja bidang jalan dan jembatan yang diselenggarakan oleh Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus untuk mencapai tujuan, sasaran dan program dalam Review Renstra Kementerian PU.



Gambar 2.4 Tahapan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah

2.4 Target 2025 Menurut Renstra Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus

Target kinerja dalam hal ini diartikan sebagai target kinerja sasaran, baik sasaran strategis, sasaran program maupun sasaran kegiatan yang dilengkapi dengan indikatornya. Target kinerja sasaran menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai oleh

kementerian yang meliputi program dan kegiatan dalam periode waktu yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan target kinerja baik tingkat kegiatan, program maupun kementerian didasarkan pada kriteria-kriteria diantaranya:

- A. Target menggambarkan angka kuantitatif dan satuan yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja sasaran;
 - a. Indikator Kinerja Kegiatan, sesuai dengan Review Renstra Direktorat Jenderal Bina Marga terdapat 5 indikator kinerja kegiatan yang mendukung kinerja Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus, yaitu: Jumlah Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan, Jumlah Layanan Perkantoran, Jumlah Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal, Jumlah Layanan Umum dan Jumlah Layanan Sarana Internal. Adapun 5 indikator kinerja kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Penetapan Kinerja Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus Tahun 2025, dapat dilihat pada Tabel 2.4.1 dan Tabel 2.4.2 berikut ini.
 - b. Indikator Kinerja Output (Paket Kegiatan), sesuai dengan yang dimuat dalam RKA-KL Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus tahun 2025 bahwa terdapat 16 indikator kinerja output yang mendukung sasaran strategis Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus.

Tabel 2.4.1 Sandingan Outcome dan Target pada Perjanjian Kinerja 2025 dengan Renstra 2025-2029

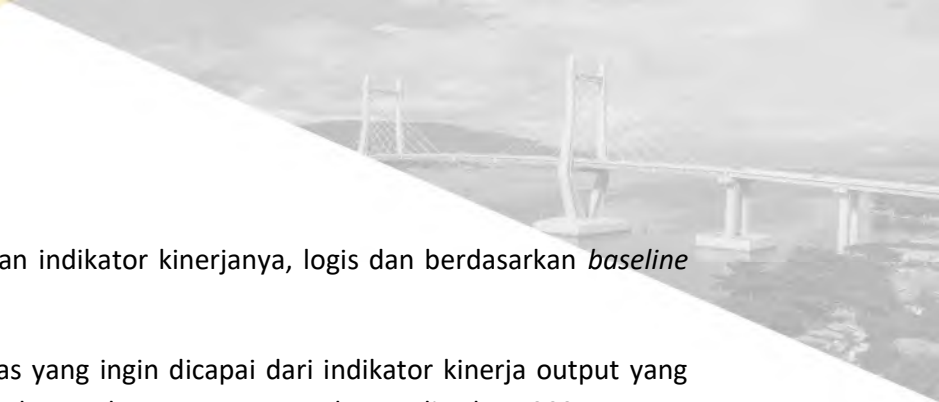
No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra				
			2025	2026	2027	2028	2029
	Program Infrastruktur Konektivitas						
	Meningkatnya kualitas bisnis proses penyelenggaraan jalan dan jembatan						
1	Tingkat efektivitas kinerja proses bisnis penyelenggaraan jalan dan jembatan	%					
	Tingkat kinerja pelayanan keteknikan bidang jalan dan jembatan	%	100	100	100	100	100
	Program Dukungan Manajemen						
	Meningkatnya dukungan manajemen Kementerian PU dan tugas teknis lainnya						
2	Tingkat kualitas dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya (DJBM)	%					
	Tingkat Dukungan Manajemen Balai Teknik Bidang Jalan dan Jembatan	%	85,76	87,05	88,33	89,62	90,91

Sumber : Penetapan Kinerja (PK) 2025 dan Renstra Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus 2025-2029

Tabel 2.4.2 Sandingan Target Kinerja Rencana Strategis Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus 2025 dengan Perjanjian Kinerja Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus 2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025		
			Renstra	PK Revisi	PK Revisi Akhir
	Program Infrastruktur Konektivitas				
	Meningkatnya kualitas bisnis proses penyelenggaraan jalan dan jembatan				
1	Tingkat efektivitas kinerja proses bisnis penyelenggaraan jalan dan jembatan	%			
	Tingkat kinerja pelayanan keteknikan bidang jalan dan jembatan	%	100	100	100
	Program Dukungan Manajemen				
	Meningkatnya dukungan manajemen Kementerian PU dan tugas teknis lainnya				
2	Tingkat kualitas dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya (DJBM)	%			
	Tingkat Dukungan Manajemen Balai Teknik Bidang Jalan dan Jembatan	%	85,76	85,76	85,76

Sumber : Penetapan Kinerja (PK) 2025 dan Renstra Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus 2025-2029



B. Penetapan target relevan dengan indikator kinerjanya, logis dan berdasarkan *baseline* data yang jelas.

- Target, merupakan kuantitas yang ingin dicapai dari indikator kinerja output yang dimiliki Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus di tahun 2025. Target yang dicantumkan bersumber dari dokumen anggaran (RKA-KL) awal Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus tahun 2025.
- Jumlah anggaran, merupakan total alokasi anggaran Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus yang bersumber dari dokumen anggaran (RKA-KL) awal Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus Tahun Anggaran 2025 dan revisi DIPA Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus. Berdasarkan hal tersebut Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus mempunyai sembilan revisi.

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

Untuk melakukan *monitoring* terhadap pelaksanaan dokumen penetapan kinerja tahun 2025 maka dilaksanakan penilaian kinerja secara periodik yaitu 1 bulan sekali selama tahun 2025 yang dituangkan dalam laporan *monitoring* dan evaluasi. Laporan *monitoring* dan evaluasi disusun untuk melakukan *monitoring* terhadap proses pencapaian kinerja dan alat untuk memprediksi sedini mungkin hambatan-hambatan yang mungkin muncul yang akan menyebabkan kinerja yang diharapkan tidak tercapai. Dengan dilakukan penyusunan rencana aksi diharapkan sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahun Anggaran 2025 dapat sepenuhnya tercapai.

3.1 Upaya Peningkatan Akuntabilitas

Sebagai wujud upaya Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus dalam meningkatkan akuntabilitas, maka telah dilakukan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh evaluator implementasi SAKIP TA 2024. Adapun tindak lanjut yang dimaksud disajikan dalam tabel di bawah.

Tabel 3.1 Tindak Lanjut Atas Evaluasi SAKIP TA 2024

NO	REKOMENDASI ATAS EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP TA 2024	RENCANA TINDAK LANJUT	PROGRES YANG TELAH DILAKSANAKAN SAMPAI SAAT INI	DOKUMENTASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Perencanaan Kinerja			
1	Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Jembatan TA 2025-2029 dengan ukuran kinerja yang SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevance, Timebound) menggunakan penyesuaian (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	Penetapan IKU Balai Jembatan TA 2025-2029 akan dilakukan dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyesuaian (cascading) disetiap level dan crosscutting	IKU Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus dilakukan dengan ukuran kinerja yang SMART dan menggunakan penyesuaian (cascading) disetiap level dan crosscutting	Lampiran 1 BKJTK - Struktur IKU-IKP-IKK (Balai).xlsx http://bit.ly/4s6YE7C
B	Pengukuran Kinerja			
1	Agar menyajikan cara ukur masing-masing indikator kinerja dalam penyusunan renstra/ Dokumen Perencanaan lainnya	Dalam penyusunan Renstra/ Dokumen perencanaan lainnya akan menyajikan cara ukur masing-masing indikator kinerja	Sudah menyajikan cara ukur masing-masing indikator kinerja pada dokumen Renstra/ Dokumen perencanaan lainnya	10 Maret 2026 - Renstra BKJTK 2025 2029 https://bit.ly/4d1z1R1
C	Pelaporan Kinerja			
1	Menambahkan perbandingan kinerja Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus dengan Kinerja Unit serupa Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus	Akan ditambahkan perbandingan antara kinerja Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus dengan kinerja unit serupa	Melakukan perbandingan Kinerja Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus dengan Balai Sistem Jaringan dan Lingkungan Jalan	Perbandingan Capaian Kinerja BKJTK dengan BSJLJ https://bit.ly/46XIAfT
D	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal			
1	Melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan Teknologi Informasi (Aplikasi)	Akan melaksanakan Evaluasi AKIP dengan menggunakan Sistem Teknologi Informasi E-Sakip Kementerian Pekerjaan Umum	Sudah melaksanakan Evaluasi AKIP dengan menggunakan Sistem Teknologi Informasi E-Sakip Versi 3 Kementerian Pekerjaan Umum	Balai Keamanan Jembatan Menggunakan E-Sakip V3 Kementerian PU

NO	REKOMENDASI ATAS EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP TA 2024	RENCANA TINDAK LANJUT	PROGRES YANG TELAH DILAKSANAKAN SAMPAI SAAT INI	DOKUMENTASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				https://bit.ly/4b6rWgD

3.2 Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja merupakan pengukuran tingkat capaian kinerja yang diperoleh berdasarkan perbandingan antara target dengan realisasi yang berhasil dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berjalan. Capaian Kinerja Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus Tahun 2025 didapatkan dengan membandingkan antara realisasi yang dicapai dengan target, sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik dan sebaliknya jika semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk. Capaian kinerja dan perbandingan antara realisasi penyerapan anggaran dengan rencana penyerapan terhadap *outcome* Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus secara rinci dapat dilihat pada dibawah ini.

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2025 Terhadap *Sasaran Program*

NO		INDIKATOR KINERJA	SAT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
		Program Infrastruktur Konektivitas				
		Meningkatnya kualitas bisnis proses penyelenggaraan jalan dan jembatan				
1	IKP	Tingkat efektivitas kinerja proses bisnis penyelenggaraan jalan dan jembatan	%			
	IKK	Tingkat kinerja pelayanan keteknikan bidang jalan dan jembatan	%	100	104,54	104,54
		Nilai kepuasan terhadap layanan/fasilitasi pengujian dan advis teknis	nilai	93	97,22	104,54
		Program Dukungan Manajemen				
		Meningkatnya dukungan manajemen Kementerian PU dan tugas teknis lainnya				
1	IKP	Tingkat kualitas dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya (DJBM)	%			
	IKK	Tingkat Dukungan Manajemen Balai Teknik Bidang Jalan dan Jembatan	%	85,76	86,19	100,50
		Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	%	90,40	88,75	98,17
		Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	%	81,12	83,63	103,09

Sumber : Hasil Analisis

Kinerja terhadap capaian *outcome* sebesar 104,54% karena parameter tingkat fasilitasi pengujian laboratorium dan advis teknis bidang jalan dan jembatan yang masuk dalam *output* layanan keteknikan bidang jalan dan jembatan telah terpenuhi 104,54 %. Sedangkan capaian kinerja dan perbandingan antara realisasi penyerapan anggaran dengan rencana penyerapan terhadap *output* Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus secara rinci dapat dilihat di bawah ini.

Tabel 3.3 Perbandingan Target (PK Revisi Akhir) dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

NO	OUTPUT	SAT	TARGET PK REVISI AKHIR	REALISASI	CAPAIAN	KETERANGAN
Sasaran Program : Meningkatnya kualitas bisnis proses penyelenggaraan jalan dan jembatan						
IKP : Tingkat Efektivitas Kinerja Proses Bisnis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan						
IKK: Tingkat Kinerja Pelayanan Ketechnikan Bidang Jalan dan Jembatan		%	100	104,54	104,54	
1	ABF.001 Layanan Ketechnikan Bidang Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	
Sasaran Program : Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya						
IKP : Tingkat Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga						
IKK : Tingkat Dukungan Manajemen Balai Teknik Bidang Jalan dan Jembatan		%	85,76	86,19	100,50	
1	EBA 994 Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	
Total Anggaran			7.841.775.000	7.830.383.000	99,85	

Sumber : Hasil Analisis dan BA Capaian TA 2025

Pada sub bab ini juga akan dijelaskan hasil pengukuran kinerja Tahun Anggaran 2025 dan perbandingan antara target revisi akhir dengan realisasi. Adapun rincian dari pencapaian Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus untuk TA. 2025 adalah sebagai berikut:

A. Indikator Kinerja Kegiatan: Tingkat pelayanan ketechnikan bidang jalan dan jembatan

Indikator kinerja *output* yang dilakukan untuk mencapai indikator kinerja kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Pemantauan dan Evaluasi Jembatan dan Terowongan Jalan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian Pekerjaan Umum, Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus mempunyai tugas melaksanakan evaluasi teknis dan pemantauan perilaku jembatan khusus dan terowongan, memberikan dukungan administrasi dan teknis kepada Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan dan memberikan layanan advis teknis melalui koordinasi dengan Direktorat Pembangunan Jembatan.



Gambar 3.1 Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus

menyelenggarakan fungsi, yaitu:

1. Pelaksanaan inspeksi jembatan bentang panjang dan terowongan khusus;
2. Pelaksanaan evaluasi teknis dan analisis kondisi jembatan bentang panjang dan terowongan khusus;
3. Pelaksanaan inventarisasi, registrasi, dan klarifikasi potensi bahaya terhadap jembatan khusus dan terowongan;
4. Pemberian dukungan administrasi dan dukungan teknis kepada Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan;
5. Pemberian layanan advis teknis untuk perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi jembatan; dan
6. Pelaksanaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, administrasi kepegawaian, pengelolaan dan pelaporan administrasi keuangan, penerimaan negara bukan pajak, dan barang milik negara.

Fungsi yang termasuk Pemantauan dan Evaluasi Jembatan dan Terowongan Jalan adalah pelaksanaan inspeksi jembatan bentang panjang dan terowongan khusus, evaluasi teknis dan analisis kondisi jembatan bentang panjang dan terowongan khusus, serta inventarisasi, registrasi, dan klarifikasi potensi bahaya terhadap jembatan khusus dan terowongan.

Untuk mendapatkan produk jembatan bentang panjang dan terowongan khusus jalan yang baik diperlukan program yang tepat dan dalam pelaksanaannya perlu mendapatkan pengawasan yang cukup memadai. *Monitoring* dan Evaluasi dilakukan dari beberapa segi yang dilakukan para stakeholder yang berkaitan dalam bidang penyelenggaraan jembatan untuk mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin.

Tabel 3.4 Informasi Capaian Kinerja Pemantauan dan Evaluasi Jembatan dan Terowongan Jalan

OUTPUT : PEMANTAUAN DAN EVALUASI JEMBATAN DAN TEROWONGAN JALAN					
Volume Awal (Layanan)	Volume Revisi (Layanan)	Capaian Terhadap Awal		Capaian Terhadap Revisi	
		Layanan	%	Layanan	%
1	1	1	100	1	100

Volume awal layanan sudah mencapai revisi oleh karena itu capaian kinerja tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Pencapaian kegiatan advis teknis dilapangan didukung dengan penggunaan perlengkapan K3 yang ketat dan selalu mematuhi protokol kesehatan. *Output* dari pekerjaan ini adalah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Jembatan dan Terowongan.

Manfaat:

Memutakhirkan penyelenggaraan jembatan melalui pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan jembatan bentang panjang dan terowongan khusus jalan yang ada yang dapat juga dilakukan dengan mengumpulkan data, terutama data sehingga potensi

permasalahan dapat dicegah sedini mungkin.

Kendala:

Keterbatasan SDM dan alat pemeriksaan jembatan menjadi penyebab dari lambatnya kinerja.

Alternatif solusi yang telah dilakukan:

Melakukan percepatan pelaksanaan paket swakelola yang belum dilaksanakan salah satunya dengan segera membentuk Tim Swakelola sesuai dengan Perpres nomor 54 tahun 2010, untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Perlu diprogramkan penambahan SDM secara periodik baik perekrutan baru maupun mutasi dari Unit Kerja Lainnya sesuai kebutuhan Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus. Selain itu dilakukan peningkatan kompetensi SDM Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus dengan kegiatan-kegiatan pelatihan alat survey dan monitoring.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, peningkatan/penurunan kinerja:

Selain pembahasan secara internal Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus, pelaksanaan hasil evaluasi juga dilakukan bersama Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan atau KKJTJ sehingga pembahasan terkait permasalahan teknis lapangan cepat terselesaikan. Dengan penambahan pegawai Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus dan pengoptimasian teknologi informasi penyampaian hasil layanan dapat berjalan dengan baik.

2. Dukungan Teknis Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 41/PRT/M/2015 tentang Penyelenggaraan Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan, Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus merupakan Unit Pelaksana Teknis Bidang Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan yang dibentuk untuk memberikan dukungan teknis kepada Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ). Sedangkan Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan adalah instansi yang bertugas membantu Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam penanganan Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan.

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian Pekerjaan Umum, Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus mempunyai tugas melaksanakan evaluasi teknis dan pemantauan perilaku jembatan bentang panjang dan terowongan khusus, memberikan dukungan administrasi dan teknis kepada Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan dan memberikan layanan advis teknis melalui koordinasi dengan Direktorat Pembangunan

Jembatan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus menyelenggarakan fungsi, yaitu:

1. Pelaksanaan inspeksi jembatan bentang panjang dan terowongan khusus;
2. Pelaksanaan evaluasi teknis dan analisis kondisi jembatan bentang panjang dan terowongan khusus;
3. Pelaksanaan inventarisasi, registrasi, dan klarifikasi potensi bahaya terhadap jembatan bentang panjang dan terowongan khusus;
4. Pemberian dukungan administrasi dan dukungan teknis kepada Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan;
5. Pemberian layanan advis teknis untuk perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi jembatan;
6. Pelaksanaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, administrasi kepegawaian, pengelolaan dan pelaporan administrasi keuangan, penerimaan negara bukan pajak, dan barang milik negara.

Beberapa fungsi yang termasuk ke dalam Dukungan Teknis Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan adalah pelaksanaan evaluasi teknis dan analisis kondisi jembatan bentang panjang dan terowongan khusus jalan, pemberian dukungan administrasi dan dukungan teknis kepada Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan, serta layanan advis teknis untuk perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi jembatan.





Gambar 3.2 Dukungan Teknis Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan

Tabel 3.5 Informasi Capaian Kinerja Dukungan Teknis Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan

OUTPUT : DUKUNGAN TEKNIS KOMISI KEAMANAN JEMBATAN DAN TEROWONGAN JALAN					
Volume Awal (Dokumen)	Volume Revisi (Dokumen)	Capaian Terhadap Awal		Capaian Terhadap Revisi	
		Dokumen	%	Dokumen	%
1	1	1	100	1	100

Volume awal layanan sudah mencapai revisi oleh karena itu capaian kinerja tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Dalam pelaksanaannya kegiatan-kegiatan Dukungan Teknik Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan dilakukan secara *hybrid* baik *online* maupun *offline*. *Output* dari pekerjaan ini berupa Sertifikat Persetujuan Desain dan Laik Fungsi Jembatan dan Terowongan.

Manfaat:

Mendukung Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan dalam melakukan penilaian kesesuaian pelaksanaan kegiatan terhadap tertib penyelenggaraan jembatan dan terowongan jalan yang meliputi tahap perencanaan teknis, pelaksanaan, pengelolaan dan pemeliharaan untuk menjaga fungsi jembatan dan terowongan jalan serta memberikan jaminan keamanan jembatan dan terowongan jalan dari potensi resiko kegagalan bangunan.



Gambar 3.3 Contoh Sertifikat Persetujuan Desain dan Laik Fungsi

Kendala:

Pada awal tahun, terjadi efisiensi anggaran. Hal ini membuat capaian kinerja pada awal tahun sedikit rendah. Kekurangan SDM, pembenahan organisasi pada pertengahan 2025 menjadi penyebab dari lambatnya kinerja pada tahun ini.

Alternatif solusi yang telah dilakukan:

Melakukan percepatan pelaksanaan paket swakelola yang belum dilaksanakan salah satunya dengan segera membentuk Tim Swakelola sesuai dengan Perpres nomor 54 tahun 2010, untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Perlu diprogramkan penambahan SDM secara periodik baik perekrutan baru maupun mutasi dari Unit Kerja Lainnya sesuai kebutuhan Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, peningkatan/penurunan kinerja:

Dalam pelaksanaannya kegiatan-kegiatan Dukungan Teknik Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan dilakukan secara *hybrid* baik *online* maupun *offline* sehingga pelayanan yang dari segi kuantitas dan kualitas tetap dapat terus meningkat. Namun terdapat kelemahan jika diskusi dilakukan secara *online* yaitu sering terjadi keterlambatan pengiriman

dokumen saran penanganan dari narasumber, dimana jika sebelumnya kegiatan dilakukan secara *offline*, dokumen saran narasumber dapat langsung diterima.

3. Adis dan Layanan Teknis Jembatan dan Terowongan Jalan

B. Indikator Kinerja Kegiatan: Tingkat Dukungan Manajemen Balai Teknik Bidang Jalan dan Jembatan

Indikator kinerja *output* yang dilakukan untuk mencapai indikator kinerja kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Uang Makan dan Lembur PNS dan PPPK

Output ini diperlukan dalam memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025 sejak bulan Januari 2025 khususnya Uang Makan dan Lembur PNS dan PPPK di lingkungan Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus.

Tabel 3.6 Informasi Capaian Kinerja Uang Makan dan Lembur PNS dan PPPK

OUTPUT : UANG MAKAN DAN LEMBUR PNS DAN PPPK					
Volume Awal (Bulan Layanan)	Volume Revisi (Bulan Layanan)	Capaian Terhadap Awal		Capaian Terhadap Revisi	
		Bulan Layanan	%	Bulan Layanan	%
12	12	12	100	12	100

Volume awal layanan sudah mencapai revisi oleh karena itu capaian kinerja tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Manfaat:

Menunjang pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025.

Kendala: -

Alternatif solusi yang telah dilakukan: -

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, peningkatan/penurunan kinerja:

Pembayaran Uang Makan dan Lembur PNS dan PPPK dilakukan setiap bulan melalui pembayaran langsung ke rekening pegawai.

2. Operasional Perkantoran

Operasional Perkantoran diperlukan dalam memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran khususnya administrasi operasional perkantoran dan pengelolaan keuangan di

Lingkungan Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus. Program ini bertujuan sebagai pendukung pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang mana kebijakannya mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan prima bidang administrasi perkantoran. Indikator hasil dari program ini adalah terwujudnya suatu pelayanan administrasi perkantoran yang sesuai dengan pelayanan prima dan peningkatan pengolahan administrasi barang negara. Sifat kegiatan dari program ini merupakan kegiatan rutinitas pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran yang terdiri dari penunjang pelayanan administrasi.

Kecamatan / Pemukiman Balok (Kecamatan)			
No.	Kategori Barang	Volume	Revisi
1.	Kertas dan Gelas (Kecamatan)	1.000	
2.	Tanah Lempur (Kecamatan)	1.000	
3.	Ornamen (Kecamatan)	1.000	
4.	Pasir (Kecamatan)	1.000	
5.	Tanah Lempur (Kecamatan)	1.000	
6.	Kertas dan Gelas (Kecamatan)	1.000	
7.	Tanah Lempur (Kecamatan)	1.000	
8.	Ornamen (Kecamatan)	1.000	
9.	Pasir (Kecamatan)	1.000	
10.	Tanah Lempur (Kecamatan)	1.000	
11.	Kertas dan Gelas (Kecamatan)	1.000	
12.	Tanah Lempur (Kecamatan)	1.000	
13.	Ornamen (Kecamatan)	1.000	
14.	Pasir (Kecamatan)	1.000	
15.	Tanah Lempur (Kecamatan)	1.000	

Gambar 3.4 Operasional Perkantoran

Tabel 3.7 Informasi Capaian Kinerja Operasional Perkantoran

OUTPUT : OPERASIONAL PERKANTORAN					
Volume Awal (Layanan)	Volume Revisi (Layanan)	Capaian Terhadap Awal		Capaian Terhadap Revisi	
		Layanan	%	Layanan	%
1	1	1	100	1	100

Volume awal layanan sudah mencapai revisi oleh karena itu capaian kinerja tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Manfaat:

- Pemenuhan penyelenggaraan operasional perkantoran bagi Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus.
- Menunjang pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025.

Kendala: -

Alternatif solusi yang telah dilakukan: -

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, peningkatan/penurunan kinerja:

Belanja Keperluan Perkantoran dilakukan setiap bulan dan disesuaikan dengan kebutuhan operasional. Serta belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin dilaksanakan setiap triwulan dan disesuaikan dengan kebutuhan.

3. Gaji Non PNS

Output ini diperlukan dalam memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025 khususnya Penggajian Non PNS di lingkungan Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus.

Tabel 3.8 Informasi Capaian Kinerja Gaji Non PNS

OUTPUT : GAJI NON PNS					
Volume Awal (Bulan Layanan)	Volume Revisi (Bulan Layanan)	Capaian Terhadap Awal		Capaian Terhadap Revisi	
		Bulan Layanan	%	Bulan Layanan	%
12	12	12	100	12	100

Volume awal layanan sudah mencapai revisi oleh karena itu capaian kinerja tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Manfaat:

Menunjang pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025.

Kendala: -

Alternatif solusi yang telah dilakukan: -

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, peningkatan/penurunan kinerja:

Pembayaran Gaji Non PNS dilakukan setiap bulan melalui pembayaran langsung ke rekening pegawai.

4. Langganan Daya dan Jasa Operasional Lainnya

Output ini bertujuan untuk menyediakan saran-sarana yang diperlukan untuk mendukung pencapaian kinerja sesuai dengan target dalam lingkup dan kewenangannya.

Tabel 3.9 Informasi Capaian Kinerja Langganan Daya dan Jasa Operasional Lainnya

OUTPUT : LANGGANAN DAYA DAN JASA OPERASIONAL LAINNYA					
Volume Awal (Set)	Volume Revisi (Set)	Capaian Terhadap Awal		Capaian Terhadap Revisi	
		Set	%	Set	%
1	1	1	100	1	100

Volume awal layanan sudah mencapai revisi oleh karena itu capaian kinerja tercapai sesuai dengan yang diharapkan. *Output* dari paket ini adalah tersedianya barang pengolah data dan komunikasi.

Manfaat:

- Memenuhi kebutuhan kekurangan sarana Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus.
- Menunjang pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025.

Kendala: -

Alternatif solusi yang telah dilakukan: -

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, peningkatan/penurunan kinerja:

Pengoptimalan anggaran dan prioritas kegiatan dengan baik merupakan salah satu faktor utama keberhasilan kegiatan ini.

5. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

Output ini bertujuan untuk menyediakan saran-sarana yang diperlukan untuk mendukung pencapaian kinerja sesuai dengan target dalam lingkup dan kewenangannya.



Gambar 3.5 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

Tabel 3.10 Informasi Capaian Kinerja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor

OUTPUT : PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR					
Volume Awal (Set)	Volume Revisi (Set)	Capaian Terhadap Awal		Capaian Terhadap Revisi	
		Set	%	Set	%
1	1	1	100	1	100

Volume awal layanan sudah mencapai revisi oleh karena itu capaian kinerja tercapai sesuai dengan yang diharapkan. *Output* dari paket ini adalah tersedianya barang pengolah data dan komunikasi.

Manfaat:

- Memenuhi kebutuhan kekurangan sarana dan prasarana Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus.
- Menunjang pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025.

Kendala: -

Alternatif solusi yang telah dilakukan: -

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, peningkatan/penurunan kinerja:

Pengoptimalan anggaran dan prioritas kegiatan dengan baik merupakan salah satu faktor utama keberhasilan kegiatan ini.

3.3 Perbandingan Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi dari masing-masing Instansi Pemerintah. Proses pengukuran kinerja Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran dari Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus. Dalam proses pengukuran kinerja dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan pada masing-masing program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis. Pengukuran yang dilakukan didasarkan pada penilaian keberhasilan *output* dan *outcome*. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang dimaksud dengan *output* (keluaran) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. Sementara itu, yang dimaksud dengan *outcome* (hasil) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja dalam renstra pada tahun ini dengan tahun sebelumnya. Tabel perbandingan capaian kinerja, realisasi kinerja dan target kinerja Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus dengan Balai Sistem Jaringan dan Lingkungan Jalan, secara rinci dapat dilihat pada di bawah ini.

Tabel 3.3.1 Perbandingan Capaian Kinerja Outcome Tahun 2025 Dengan Beberapa Tahun Terakhir

NO	INDIKATOR KINERJA	SAT	2020			2021			2022			2023			2024			2025		
			TARGET	REAL	KINERJA (%)	TARGET	REAL	KINERJA (%)	TARGET	REAL	KINERJA (%)	TARGET	REAL	KINERJA (%)	TARGET	REAL	KINERJA (%)	TARGET	REAL	KINERJA (%)
	Program Infrastruktur Konektivitas																			
1	Meningkatnya kualitas bisnis proses penyelenggaraan jalan dan jembatan																			
	Tingkat efektivitas kinerja proses bisnis penyelenggaraan jalan dan jembatan	%																		
	Tingkat kinerja pelayanan keteknikan bidang jalan dan jembatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	104,54	104,54
	Program Dukungan Manajemen																			
	Meningkatnya dukungan manajemen Kementerian PU dan tugas teknis lainnya																			
1	Tingkat kualitas dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya (DUBM)	%																		
	Tingkat Dukungan Manajemen Balai Teknik Bidang Jalan dan Jembatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	85,76	86,19	100,50

Sumber : Hasil Analisis

Pada Tahun 2020-2024 mengikuti Renstra 2020-2024 sedangkan pada tahun 2025 sudah mengikuti Renstra 2025-2029.

Tabel 3.3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Outcome Tahun 2025 Dengan Beberapa Tahun Terakhir
Data Kaki

NO	INDIKATOR KINERJA	SAT	2020			2021			2022			2023			2024			2025		
			TARGET	REAL	KINERJA (%)	TARGET	REAL	KINERJA (%)	TARGET	REAL	KINERJA (%)	TARGET	REAL	KINERJA (%)	TARGET	REAL	KINERJA (%)	TARGET	REAL	KINERJA (%)
	Program Infrastruktur Konektivitas																			
	Meningkatnya kualitas bisnis proses penyelenggaraan jalan dan jembatan																			
1	Tingkat efektivitas kinerja proses bisnis penyelenggaraan jalan dan jembatan	%																		
	Tingkat kinerja pelayanan keteknikan bidang jalan dan jembatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	104,54	104,54	
	Program Dukungan Manajemen																			
	Meningkatnya dukungan manajemen Kementerian PU dan tugas teknis lainnya																			
1	Tingkat kualitas dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya (DUBM)	%																		
	Tingkat Dukungan Manajemen Balai Teknik Bidang Jalan dan Jembatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	85,76	86,19	100,50	

Sumber : Hasil Analisis

Tidak dapat dibandingkan capaian kinerja outcome tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya karena tahun 2025 adalah tahun awal periode renstra 2025-2029, maka tidak dapat dilakukan perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya

Tabel 3.3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Output Tahun 2025 Dengan Beberapa Tahun Terakhir

NO	OUTPUT	SAT	2021			2022			2023			2024			2025		
			TARGET	REALISASI	KINERJA (%)	TARGET	REALISASI	KINERJA (%)	TARGET	REALISASI	KINERJA (%)	TARGET	REALISASI	KINERJA (%)	TARGET	REALISASI	KINERJA (%)
Sasaran Program : Meningkatkan kualitas bisnis proses penyelenggaraan jalan dan jembatan																	
IKP: Tingkat Efektivitas Kinerja Proses Bisnis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan																	
IKK: Tingkat Kinerja Pelayanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan																	
1	ABF.001 Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan	Rekomendasi	1	1	100	1	1	100	1	1	100	1	1	100	1	1	100
Sasaran Program : Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya																	
IKP : Tingkat Dukungan Manajemen Dijen Bina Marga																	
Indikator Kinerja Kegiatan																	
88	EBA 960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	1	1	100	1	1	100	1	1	100	1	1	100	1	1	100
89	EBA 962 Layanan Umum	Layanan	1	1	100	1	1	100	1	1	100	1	1	100	1	1	100
90	EBA 994 Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	100	1	1	100	1	1	100	1	1	100	1	1	100
91	EBB 951 Layanan Sarana Internal	Layanan	1	1	100	1	1	100	1	1	100	1	1	100	1	1	100
Total Anggaran																	

Sumber : Hasil Analisis

Tabel 3.11 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Kinerja terhadap Renstra

NO	OUTPUT		SAT	TARGET RENSTRA 2025-2029	2025			2026	2027	2028	2029
					TARGET	REALISASI	KINERJA (%)	TARGET	TARGET	TARGET	TARGE
Sasaran Program : Meningkatkan kualitas bisnis proses penyelenggaraan jalan dan jembatan											
IKP :Tingkat Efektivitas Kinerja Proses Bisnis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan											
IKK: Tingkat Kinerja Pelayanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan				%	100	104,54	104,54	100	100	100	1
1	ABF.001	Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	1	100	1	1	1	
Sasaran Program : Meningkatkan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya											
IKP : Tingkat Dukungan Manajemen Dijen Bina Marga											
Indikator Kinerja Kegiatan				%	85,76	86,19	100,50	87,05	86,33	89,62	90,
90	EBA 994	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	100	1	1	1	
Total Anggaran							7.841.775				

Sumber : Hasil Analisis

Tabel 3.3.5 Perbandingan Capaian Kinerja Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus dengan Balai Teknik Lainnya (Benchmarking)

NO		INDIKATOR KINERJA	SAT	BALAI KEAMANAN JEMBATAN DAN TEROWONGAN JALAN			BALAI SISTEM JARINGAN DAN LINGKUNGAN JALAN		
				TARGET	CAPAIAN	KINERJA (%)	TARGET	CAPAIAN	KINERJA (%)
		Program Infrastruktur Konektivitas							
		Meningkatnya kualitas bisnis proses penyelenggaraan jalan dan jembatan							
1	IKP	Tingkat efektivitas kinerja proses bisnis penyelenggaraan jalan dan jembatan	%						
	IKK	Tingkat kinerja pelayanan keteknikan bidang jalan dan jembatan	%	100	104,54	104,54	100	111,46	111,46
		Nilai kepuasan terhadap layanan/fasilitasi pengujian dan advis teknis	nilai	93	97,22	104,54	93	95,71	102,91
		Program Dukungan Manajemen							
		Meningkatnya dukungan manajemen Kementerian PU dan tugas teknis lainnya							
1	IKP	Tingkat kualitas dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya (DJBM)	%						
	IKK	Tingkat Dukungan Manajemen Balai Teknik Bidang Jalan dan Jembatan	%	85,76	86,19	100,50	85,76	86,45	100,80
		Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	%	90,40	88,75	98,17	90,40	89,26	98,74
		Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	%	81,12	83,63	103,09	81,12	83,63	103,09

Sumber : Hasil Analisis

3.4 Analisis Realisasi Anggaran

Anggaran memiliki peranan penting dalam suatu organisasi pemerintah. Menyusun anggaran dari setiap program organisasi dapat menjadi tugas yang cukup berat dan membebani. Namun demikian, hal ini sangat penting bagi suatu organisasi yang merupakan cara untuk merencanakan dan memastikan bahwa sebuah organisasi telah mengalokasikan sumber dayanya dengan baik. Tujuan finansial tentunya memiliki keterkaitan dengan faktor anggaran belanja dan pendapatan pada setiap organisasi yang ada.

Anggaran adalah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang. Secara garis besar anggaran merupakan alat manajemen untuk mencapai tujuan. Sehingga dalam proses penyusunan dibutuhkan data dan informasi, baik yang bersifat terkendali maupun yang bersifat tak terkendali untuk dijadikan bahan taksiran. Hal ini disebabkan karena data dan informasi tersebut akan berpengaruh terhadap keakuratan taksiran dalam proses perencanaan anggaran.

Dalam suatu organisasi, anggaran memegang peran penting dimana anggaran merupakan suatu rencana keuangan yang disusun secara sistematis dalam menunjang terlaksananya program kegiatan suatu organisasi. Seiring dengan adanya tuntutan masyarakat untuk dilakukannya transparansi dan akuntabilitas publik, menuntut setiap organisasi pemerintah untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya agar lebih berorientasi pada terciptanya *good public* dan *good governance*.

i. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. DIPA disusun berdasarkan Keputusan Presiden mengenai rincian anggaran belanja pemerintah pusat. DIPA berfungsi sebagai dasar pelaksanaan anggaran setelah mendapat pengesahan Menteri Keuangan.

- DIPA awal dari Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus sesuai dengan Perjanjian Kinerja memiliki pagu anggaran sebesar Rp. 15.418.118.000 - (lima belas miliar empat ratus delapan belas juta seratus delapan belas ribu rupiah).
- Revisi I pada tanggal 21 Februari 2025 dilakukan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Perubahan dilakukan dengan tidak mengubah pagu sehingga pagu anggaran tetap sebesar Rp. 15.418.118.000 - (lima belas miliar empat ratus delapan belas juta seratus delapan belas ribu rupiah).
- Revisi II pada tanggal 25 Maret 2025 dilakukan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Perubahan dilakukan dengan tidak mengubah pagu sehingga pagu anggaran tetap sebesar Rp. 15.418.118.000 - (lima belas miliar empat ratus delapan belas juta seratus delapan belas ribu rupiah).
- Revisi III pada tanggal 21 April 2025 dilakukan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Perubahan dilakukan dengan mengubah pagu yang semula sebesar Rp. 15.418.118.000 - (lima belas miliar empat ratus delapan belas juta seratus delapan belas ribu rupiah) menjadi Rp 16.803.118.000,- (enam belas miliar delapan ratus tiga juta seratus delapan belas ribu rupiah).
- Revisi IV pada tanggal 23 April 2025 dilakukan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Perubahan dilakukan dengan tidak mengubah pagu sehingga pagu anggaran tetap sebesar Rp. 16.803.118.000,- (enam belas miliar delapan ratus tiga juta seratus delapan belas ribu rupiah).
- Revisi V pada tanggal 14 Juli 2025 dilakukan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Perubahan dilakukan dengan tidak mengubah pagu sehingga pagu anggaran tetap sebesar Rp. 16.803.118.000,- (enam belas miliar delapan ratus tiga juta seratus delapan belas ribu rupiah).
- Revisi VI pada tanggal 1 September 2025 dilakukan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Perubahan dilakukan dengan mengubah pagu yang semula sebesar Rp. 16.803.118.000,- (enam belas miliar delapan ratus tiga juta seratus delapan belas ribu rupiah) menjadi Rp 17.979.462.000,- (tujuh belas miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah).

- Revisi VII pada tanggal 17 Oktober 2025 dilakukan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Perubahan dilakukan dengan mengubah pagu yang semula sebesar Rp. 17.979.462.000,- (tujuh belas miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) menjadi Rp 7.868.706.000,- (tujuh miliar delapan ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus enam ribu rupiah).
- Revisi VIII pada tanggal 21 November 2025 dilakukan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Perubahan dilakukan dengan mengubah pagu yang semula sebesar Rp. 7.868.706.000,- (tujuh miliar delapan ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus enam ribu rupiah) menjadi Rp 7.841.775.000,- (tujuh miliar delapan ratus empat puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Revisi IX pada tanggal 11 Desember 2025 dilakukan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Perubahan dilakukan dengan tidak mengubah pagu sehingga pagu anggaran tetap sebesar Rp. 7.841.775.000,- (tujuh miliar delapan ratus empat puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Pagu terakhir Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus sesuai yang tercantum pada situs www.iemon.pu.go.id adalah Rp 7.841.775.000,- (tujuh miliar delapan ratus empat puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Realisasi keuangan Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus sebesar 99.85% hasil tersebut lebih tinggi dari tahun 2024 yaitu sebesar 99.50% dan lebih tinggi dari 2023 yaitu sebesar 89,26%.

Tabel 3.12 Sumber DIPA Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus Tahun 2025

No	Unit Kerja	Sumber Dipa			Total
		RPM	PHLN	SBSN	
1	Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus	Rp. 7.841.775.000.-	-	-	Rp. 7.841.775.000.-
Jumlah		Rp. 7.841.775.000.-			Rp. 7.841.775.000.-

Tabel 3.13 Kronologis DIPA Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus Tahun 2025

NO.	DIPA	Jenis Revisi	Tanggal	Kode Digital Stamp	PAGU AWAL				Pagu Akhir	Keterangan
					RPM	PHLN	SBSN	TOTAL		
1	AWAL		4 Desember 2024	6280-1095-0818-6555	15.418.118.000	-	-	15.418.118.000	15.418.118.000	
2	REVISI -1	DJA	21 Februari 2025	7801-0062-5846-6009	15.418.118.000	-	-	15.418.118.000	15.418.118.000	Blokir anggaran untuk efisiensi dalam hal pagu tetap. Penambahan Lampiran IV A Blokir Anggaran sebesar Rp 11.584.609
3	REVISI -2	DJA	25 Maret 2025	9607-0627-6022-4686	15.418.118.000	-	-	15.418.118.000	15.418.118.000	Perubahan nilai blokir anggaran untuk efisiensi dalam hal pagu tetap. Perubahan nilai blokir anggaran pada Lampiran IV A dari Rp 11.584.609 menjadi Rp 10.670.756.
4	REVISI -3	DJA	21 April 2025	2072-8621-2900-5851	15.418.118.000	-	-	15.418.118.000	16.803.118.000	Penambahan anggaran dukungan teknis sebanyak Rp 1.385.000.000. Jumlah nilai blokir anggaran pada lampiran IV A masih tetap sama
5	REVISI -4	KANWIL	23 April 2025	2072-8621-2900-5851	16.803.118.000	-	-	16.803.118.000	16.803.118.000	Pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu tetap dan /atau ralat karena perubahan keterangan blokir anggaran.
6	REVISI -5	KANWIL	14 Juli 2025	2072-8621-2900-5851	16.803.118.000	-	-	16.803.118.000	16.803.118.000	Pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu tetap. Jumlah nilai blokir anggaran pada lampiran IV A masih tetap sama.
7	REVISI -6	DJA	1 September 2025	5282-3459-5065-7124	16.803.118.000	-	-	16.803.118.000	17.979.462.000	Penambahan anggaran dukungan teknis sebanyak Rp 1.176.344.000. Jumlah nilai blokir anggaran pada lampiran IV A masih tetap sama
8	REVISI 7	DJA	17 Oktober 2025	6690-0789-0607-8300	17.979.462.000	-	-	17.979.462.000	7.868.706.000	Penghapusan Blokir Anggaran pada lampiran IV A, Pengurangan anggaran dukungan teknis sebanyak Rp 8.001.619.000 dan dukungan manajemen sebanyak Rp 2.109.137.000

NO.	DIPA	Jenis Revisi	Tanggal	Kode Digital Stamp	PAGU AWAL				Pagu Akhir	Keterangan
					RPM	PHLN	SBSN	TOTAL		
9	Revisi 8	DJA	21 November 2025	9022-4685-3731-3011	7.868.706.000	-	-	7.868.706.000	7.841.775.000	Pengurangan anggaran dukungan manajemen sebanyak Rp 26.931.000
10	Revisi 9	Kanwil	11 Desember 2025	9022-4685-3731-3011	7.841.775.000	-	-	7.841.775.000	7.841.775.000	Pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu tetap

Sumber : DIPA 2025

ii. Realisasi Anggaran TA 2025

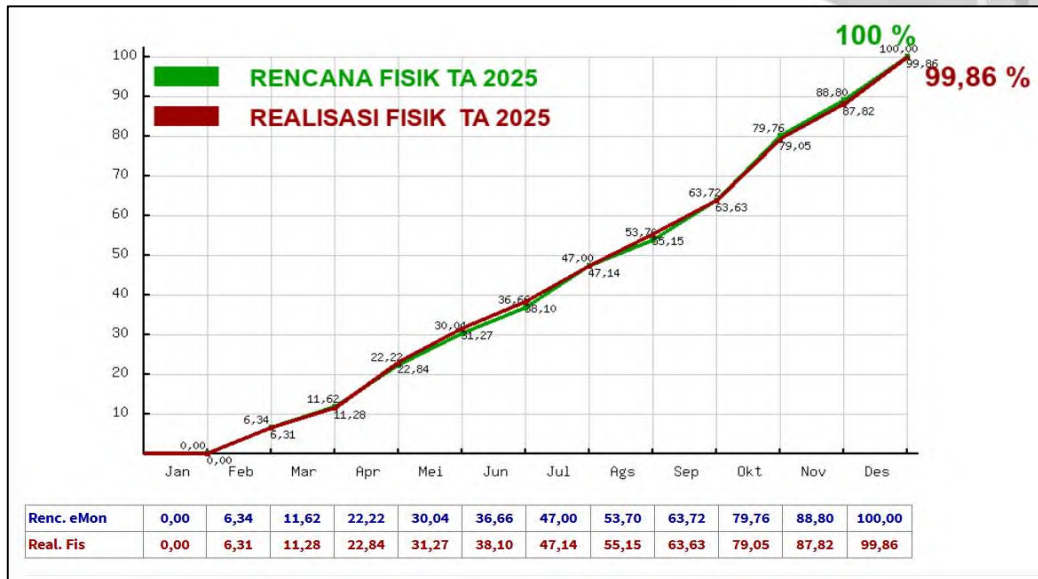
Realisasi Anggaran Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus Tahun Anggaran 2025 secara rinci dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

NO	INDIKATOR KINERJA	PAGU (Rp Ribu)	REALISASI (Rp Ribu)	PROGRES (%)		NILAI EFISIENSI (7) = (6)/(5)*100
				KEU	FISIK	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Program Infrastruktur Konektivitas						
1	Meningkatnya kualitas bisnis proses penyelenggaraan jalan dan jembatan					
	Tingkat efektivitas kinerja proses bisnis penyelenggaraan jalan dan jembatan					
	Tingkat kinerja pelayanan keteknikan bidang jalan dan jembatan	6.108.903	6.104.769	99,93	99,93	100
Program Dukungan Manajemen						
1	Meningkatnya dukungan manajemen Kementerian PU dan tugas teknis lainnya					
	Tingkat kualitas dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya (DJBK)					
	Tingkat Dukungan Manajemen Balai Teknik Bidang Jalan dan Jembatan	1.732.872	1.725.613	99,85	99,85	100

Sumber : Iemon PU 2025



Gambar 3.4 Kurva S Rencana dan Realisasi Keuangan Tahun 2025



Gambar 3.5 Kurva S Rencana dan Realisasi Fisik Tahun 2025

- iii. Perbandingan Realisasi Anggaran TA 2025 dengan TA 2024
- Untuk mengetahui seberapa baik realisasi anggaran pada tahun sekarang maupun pada tahun sebelumnya maka dapat dilakukan analisis dengan cara membandingkan pagu anggaran (awal maupun akhir), realisasi dan capaian terhadap target revisi awal maupun akhir. Realisasi anggaran baik atau tidaknya juga dapat diketahui melalui perbandingan realisasi anggaran pertahun dimulai dari tahun 2024 dengan 2025 Tabel Perbandingan Pagu Anggaran, Realisasi dan Capaian dan Tabel Perbandingan Realisasi Anggaran Pertahun, secara rinci dapat dilihat pada Tabel 4.24 dan Tabel 4.23 di bawah ini

Tabel 3.14 Perbandingan Realisasi Anggaran Pertahun

No	Indikator Kinerja	TA. 2024			TA. 2025		
		Pagu (Rp Ribu)	Realisasi		Pagu (Rp Ribu)	Realisasi	
			Rp Ribu	%		Rp Ribu	%
Program Infrastruktur Konektivitas							
Meningkatnya kualitas bisnis proses penyelenggaraan jalan dan jembatan							
1	Tingkat efektivitas kinerja proses bisnis penyelenggaraan jalan dan jembatan						
	Tingkat kinerja pelayanan keteknikan bidang jalan dan jembatan	12.825.438	12.790.504	99,73	6.108.903	6.104.769	99,93
Program Dukungan Manajemen							
Meningkatnya dukungan manajemen Kementerian PU dan tugas teknis lainnya							
1	Tingkat kualitas dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya (DJBM)						
	Tingkat Dukungan Manajemen Balai Teknik Bidang Jalan dan Jembatan	4.206.737	4.157.255	98,82	1.732.872	1.725.613	99,58
TOTAL							

Sumber : Hasil Analisis

Tabel 3.15 Perbandingan Realisasi Anggaran per Jenis Belanja

No	Program	TA. 2024			TA. 2025		
		Pagu (Rp Ribu)	Realisasi		Pagu (Rp Ribu)	Realisasi	
			Rp Ribu	%		Rp Ribu	%
1	Pegawai	237.480	206.638	87,01	257.100	249.973	97,23
2	Barang	16.384.695	16.332.822	99,68	7.584.675	7.580.410	99,94
	- Operasional	2.042.153	2.036.578	99,73	1.517.388	1.517.250	99,99
	- Non Operasional	14.342.542	14.296.245	99,68	6.067.287	6.063.159	99,93
3	Modal	410.000	408.298	99,58	-	-	-
	TOTAL	17.032.175	16.947.758	99,50	7.841.775	7.830.383	99,85

Sumber : Hasil Analisis

- iv. Isu Terkait Program dan Anggaran TA 2025
Tidak ada isu terkait program dan anggaran TA 2025 di Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus
- v. Perbandingan Kinerja Capaian Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus dengan Balai Teknik Lainnya
Capaian Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus akan dibandingkan dengan Balai Sistem Jaringan dan Lingkungan Jalan

Tabel 3.16 Tabel Perbandingan Kinerja Capaian Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus dengan Balai Teknik Lainnya

NO		INDIKATOR KINERJA	SAT	BALAI KEAMANAN JEMBATAN DAN TEROWONGAN JALAN			BALAI SISTEM JARINGAN DAN LINGKUNGAN JALAN		
				TARGET	CAPAIAN	KINERJA (%)	TARGET	CAPAIAN	KINERJA (%)
		Program Infrastruktur Konektivitas							
		Meningkatnya kualitas bisnis proses penyelenggaraan jalan dan jembatan							
1	IKP	Tingkat efektivitas kinerja proses bisnis penyelenggaraan jalan dan jembatan	%						
	IKK	Tingkat kinerja pelayanan keteknikan bidang jalan dan jembatan	%	100	104,54	104,54	100	111,46	111,46
		Nilai kepuasan terhadap layanan/fasilitasi pengujian dan advis teknis	nilai	93	97,22	104,54	93	95,71	102,91
		Program Dukungan Manajemen							
		Meningkatnya dukungan manajemen Kementerian PU dan tugas teknis lainnya							
1	IKP	Tingkat kualitas dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya (DJBK)	%						
	IKK	Tingkat Dukungan Manajemen Balai Teknik Bidang Jalan dan Jembatan	%	85,76	86,19	100,50	85,76	86,45	100,80
		Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	%	90,40	88,75	98,17	90,40	89,26	98,74
		Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	%	81,12	83,63	103,09	81,12	83,63	103,09

Sumber : Hasil Analisis

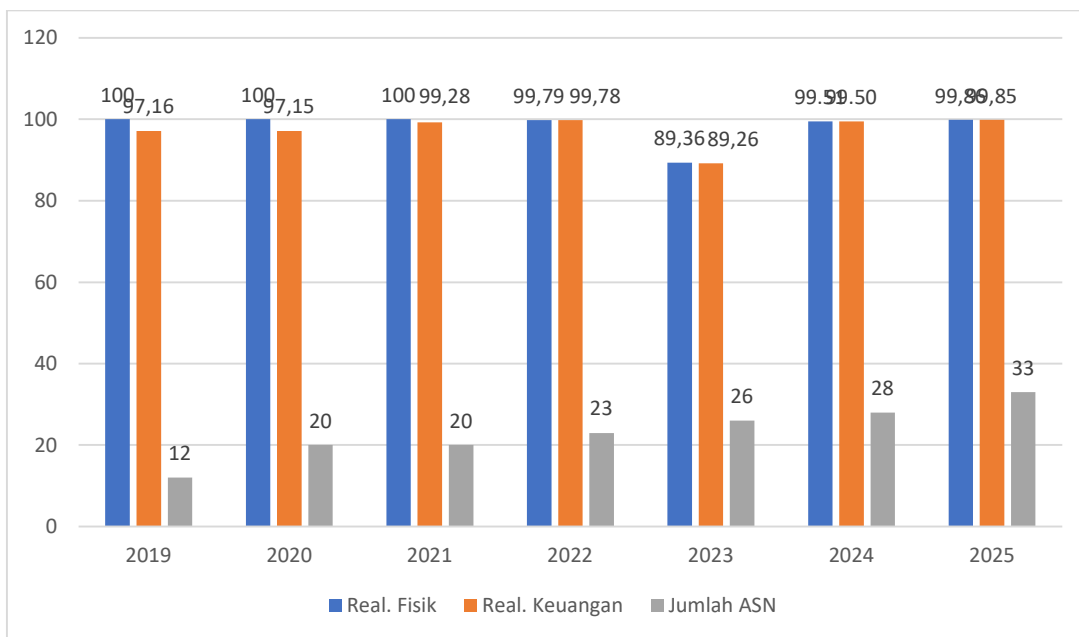
3.5 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktifitas. Meningkatkan Produktivitas dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan dan cara yang efektif dengan pendekatan langsung kepada SDM untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitasnya sebagai sumberdaya dalam suatu unit kerja. Dalam rangka Meningkatkan Produktifitas Perusahaan, hal-hal yang terkait dengan sistem, peraturan, cara kerja, target, dan perencanaan harus disiapkan dengan sangat matang. Semua dapat berimbas pada pencapaian tujuan.

Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus yang merupakan salah satu unit kerja dibawah Direktorat Jenderal Bina Marga, yang terbentuk berdasarkan Peraturan Menteri

Pekerjaan Umum Nomor 1 tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian Pekerjaan Umum.

Perubahan struktur organisasi diatas menyebabkan permasalahan dalam menjalankan tugas dan fungsi Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus. Banyak balai-balai baru yang terbentuk dengan kapasitas SDM yang tidak sesuai dengan beban kerja yang diberikan. Cakupan wilayah kerja Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus mencakup seluruh Indonesia. Oleh karena itu dengan SDM yang sedikit Balai dipacu agar dapat bekerja secara optimal dan akhirnya penyerapan anggaran dapat mendekati 100%. Jumlah ASN Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus pada tahun 2025 berjumlah 33 orang, dengan data historis jumlah PNS Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus dapat dilihat pada Gambar berikut.



Gambar 3.6 Grafik Perbandingan SDM, Realisasi Keuangan, dan Fisik

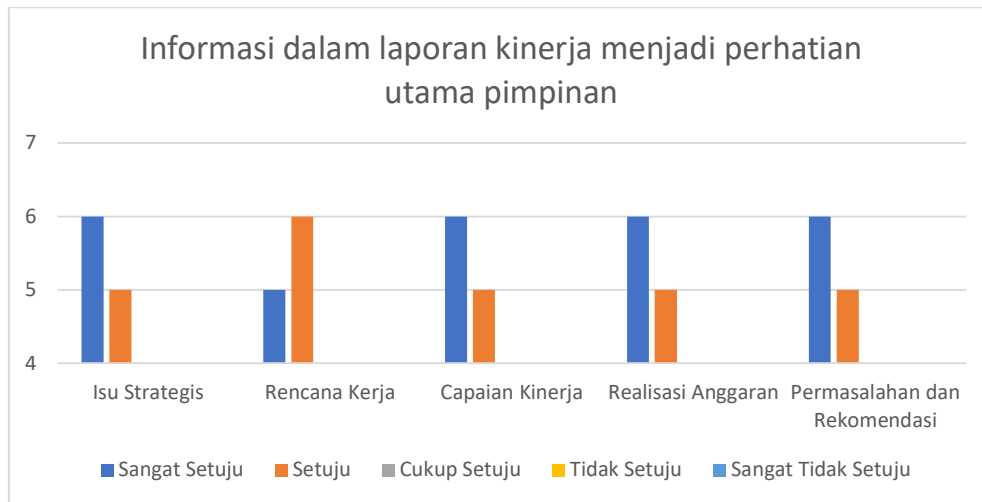
Selaras dengan jumlah pegawai yang bertambah meskipun masih sedikit bila dibandingkan dengan balai-balai yang lain dengan cakupan wilayah seluruh Indonesia Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus telah mampu menyerap anggaran mendekati 100% dengan pola yang terus naik setiap tahunnya. Dengan hasil yang telah dicapai, kedepannya untuk meningkatkan kinerja Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus ada beberapa upaya yang dilakukan antara lain:

- 1) Penambahan pegawai baik dari PNS, CPNS dan PPPK; dan
- 2) Peningkatan tunjangan kinerja;
- 3) Peningkatan kompetensi pegawai baik melalui diklat dan *in house training*.

3.6 Pemanfaatan Laporan Kinerja

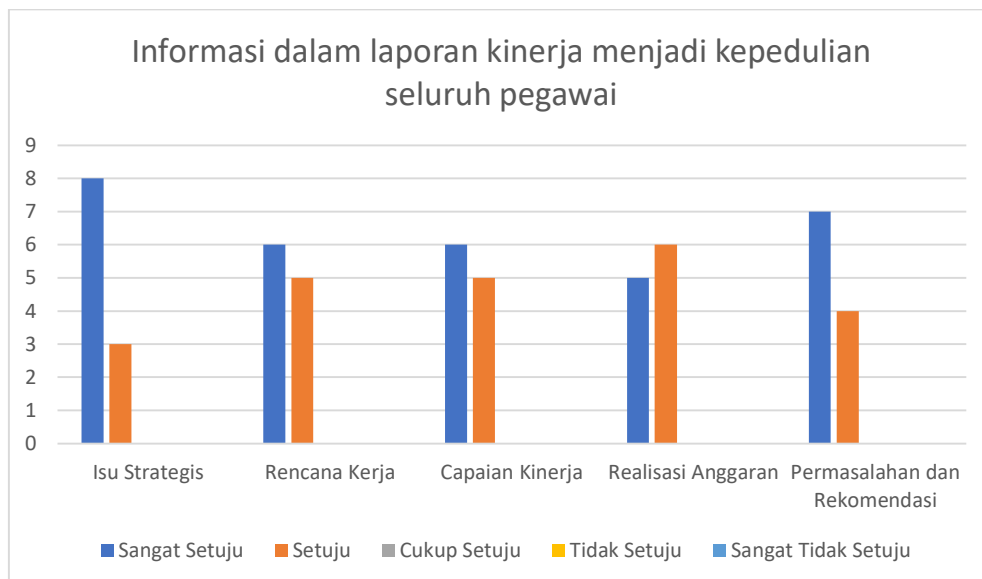
Sebagai upaya untuk menilai pemanfaatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus Tahun 2025, maka telah disebar kuesioner kepada pejabat dan pegawai di lingkungan Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus. Adapun *feedback* dari 11 pegawai Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus yang telah membalas kuesioner tersebut disajikan dalam grafik di bawah ini:

1. Informasi dalam laporan kinerja menjadi perhatian utama pimpinan:



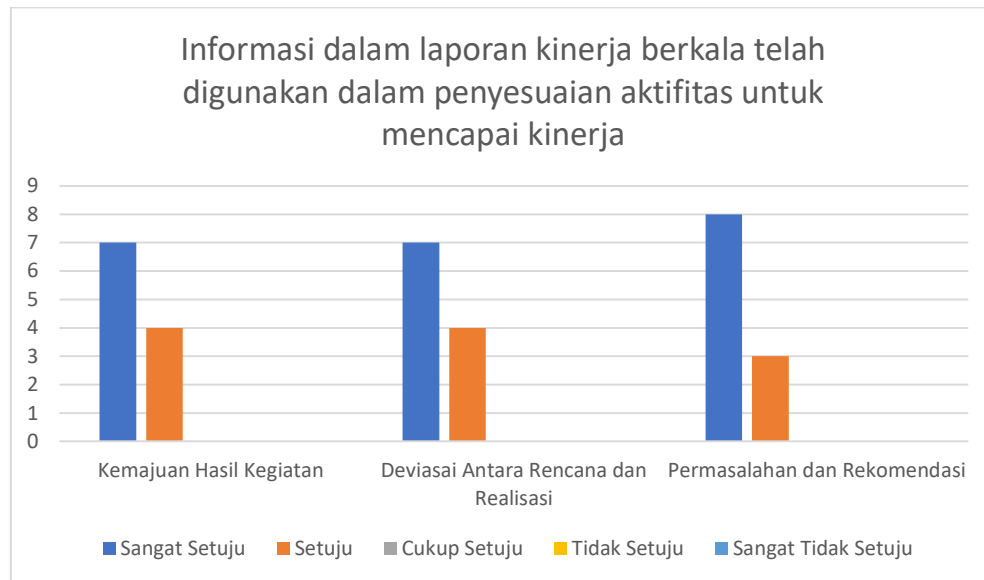
Kesimpulan: Mayoritas responden **sangat setuju** bahwa informasi dalam laporan kinerja menjadi perhatian utama pimpinan.

2. Informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai:



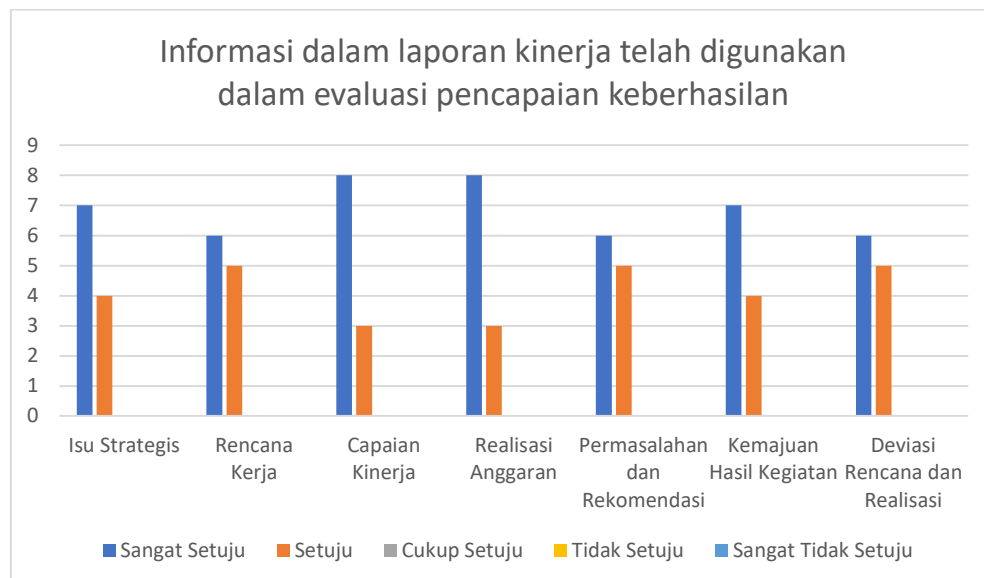
Kesimpulan: Mayoritas responden **sangat setuju** bahwa informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai.

3. Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktifitas untuk mencapai kinerja:



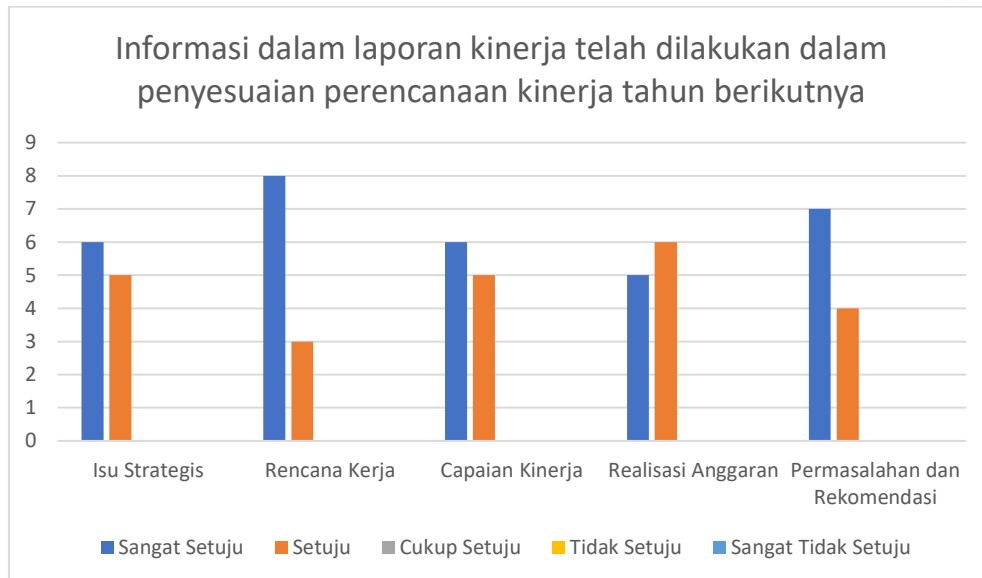
Kesimpulan: Mayoritas responden **sangat setuju** bahwa informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktifitas untuk mencapai kinerja.

4. Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan:



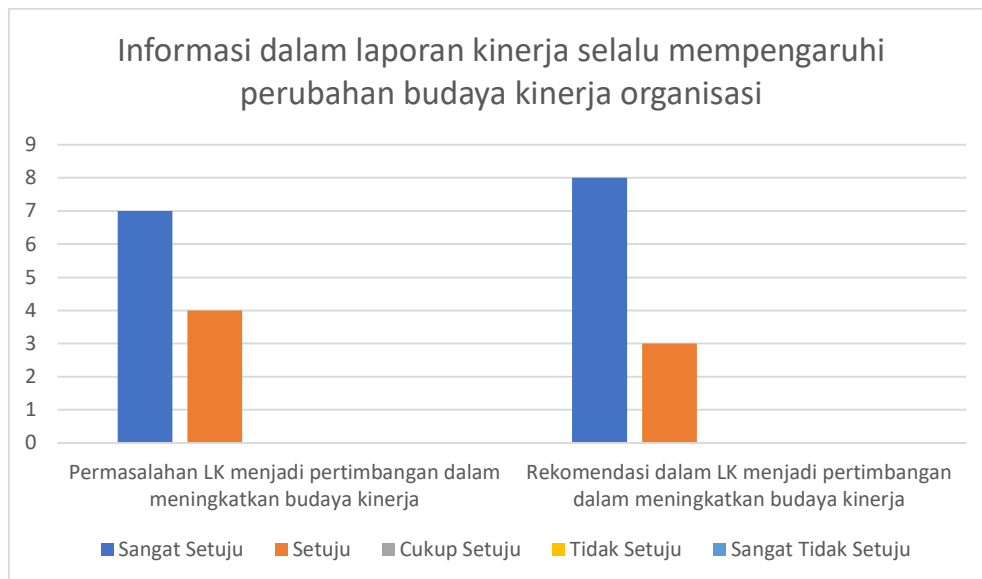
Kesimpulan: Mayoritas responden **sangat setuju** bahwa informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan.

5. Informasi dalam laporan kinerja telah dilakukan dalam penyesuaian perencanaan kinerja tahun berikutnya:



Kesimpulan: Mayoritas responden **sangat setuju** bahwa informasi dalam laporan kinerja telah dilakukan dalam penyesuaian perencanaan kinerja tahun berikutnya.

6. Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi:



Kesimpulan: Mayoritas responden **sangat setuju** bahwa informasi dalam laporan kinerja telah selalu mempengaruhi perubahan kinerja organisasi.

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas pegawai di lingkungan Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus mengetahui substansi dan informasi yang disampaikan melalui

LKIP serta telah menyadari sejauh apa pemanfaatan LKIP guna meningkatkan capaian kinerja di Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus.

3.7 Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Atas Penggunaan Layanan Publik

Berdasarkan Permen PANRB No.14 Tahun 2017, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan hasil pengukuran dari kegiatan SKM berupa angka. Angka tersebut ditetapkan dengan skala 1 sampai dengan 4. IKM ini berfungsi untuk menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Kementerian PU. Analisis IKM ini dapat dijadikan masukan untuk unit pelayanan publik Kementerian PU sebagai salah satu sumber informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan publik di Kementerian PU.

Dari survei atas Pelayanan masyarakat yang diselenggarakan oleh Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus di tahun 2025, diperoleh Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus sebesar 3,89, yang mana apabila dikonversi 97,22 dengan kategori Mutu Pelayanan “A” dan Kinerja Unit Pelayanan dengan kategori SANGAT BAIK. Adapun nilai yang diperoleh untuk masing-masing unsur pelayanan dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 3.17 Perhitungan nilai rata-rata per unsur

NO. RESPONDEN	UNSUR PENILAIAN								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
1	4	4	4	4	4	4	4	3	4
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	3	3	3	3	3	3	4	4	4
5	3	4	4	4	4	4	4	4	4
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4
7	4	4	4	4	4	4	3	4	3
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4
10	4	3	4	4	4	4	3	4	4
	38	38	39	39	39	39	39	39	40
Nilai Rata-Rata	3,80	3,80	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	4,00
NRR Tertimbang	0,42	0,42	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,44
Nilai SKM Unit Kerja	3,89								
Nilai Konversi	97,22								
Mutu Pelayanan	A								
Kinerja Unit Pelayanan	Sangat Baik								

BAB 4 PENUTUP

4.1 Simpulan Umum

Laporan Kinerja Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus disusun sebagai bentuk akuntabilitas kinerja balai dalam penggunaan anggaran. Laporan ini terdiri dari 4 Bab yang berisi latar belakang, tugas dan fungsi, struktur organisasi, serta isu strategis. Perencanaan Kinerja yang menguraikan renstra Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus yang mencakup visi dan misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus. Perjanjian kinerja (PK) yang memuat target kinerja dengan membandingkan PK Awal dan PK Revisi serta metode pengukurannya. Kapasitas organisasi berisi profil sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) digunakan sebagai perangkat untuk mencapai capaian kinerja Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus.

Upaya peningkatan akuntabilitas kinerja dengan melakukan perbaikan hasil evaluasi SAKIP tahun sebelumnya, capaian kinerja terhadap seluruh indikator kinerja mencakup realisasi anggaran dan fisik, perbandingan kinerja organisasi, pemanfaatan laporan kinerja, paket diresmikan dan penghargaan, dan survei kepuasan masyarakat sebagai parameter sejauh mana tingkat pelayanan yang diberikan dalam melayani masyarakat.

4.2 Faktor Pendukung Keberhasilan

Berikut ini merupakan faktor pendukung keberhasilan kinerja Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus, antara lain:

- a) Perencanaan kegiatan yang aktual serta didukung oleh perencanaan anggaran yang baik sehingga target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai;
- b) Hadirnya peran serta pimpinan yang menguasai situasi dan kondisi yang dihadapi unit kerja, sehingga keputusan yang tepat dapat diambil secara cepat apabila sewaktu-waktu terjadi permasalahan;
- c) Pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara terjadwal dan berkelanjutan, sehingga *improvement* dapat dilakukan secara terus menerus.

4.3 Permasalahan

Pada pelaksanaan kegiatan selama tahun 2025 Unit Kerja Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus telah mencapai kinerja 100% dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar 99,85%. Berdasarkan rencana dan realisasi yang telah dilakukan dapat disimpulkan beberapa permasalahan yang terjadi, diantaranya;

- a) Pembagian *jobdesk* yang belum merata karena ketimpangan kualifikasi terutama dalam bidang keteknikan;
- b) Perencanaan awal yang kurang sempurna sehingga pada saat pelaksanaan

- anggaran perlu merevisi anggaran yang telah direncanakan di awal tahun;
- c) Data awal Jembatan Bentang Panjang dan Terowongan Khusus di seluruh Indonesia masih minim, sehingga memperlambat pelaksanaan pekerjaan.

4.4 Rekomendasi

Mempertahankan dan/atau meningkatkan pencapaian selama tahun pelaksanaan 2025, Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus perlu melakukan langkah-langkah antisipasi untuk tahun yang akan datang, diantaranya;

- a) Pengembangan SDM perlu mendapat perhatian dan perlu diprogramkan penambahan SDM secara periodik baik perekrutan baru maupun mutasi dari Unit Kerja Lainnya sesuai kebutuhan Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus;
- b) Perlu adanya peningkatan kemampuan maupun keterampilan dengan cara mengikut sertakan SDM dalam kegiatan pelatihan;
- c) Pada awal perencanaan anggaran berikutnya harus dipertimbangkan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada tahun sebelumnya;
- d) Penerbitan sertifikat tidak mengalami masalah yang berarti sehingga dapat menerbitkan lebih banyak sertifikat lagi dengan tetap mempertimbangkan unsur teknis jembatan bentang panjang dan terowongan khusus;
- e) Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus perlu mempertahankan komitmen dan meningkatkan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
- f) Perlu adanya sosialisasi pemanfaatan *database* jembatan bentang panjang dan terowongan khusus jalan serta kewajiban pengumpulan dokumen dalam penyelenggaraan jembatan bentang panjang dan terowongan khusus jalan kepada pengelola.

4.5 Tindak Lanjut

Tindak lanjut untuk mempertahankan kinerja Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus yang baik adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan perencanaan yang matang dan komprehensif pada tahun N-1 untuk mengantisipasi potensi blokir atau pemotongan anggaran pada tahun berjalan;
- b. Monitoring dan Evaluasi rutin terhadap capaian kinerja masing-masing kegiatan;
- c. Melanjutkan pembangunan dan meningkatkan penerapan Zona Integritas pada seluruh pegawai, serta penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP);
- d. Penerapan dan pemantauan manajemen risiko untuk setiap kegiatan.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Awal 2025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : GATOT SUKMAR
Jabatan : KEPALA BALAI JEMBATAN KHUSUS DAN TEROWONGAN

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : ROY RIZALI ANWAR
Jabatan : DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

1. PIHAK PERTAMA pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

JAKARTA, 24 JANUARI 2025

PIHAK KEDUA
DIREKTORAT JENDERAL
BINA MARGA
PEKERJAAN UMUM
ROY RIZALI ANWAR

PIHAK PERTAMA
BALAI JEMBATAN KHUSUS
DAN TEROWONGAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
GATOT SUKMAR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI JEMBATAN KHUSUS DAN TEROWONGAN DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025
Meningkatnya Kualitas Bisnis Proses Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	IKP : Tingkat Pencapaian Kinerja Proses Bisnis Penyelenggaraan Jalan	
	Parameter : Tingkat Pencapaian Kinerja Proses Bisnis Penyelenggaraan Jalan	-
	IKK : Tingkat Kinerja Pelayanan Ketenjagaan Bidang Jalan dan Jembatan	100.00 %
	Rincian Output	
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Bina Marga	ABF.001 Layanan Ketenjagaan Bidang Jalan dan Jembatan	1.00 Rekomendasi Kebijakan
	IKP : Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Bina Marga	
	Parameter : Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Bina Marga	-
	IKK : Tingkat Kinerja Dukungan Manajemen	85.76 %
	Rincian Output	
	EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.00 Layanan
	EBA.962 Layanan Umum	1.00 Layanan

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI JEMBATAN KHUSUS DAN TEROWONGAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM**

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET 2025
	EBA.994	Layanan Perkantoran	1.00 Layanan
	EBB.951	Layanan Sarana Internal	3.00 Unit

Kegiatan:

1. Pengaturan dan Pembinaan Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
2. Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga

Total Anggaran:

Anggaran:

Rp. 11,549,178,000
Rp. 3,868,940,000
Rp. 15,418,118,000



2. Perjanjian Kinerja Revisi 2025



REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ARMEN ADEKRISTI
Jabatan : KEPALA BALAI KEAMANAN JEMBATAN DAN TEROWONGAN KHUSUS

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : ROY RIZALI ANWAR
Jabatan : DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

1. PIHAK PERTAMA pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025
Meningkatnya Kualitas Proses Bisnis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	KIP : Tingkat Efektivitas Kinerja Proses Bisnis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	
	Parameter : Tingkat Efektivitas Kinerja Proses Bisnis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	-
	IKK : Tingkat Kinerja Pelayanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan	100.00 %
	Rincian Output	
	ABF.001 Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan	1.00 Rekomendasi Kebijakan
Meningkatnya Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya	KIP : Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya (DJBM)	
	Parameter : Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya (DJBM)	-
	IKK : Tingkat Dukungan Manajemen Balai Jembatan Khusus dan Terowongan	85.76 %
	Rincian Output	
	EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.00 Layanan
	EBA.962 Layanan Umum	1.00 Layanan

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025
EBA.994	Layanan Perkantoran	1.00 Layanan
EBB.951	Layanan Sarana Internal	3.00 Unit

Kegiatan:

1. Pengaturan dan Pembinaan Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
2. Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga

Total Anggaran:

Anggaran:

Rp.	14,110,522,000
Rp.	3,868,940,000
Rp.	17,979,462,000

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
BOY RIZALI ANWAR

JAKARTA, 29 SEPTEMBER 2025
KEPALA BALAI
KEAMANAN JEREBATAN DAN TEROWONGAN KHUSUS

ARJEN ADEKRISTI

3. Data Kaki Laporan Kinerja 2025

Data Kaki PK Awal 2025

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI JEMBATAN KHUSUS DAN TEROWONGAN DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM							
SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA / RINCIAN OUTPUT	VOLUME	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	LOKASI	ANGGARAN (Dalam Ribuan Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Kualitas Bisnis Proses Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan						15,410,110	Total Anggaran
	Tingkat Pencapaian Kinerja Proses Bisnis Penyelenggaraan Jalan	1.00				11,549,178	
	ABF.001.Layanan Ketechnikan Bidang Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan				11,549,178	
		1.00 Rekomendasi Kebijakan	PROVINSI JAWA BARAT			11,549,178	
		1.00 Rekomendasi Kebijakan	BALAI JEMBATAN KHUSUS DAN TEROWONGAN			11,549,178	
			404. Advis dan Layanan Teknis			5,209,316	
				AA PEMANTAUAN DAN EVALUASI JEMBATAN DAN TEROWONGAN JALAN	KOTA BANDUNG	4,288,838	
				AB ADVIS DAN LAYANAN TEKNIS JEMBATAN DAN TEROWONGAN JALAN	KOTA BANDUNG	920,478	
			405. Layanan Data Dan Informasi			6,339,862	
				AA DUKUNGAN TEKNIS KOMISI KEAMANAN JEMBATAN DAN TEROWONGAN JALAN	KOTA JAKARTA TIMUR	6,339,862	

Lampiran Catatan Kaki, Hal. 1 dari 3

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA / RINCIAN OUTPUT	VOLUME	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	LOKASI	ANGGARAN (Dalam Ribuan Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Bina Marga						3,868,940	
	Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Bina Marga	1.00 Layanan				3,868,940	
	EBA.960.Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.00 Layanan				1,160,228	
		1.00 Layanan	PROVINSI JAWA BARAT			1,160,228	
		1.00 Layanan	BALAI JEMBATAN KHUSUS DAN TEROWONGAN			1,160,228	
			057. Pengelolaan Kepegawaian			1,160,228	
				AD ADMINISTRASI KEGIATAN SATKER BALAI JEMBATAN	KOTA BANDUNG	863,402	
				AE PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	KOTA BANDUNG	196,988	
				AF PENYELENGGARAAN ZONA INTEGRITAS DAN PENYUSUNAN MANAJEMEN RISIKO	KOTA BANDUNG	99,840	
	EBA.962.Layanan Umum	1.00 Layanan				186,688	
		1.00 Layanan	PROVINSI JAWA BARAT			186,688	
		1.00 Layanan	BALAI JEMBATAN KHUSUS DAN TEROWONGAN			186,688	
			235. Penyusunan Laporan Keuangan Bmn			186,688	
				AG PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	KOTA BANDUNG	89,228	
				AH PENGELOLAAN BMN	KOTA BANDUNG	97,440	
	EBA.994.Layanan Perkantoran	1.00 Layanan				2,400,944	
		1.00 Layanan	PROVINSI JAWA BARAT			2,400,944	

Lampiran Catatan Kaki, Hal. 2 dari 3

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA / RINCIAN OUTPUT	VOLUME	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	LOKASI	ANGGARAN (Dalam Ribuan Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		1.00 Layanan	BALAI JEMBATAN KHUSUS DAN TEROWONGAN			2,400,044	
			001 Gaji dan Tunjangan	AI UANG MAKAN DAN LEMBUR PNS DAN PPPK	KOTA BANDUNG	257,100	
			002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor			2,142,944	
				AJ OPERASIONAL PERKANTORAN	KOTA BANDUNG	603,306	
				AK GAJI NON PNS	KOTA BANDUNG	72,800	
				AL LANGGANAN DAYA DAN JASA OPERASIONAL LAINNYA	KOTA BANDUNG	727,200	
				AM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR	KOTA BANDUNG	739,638	
	EBB.951.Layanan Sarana Internal	3.00 Unit				122,000	
		3.00 Unit	PROVINSI JAWA BARAT			122,000	
		3.00 Unit	BALAI JEMBATAN KHUSUS DAN TEROWONGAN			122,000	
		1.00 Unit	052 Pengadaan Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi			32,000	
		1.00 Unit		AN PENGADAAN PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI	KOTA BANDUNG	32,000	
		2.00 Unit	053 Pengadaan Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran			90,000	
		1.00 Unit		AO PENGADAAN MEUBELEIR	KOTA BANDUNG	50,000	
		1.00 Unit		AP PENGADAAN FASILITAS KANTOR	KOTA BANDUNG	40,000	

Lampiran Catatan Kaki, Hal. 3 dari 3

Data Kaki PK Revisi 2025

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BALAI KEAMANAN JEMBATAN DAN TEROWONGAN KHUSUS DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM							
REVISI							
SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA / RINCIAN OUTPUT	VOLUME	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	LOKASI	ANGGARAN (Dalam Ribuan Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						17,979,462	Total Anggaran
						14,119,522	
						14,119,522	
	ABF.901.Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan	1.00 Rekomendasi Kebijakan				14,119,522	
		1.00 Rekomendasi Kebijakan	PROVINSI JAWA BARAT			14,119,522	
		1.00 Rekomendasi Kebijakan	BALAI KEAMANAN JEMBATAN DAN TEROWONGAN KHUSUS			14,119,522	
			404 Advis dan Layanan Teknis			5,658,052	
		1.00 Laporan		AA PEMANTAUAN DAN EVALUASI JEMBATAN DAN TEROWONGAN JALAN	KOTA BANDUNG	4,390,546	
		1.00 Laporan		AB ADVIS DAN LAYANAN TEKNIS JEMBATAN DAN TEROWONGAN JALAN	KOTA BANDUNG	1,265,500	

Lampiran Catatan Kaki, Hal. 1 dari 4

SASARAN PROGRAM (1)	INDIKATOR KINERJA / RINCIAN OUTPUT (2)	VOLUME (3)	KOMPONEN (4)	SUB KOMPONEN (5)	LOKASI (6)	ANGGARAN (Dalam Ribuan Rp) (7)	KETERANGAN (8)
			405 Layanan Data Dan Informasi			8,454,470	
		1.00 Laporan		AA DUKUNGAN TEKNIS KOMISI KEAMANAN JEMBATAN DAN TEROWONGAN JALAN	KOTA JAKARTA TIMUR	8,454,470	
Meningkatnya Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya						3,868,940	
	Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya (D.36W)					3,868,940	
	EBA.990.Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.00 Layanan				1,160,228	
		1.00 Layanan	PROVINSI JAWA BARAT			1,160,228	
		1.00 Layanan	BALAI KEAMANAN JEMBATAN DAN TEROWONGAN KHUSUS			1,160,228	
			057 Pengelolaan Kepegawain			1,160,228	
				AD ADMINISTRASI KEGIATAN SATKER BALAI JEMBATAN	KOTA BANDUNG	863,402	
				AE PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	KOTA BANDUNG	198,986	
				AF PENYELENGGARAAN ZONA INTEGRITAS DAN PENYUSUNAN MANAJEMEN RISIKO	KOTA BANDUNG	99,840	
	EBA.992.Layanan Umum	1.00 Layanan				186,668	
		1.00 Layanan	PROVINSI JAWA BARAT			186,668	
		1.00 Layanan	BALAI KEAMANAN JEMBATAN DAN TEROWONGAN KHUSUS			186,668	
			235 Penyusunan Laporan Keuangan Bmn			186,668	
				AG PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	KOTA BANDUNG	89,228	
				AH PENGELOLAAN BMN	KOTA BANDUNG	97,440	

Lampiran Catatan Kaki Hal. 3 dari 4

SASARAN PROGRAM (1)	INDIKATOR KINERJA / RINCIAN OUTPUT (2)	VOLUME (3)	KOMPONEN (4)	SUB KOMPONEN (5)	LOKASI (6)	ANGGARAN (Dalam Ribuan Rp) (7)	KETERANGAN (8)
	EBA.994.Layanan Perkantoran	1.00 Layanan				2,400,844	
		1.00 Layanan	PROVINSI JAWA BARAT			2,400,844	
		1.00 Layanan	BALAI KEAMANAN JEMBATAN DAN TEROWONGAN KHUSUS			2,400,844	
			001 Gaji dan Tunjangan			257,100	
				AJ UANG MAKAN DAN LEMBUR PNS DAN PPPK	KOTA BANDUNG	257,100	
			002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor			2,142,944	
				AJ OPERASIONAL PERKANTORAN	KOTA BANDUNG	852,584	
				AK GAJI NON PNS	KOTA BANDUNG	10,400	
				AL LANGGANAN DAYA DAN JASA OPERASIONAL LAINNYA	KOTA BANDUNG	1,217,477	
				AM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR	KOTA BANDUNG	262,503	
	EBB.951.Layanan Sarana Internal	3.00 Unit				122,000	
		3.00 Unit	PROVINSI JAWA BARAT			122,000	
		3.00 Unit	BALAI KEAMANAN JEMBATAN DAN TEROWONGAN KHUSUS			122,000	
		1.00 Unit	052 Pengadaan Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi			32,000	
		1.00 Unit		AN PENGADAAN PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI	KOTA BANDUNG	32,000	

Lampiran Catatan Kaki Hal. 3 dari 4

SASARAN PROGRAM (1)	INDIKATOR KINERJA / RINCIAN OUTPUT (2)	VOLUME (3)	KOMPONEN (4)	SUB KOMPONEN (5)	LOKASI (6)	ANGGARAN (Dalam Ribuan Rp) (7)	KETERANGAN (8)
	EBB.954.Layanan Perkantoran	1.00 Layanan				2,400,844	
		1.00 Layanan	PROVINSI JAWA BARAT			2,400,844	
		1.00 Layanan	BALAI KEAMANAN JEMBATAN DAN TEROWONGAN KHUSUS			2,400,844	
			001 Gaji dan Tunjangan			257,100	
				AJ UANG MAKAN DAN LEMBUR PNS DAN PPPK	KOTA BANDUNG	257,100	
			002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor			2,142,344	
				AJ OPERASIONAL PERKANTORAN	KOTA BANDUNG	652,564	
				AK GAJI NON PNS	KOTA BANDUNG	10,400	
				AL LANGGARAN DAYA DAN JASA OPERASIONAL LAINNYA	KOTA BANDUNG	1,217,477	
				AM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR	KOTA BANDUNG	262,500	
	EBB.951.Layanan Sarana Internal	3.00 Unit				122,000	
		3.00 Unit	PROVINSI JAWA BARAT			122,000	
		3.00 Unit	BALAI KEAMANAN JEMBATAN DAN TEROWONGAN KHUSUS			122,000	
		1.00 Unit	052 Pengadaan Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi			32,000	
		1.00 Unit		AN PENGADAAN PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI	KOTA BANDUNG	32,000	

Lampiran Catatan Kaki, Hal. 3 dari 4

SASARAN PROGRAM (1)	INDIKATOR KINERJA / RINCIAN OUTPUT (2)	VOLUME (3)	KOMPONEN (4)	SUB KOMPONEN (5)	LOKASI (6)	ANGGARAN (Dalam Ribuan Rp) (7)	KETERANGAN (8)
		2.00 Unit	053 Pengadaan Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran			90,000	
		1.00 Unit		AO PENGADAAN MEUBELER	KOTA BANDUNG	50,000	
		1.00 Unit		AP PENGADAAN FASILITAS KANTOR	KOTA BANDUNG	40,000	

Lampiran Catatan Kaki, Hal. 4 dari 4

Data Kaki PK Revisi Akhir 2025

REVISI AKHIR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

BALAI KEAMANAN JEMBATAN DAN TEROWONGAN KHUSUS

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA / RINCIAN OUTPUT	VOLUME	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	LOKASI	ANGGARAN (Dalam Ribuan Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						7,841,775	Total Anggaran
Meningkatnya Kualitas Proses Bisnis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan						6,106,993	
Tingkat Efektivitas Kinerja Proses Bisnis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan						6,106,993	
ABF.001.Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan	1.00 Rekomendasi Kebijakan	1.00 Rekomendasi Kebijakan	PROVINSI JAWA BARAT			6,106,993	
						6,106,993	
			BALAI KEAMANAN JEMBATAN DAN TEROWONGAN KHUSUS			6,106,993	
			404 Advis dan Layanan Teknis			1,878,474	
			1.00 Laporan	AA PEMANTAUAN DAN EVALUASI JEMBATAN DAN TEROWONGAN JALAN	KOTA BANDUNG	1,347,747	
	1.00 Laporan		AB ADVIS DAN LAYANAN TEKNIS JEMBATAN DAN TEROWONGAN JALAN	KOTA BANDUNG		530,727	

Lampiran Catatan Kaki: Hal. 1 dari 2

Lampiran Catatan Kaki: Hal. 1 dari 2

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA / RINCIAN OUTPUT	VOLUME	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	LOKASI	ANGGARAN (Dalam Ribuan Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			405 Layanan Data Dan Informasi			4.230.429	
		1.00 Laporan		AA DUKUNGAN TEKNIS KOMISI KEAMANAN JEMBATAN DAN TEROWONGAN JALAN	KOTA JAKARTA TIMUR	4.230.429	
Meningkatnya Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya						1.732.872	
	Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya (DJBM)					1.732.872	
	EBA.994.Layanan Perkantoran	1.00 Layanan				1.732.872	
		1.00 Layanan	PROVINSI JAWA BARAT			1.732.872	
		1.00 Layanan	BALAI KEAMANAN JEMBATAN DAN TEROWONGAN KHUSUS			1.732.872	
			001 Gaji dan Tunjangan			257.100	
				AI UANG MAKAN DAN LEMBUR PNS DAN PPPK	KOTA BANDUNG	257.100	
			002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor			1.475.772	
				AJ OPERASIONAL PERKANTORAN	KOTA BANDUNG	242.457	
				AK GAJI NON PNS	KOTA BANDUNG	10.400	
				AL LANGGANAN DAYA DAN JASA OPERASIONAL LAINNYA	KOTA BANDUNG	1.189.963	
				AM PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR	KOTA BANDUNG	32.952	

Lampiran Catatan Kaki, Hal. 2 dari 2

Lampiran Catatan Kaki: Hal. 2 dari 2

4. Berita Acara Kesepakatan Capaian Kinerja

BA CAPAIAN TA. 2025
BALAI KEAMANAN JEMBATAN DAN TEROWONGAN KHUSUS

NO	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET PK REVISI AKHIR 2025	CAPAIAN TA. 2025	KINERJA (%)	KETERANGAN	MENGETAHUI												
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)*100	(7)	KPJ	JH	JO	BANGJAL	JANGJATA	PRESWAL	PRESWAL	DSUJ	KKJJ	BOTS	SETOTJEN	KI	BPJT
							(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
4	SP Meningkatkan kualitas bisnis proses penyelenggaraan jalan dan jembatan																		
	Parameter Tingkat efektivitas kinerja proses bisnis penyelenggaraan jalan dan jembatan	%																	
	RK Tingkat upaya pelayanan kontraktor dalam bisnis jalan dan jembatan	%	100,00	104,54	104,54														
5	SP Meningkatkan dukungan manajemen Kementerian PU dan tugas teknis lainnya																		
	Parameter Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya (QDM)	%																	
	RK Tingkat Dukungan Manajemen (DDP-JNBPJN)	%	85,76	86,19	100,00														
	Statis Teknik Nilai kepuasan terhadap layanan/fasilitas pelayanan dan advokasi	nilai	90,00	97,22	104,54														
	UnkenRUP T/Garhu Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	%	80,40	88,75	98,17														
	UnkenRUP T/Garhu Tingkat layanan keagenan yang dilaksanakan tepat waktu	%	81,12	83,63	103,09														

PERAN PEKERJAAN

5. Penghargaan

ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan



CERTIFICATE OF CONFORMITY

This is to certify that the following organization

BALAI JEMBATAN

Jalan A.H. Nasution No. 264, Kecamatan Arjasa, Kota Bandung 40254, Jawa Barat, Indonesia

has been audited and found to meet the requirements of

SNI ISO 37001:2016

Anti-Bribery Management Systems - Requirements with guidance for use

Certification scope:
Administrative and service activities include procurement of goods and services, personnel management, financial management and management of State-Owned Assets

Certificate number : ABMS - 156

Issue version : 2024-1

Certificate start date : 05 August 2024

Certificate expiry date : 05 August 2027

Initial certificate issue date : 05 August 2024

Previous certificate expiry date : N/A

Last recertification audit date : N/A



Arifin Lambaga
President Director




90380824LSSMAP004



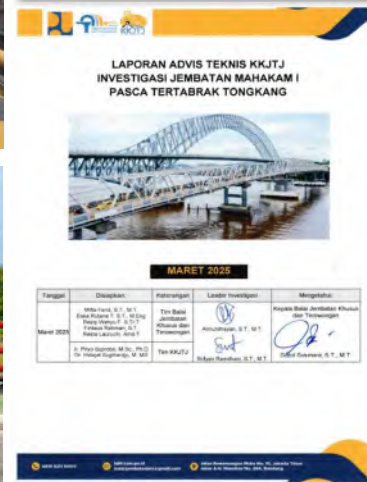
Komite Akreditasi Nasional
LSSMAP-004-IDN

This certification is accredited under Komite Akreditasi Nasional (KAN) with accreditation number LSSMAP-004-IDN

This certificate is issued by, and remains the property of, PT Mutuagung Lestari Tbk (MUTU International) located in Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 79 Cimanggis, Depok, Jawa Barat, Indonesia, which shall be returned or destroyed if requested. Authenticity of this certificate can be verified on www.mutucertification.com or by inquiries to info@mutucertification.com. Any unauthorized alteration, forgery, or falsification of the content or appearance of this certificate is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

6. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan

a. Kegiatan Tim Pemantauan dan Evaluasi



b. Kegiatan Tim Advis Teknis





c. Kegiatan Tim Data dan Informasi



Capaian Kinerja Output TA 2025

NO	OUTPUT	SAT	2025		
			TARGET	REALISASI	KINERJA (%)
Sasaran Program : Meningkatnya kualitas bisnis proses penyelenggaraan jalan dan jembatan					
IKP :Tingkat Efektivitas Kinerja Proses Bisnis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan					
IKK: Tingkat Kinerja Pelayanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan			100	104,54	104,54
1	ABF.001 Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100
	Pemantauan dan Evaluasi Jembatan dan Terowongan Jalan	Laporan	1	1	100
	Advis dan Layanan Teknis Jembatan dan Terowongan Jalan	Laporan	1	1	100
	Dukungan Teknis Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan	Laporan	1	1	100
Sasaran Program : Meningkatnya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya					
IKP : Tingkat Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga					
Indikator Kinerja Kegiatan			85,76	86,19	100,50
88	EBA 960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	1	1	100
	Administrasi Kegiatan Satker Balai Jembatan	Laporan	1	1	100
	Pengelolaan Kepegawaian	Laporan	1	1	100
	Penyelenggaraan Zona Integritas dan Penyusunan Manajemen Risiko	Laporan	1	1	100
89	EBA 962 Layanan Umum	Layanan	1	1	100
	Penyusunan Laporan Keuangan	Laporan	1	1	100
	Pengelolaan BMN	Laporan	1	1	100
90	EBA 994 Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	100
	Uang Makan PNS dan PPPK	Laporan	1	1	100
	Operasional Perkantoran	Laporan	1	1	100
	Gaji Non PNS	Laporan	1	1	100
	Langganan Daya dan Jasa Operasional Lainnya	Laporan	1	1	100
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor	Laporan	1	1	100
91	EBB 951 Layanan Sarana Internal	Unit	3	3	100
	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Unit	1	1	100
	Pengadaan Meubelair	Unit	1	1	100
	Pengadaan Fasilitas Kantor	Unit	1	1	100
Total Anggaran (Ribu)			7.841.775	7.830.383	99,85

**MANUAL INDIKATOR KINERJA
BALAI JEMBATAN KHUSUS DAN TEROWONGAN**

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Metode Perhitungan Indikator Kinerja
1	145.GA - PROGRAM INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS				
	7698 - Kegiatan Pengaturan dan Pembinaan Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan				
			IKK 05	Tingkat kinerja pelayanan keteknikan bidang jalan dan jembatan	$TSRB_{PL} = \left(\frac{RBT_{\bar{R}}}{RBT_{\bar{T}}} \times 100\% + \frac{LTA_{\bar{R}}}{LTA_{\bar{T}}} \times 100\% \right) \frac{1}{2}$ Keterangan: TSRBPL = Tingkat kinerja pelayanan keteknikan jalan dan jembatan (%) RBTR = Realisasi kegiatan pengembangan teknologi jalan/jembatan yang dilaksanakan (dokumen) RBTT = Target kegiatan pengembangan teknologi jalan/jembatan yang direncanakan (dokumen) LTAFR = Realisasi tingkat kepuasan terhadap layanan/ fasilitas pengujian dan advis teknis (nilai) LTAFT = Target tingkat kepuasan terhadap layanan/ fasilitas pengujian dan advis teknis (nilai) Khusus Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus tidak melaksanakan pengembangan teknologi, sehingga hanya diukur dari tingkat kepuasan layanan
2	145.WA - PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN				
	7756 - Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga				
	SK 06.01.01	Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis	IKK 10	Tingkat Dukungan Manajemen BBPJN/BPJN	1. Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN (50%) 2. Tingkat Layanan Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu (50%)



Jakarta, 24 Januari 2025
Kepala Balai Jembatan Khusus dan Terowongan

Gatot Sukmara
NIP 197401172009111001

**MANUAL INDIKATOR KINERJA
BALAI KEAMANAN JEMBATAN DAN TEROWONGAN KHUSUS**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Metode Perhitungan Indikator Kinerja
1	145.GA - PROGRAM INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS		
	7698 - Kegiatan Pengaturan dan Pembinaan Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan		
		IKK 05	$TSRB_{PL} = \left(\frac{RBT_{R}}{RBT_{T}} \times 100\% + \frac{LTAF_{R}}{LTAF_{T}} \times 100\% \right) / 2$ Keterangan: <i>TSRB_{PL}</i> = Tingkat kinerja pelayanan keteknikan jalan dan jembatan (%) <i>RBTR</i> = Realisasi kegiatan pengembangan teknologi jalan/jembatan yang dilaksanakan (dokumen) <i>RBTT</i> = Target kegiatan pengembangan teknologi jalan/jembatan yang direncanakan (dokumen) <i>LTAFR</i> = Realisasi tingkat kepuasan terhadap layanan/ fasilitas pengujian dan advis teknis (nilai) <i>LTAF_T</i> = Target tingkat kepuasan terhadap layanan/ fasilitas pengujian dan advis teknis (nilai) <i>Khusus Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus tidak melaksanakan pengembangan teknologi, sehingga hanya diukur dari tingkat kepuasan layanan</i>
2	145.WA - PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN		
	7756 - Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga		
	SK 06.01.01 Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis	IKK 10	Tingkat Dukungan Manajemen BBPJN/BPJN 1. Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN (50%) 2. Tingkat Layanan Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu (50%)



**MANUAL INDIKATOR KINERJA
BALAI KEAMANAN JEMBATAN DAN TEROWONGAN KHUSUS**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Metode Perhitungan Indikator Kinerja
1 145.GA - PROGRAM INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS			
7698 - Kegiatan Pengaturan dan Pembinaan Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan			
SK 02.04.01	Meningkatnya Kinerja Pengaturan Pembinaan Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	IKK 05 Tingkat kinerja pelayanan keteknikan bidang jalan dan jembatan	$TSRB_{PL} = \left(\frac{RBT_{PL} \times 100\%}{RBT_T} + \frac{LTAF_{PL} \times 100\%}{LTAF_T} \right) \div 2$ Keterangan: <i>TSRB_{PL}</i> = Tingkat kinerja pelayanan keteknikan jalan dan jembatan (%) <i>RBTR</i> = Realisasi kegiatan pengembangan teknologi jalan/jembatan yang dilaksanakan (dokumen) <i>RBT_T</i> = Target kegiatan pengembangan teknologi jalan/jembatan yang direncanakan (dokumen) <i>LTA_{FR}</i> = Realisasi tingkat kepuasan terhadap layanan/ fasilitasi pengujian dan advis teknis (nilai) <i>LTA_{FT}</i> = Target tingkat kepuasan terhadap layanan/ fasilitasi pengujian dan advis teknis (nilai) <i>Khusus Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus tidak melaksanakan pengembangan teknologi, sehingga hanya diukur dari tingkat kepuasan layanan</i>
2 145.WA - PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN			
7756 - Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga			
SK 06.01.01	Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis	IKK 05 Tingkat Dukungan Manajemen Balai Teknik Bidang Jalan dan Jembatan	1. Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN (50%) 2. Tingkat Layanan Kepegawaian yang Diselesaikan Tepat Waktu (50%)

Direktur Jenderal Bina Marga



Roy Rizali Anwar

Jakarta, 29 Desember 2025
Kepala Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus



Armen Andkristi

Capaian Indikator Kinerja Program TA. 2025

NO		INDIKATOR KINERJA	SAT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KETERANGAN
				(1)	(2)	=(2)/(1)*100	
		Program Infrastruktur Konektivitas					
		Meningkatnya kualitas bisnis proses penyelenggaraan jalan dan jembatan					
1	IKP	Tingkat efektivitas kinerja proses bisnis penyelenggaraan jalan dan jembatan	%				
	IKK	Tingkat kinerja pelayanan keteknikan bidang jalan dan jembatan	%	100	104,54	104,54	
	Parameter	Nilai kepuasan terhadap layanan/fasilitasi pengujian dan advis teknis	nilai	93	97,22	104,54	Nilai Realisasi didapatkan dari Laporan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) (Tabel Terlampir)
		Program Dukungan Manajemen					
		Meningkatnya dukungan manajemen Kementerian PU dan tugas teknis lainnya					
1	IKP	Tingkat kualitas dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya (DJBM)	%				
	IKK	Tingkat Dukungan Manajemen Balai Teknik Bidang Jalan dan Jembatan	%	85,76	86,19	100,50	Nilai Realisasi didapatkan dari penialian oleh Setditjen (Tabel dari Setditjen Terlampir)
		Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	%	90,40	88,75	98,17	Nilai Realisasi didapatkan dari penialian oleh Setditjen (Tabel dari Setditjen Terlampir)
		Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	%	81,12	83,63	103,09	Nilai Realisasi didapatkan dari penialian oleh Setditjen (Tabel dari Setditjen Terlampir)

2. Hasil Olah Data SKM

NO. RESPONDEN	UNSUR PENILAIAN								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
1	4	4	4	4	4	4	4	3	4
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	3	3	3	3	3	3	4	4	4
5	3	4	4	4	4	4	4	4	4
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4
7	4	4	4	4	4	4	3	4	3
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4
10	4	3	4	4	4	4	3	4	4
	38	38	39	39	39	39	39	39	40
Nilai Rata-Rata	3,80	3,80	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	4,00
NRR Tertimbang	0,42	0,42	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,44
Nilai SKM Unit Kerja	3,89								
Nilai Konversi	97,22								
Mutu Pelayanan	A								
Kinerja Unit Pelayanan	Sangat Baik								

Target Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat dan BBPJN/BPJN Tahun 2026 (per Satuan Kerja)

NO	BALAI	SATKER 2025	SATKER 2025	Penatausahaa n BMN	Capaian Penatausahaa n BMN (30%)	RKBMN	Capaian RKBMN (20%)	Penggunaan BMN	Capaian Penggunaan BMN (20%)	Nilai Wasdal BMN	Capaian Wasdal BMN (30%)	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN (50%)	Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu	Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (50%)	Target Tingkat Dukman Direktorat/BBPJN Tahun 2026
87	Jabar - Bintek	693802	Balai Bahan Jalan	85	25,5	100	20	93,64	18,73	80,00	24,00	88,23	44,11	83,63	41,82	85,93
88	Jabar - Bintek	693803	Balai Jembatan Khusus dan Terowongan	85	25,5	100	20	100,00	20,00	80,00	24,00	89,50	44,75	83,63	41,82	86,57
89	Jabar - Bintek	693804	Balai Geoteknik, Terowongan dan Struktur	85	25,5	100	20	99,86	19,97	80,00	24,00	89,47	44,74	83,63	41,82	86,55
90	Jabar - Bintek	693805	Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan	85	25,5	100	20	98,81	19,76	80,00	24,00	89,26	44,63	83,63	41,82	86,45

Perhitungan Capaian Dukungan Manajemen BKJTK 2025

Program:

Dukungan Manajemen (WA)

Sasaran Program (SP):

Meningkatnya Dukungan Manajemen Kementerian dalam Tugas Teknis Lainnya DJBM

Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP):

Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya (DJBM)

Sasaran Kegiatan (SK)

Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Unit Kerja Balai Teknik Bidang Jalan dan Jembatan

Indikator Kinerja Kegiatan 2 (IKK):

Tingkat Dukungan Manajemen Unit Kerja Balai Teknik Bidang Jalan dan Jembatan

Konsep/Definisi:

Tingkat kinerja dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya yang meliputi:

- 1. Tingkat efektifitas pengelolaan BMN
- 2. Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu

Cara mengukur:

Untuk Direktorat/Balai Teknik/Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional

Jumlah nilai tingkat kinerja dukungan manajemen sesuai dengan pembobotan pada setiap komponen sebagai berikut:

Komponen A. Tingkat efektifitas pengelolaan BMN (50%)	=	44,75
Komponen B. Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu (50%)	=	41,82
Capaian Dukungan Manajemen BKJTK	=	86,57

Cara mengukur tiap komponen

Komponen A

Tingkat efektifitas Pengelolaan BMN

Target Komponen A

Tahun	Penatausahaan BMN (30%)	RKBMN (20%)	Penggunaan BMN (20%)	Wasdal BMN (30%)	Tingkat efektifitas Pengelolaan BMN
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
2025	25,5	20	20	24	89,50

Deskripsi	Skala Target dan Realisasi
Tepat Waktu dan Lebih Cepat ≥ H - 2	100
Terlambat ≥ H + 7	90
Terlambat ≥ H 8 - 14	80
Terlambat > H 14	75

[1] Ketepatan waktu penyampaian Laporan Barang Milik Negara terkait tanggal penyampaian Laporan BMN sesuai target tanggal penyampaian sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku. (Semester I, Triwulan III, Semester II)

[2] Ketepatan waktu penyampaian RKBMN terkait tanggal penyampaian RKBMN sesuai target tanggal penyampaian sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku

[3] Penetapan Status Penggunaan BMN: Jumlah NUP BMN yang sudah di PSP dibagi dengan jumlah NUP BMN objek PSP

[4] Ketepatan waktu penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN Pengguna terkait tanggal penyampaian Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMN sesuai target tanggal penyampaian sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku

[5] Presentase akumulasi pembobotan masing-masing dalam kolom [1] - [4]

Komponen B

Tingkat layanan kepegawaian yang diselesaikan tepat waktu

Target Komponen B

Tahun	Kualifikasi (25%)	Kompetensi (40%)	Kinerja (30%)	Disiplin (5%)	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian organisasi tata laksana
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
2025	22,76	29,73	26,34	4,8	83,63

Metadata:

Berdsarkan penilaian IP ASN

[1] Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai

[2] Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan

[3] Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS

[4] Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami selama 1 tahun terakhir

Perhitungan Capaian Dukungan Teknis BKJTK

$$TSRBPL = \left(\frac{RBT_R \times 100\% + LTAF_R \times 100\%}{2} \right)$$

Keterangan:

TSRBPL = Tingkat kinerja pelayanan keteknikan jalan dan jembatan (%)

RBTR = Realisasi kegiatan pengembangan teknologi jalan/jembatan yang dilaksanakan (dokumen)

RBTT = Target kegiatan pengembangan teknologi jalan/jembatan yang direncanakan (dokumen)

LTAFR = Realisasi tingkat kepuasan terhadap layanan/ fasilitasi pengujian dan advis teknis (nilai)

LTAFT = Target tingkat kepuasan terhadap layanan/ fasilitasi pengujian dan advis teknis (nilai)

Khusus Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus tidak melaksanakan pengembangan teknologi, sehingga hanya diukur dari tingkat kepuasan layanan

$$TSRBPL = \frac{LTAFR}{LTAFT} \times 100$$
$$= \frac{97,22}{93} \times 100$$
$$= 104,54$$